

# PIMPINAN MPR: AJAK SENIMAN JADI PELOPOR PENGAMALAN EMPAT PILAR

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.11/TH.XIV/NOVEMBER 2020



Mahkamah Kehormatan Majelis

## KOMITMEN MPR LAKSANAKAN

### TAP MPR TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA



ISSN 0854-6371



9 770854 637158

**06** Perspektif  
Selesaikan Krisis Kesehatan,  
Mencegah Krisis Ekonomi

**32** Majelis Khusus  
Peringatan Hari Pahlawan  
Pahlawan di Era Pandemi

**39** Selingan  
75 Tahun Sejarah  
Kereta Api Indonesia

**61** Sosialisasi  
Kunci Kemajuan Bangsa  
Tersedianya SDM Berkualitas



*Selamat*  
*Memperingati Hari Pahlawan*

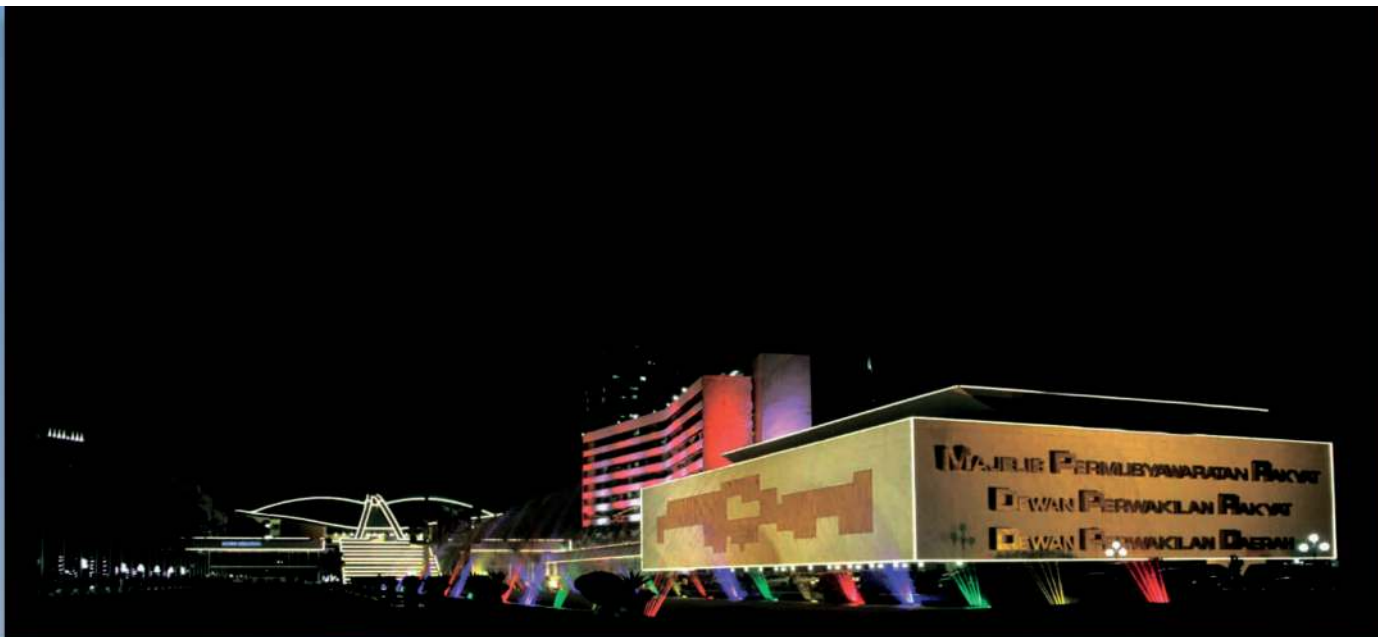
10 November 1945 - 10 November 2020



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



*Selamat*  
*Memperingati Hari Pahlawan*  
10 November 1945 - 10 November 2020



# Daftar Isi

EDISI NO.11/TH.XIV/NOVEMBER 2020



## 08 BERITA UTAMA

### Mahkamah Kehormatan Majelis

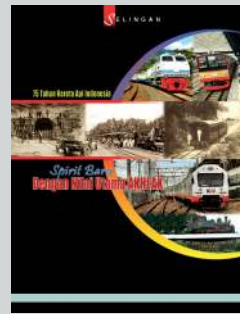
Dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis maka MPR telah menghadirkan komitmen yang lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuat MPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat dan marwah pimpinan serta anggota dan lembaga MPR itu sendiri.



**21 Nasional**  
**UMKM Baubau: Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19**



**50 Sosialisasi**  
**Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tanah Datar, Sumatera Barat**

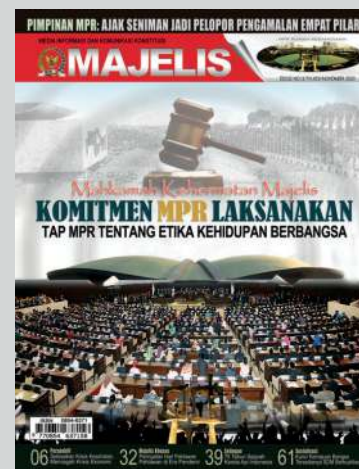


**39 SELINGAN**  
**75 Th Kereta Api Indonesia**



**76 Profil**  
**Taufik Basari**

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Majelis Khusus .....	32
Wakil Rakyat Bicara Buku .....	38
Aspirasi Masyarakat .....	47
Wawancara .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Dari Rumah Kebangsaan .....	80
Rehal .....	82



### COVER

Edisi No.11/TH.XIV/November 2020  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



**Budi Muliawan**  
Redaktur Pelaksana

## Pengantar Redaksi

### Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis

**B**EBERAPA pekan terakhir muncul wacana pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis di lembaga MPR. Wacana atau gagasan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini muncul setelah pertemuan Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie di Ruang Kerja Ketua MPR RI, pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Agenda pertemuan itu sebenarnya membicarakan soal rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Namun, dari pembicaraan itu muncul gagasan untuk membentuk Mahkamah Etik. Dengan Mahkamah Etik maka seseorang yang bersalah secara etika bisa mengajukan banding ke Mahkamah Etik, bukan ke peradilan umum. Landasan hukum pembentukan Mahkamah Etik adalah Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang masih berlaku sampai saat ini.

Namun, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menangkap adanya peluang pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis dari pertemuan tersebut. Apalagi Hidayat Nur Wahid sudah terobsesi membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sejak menjadi Ketua MPR periode 2004 – 2009. Karena itu, Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Pimpinan MPR agar sebelum menyelenggarakan konferensi nasional tentang Etika Kehidupan Berbangsa, MPR membentuk terlebih dahulu Mahkamah Kehormatan Majelis.

Alasannya, bagi Hidayat Nur Wahid, terasa aneh jika MPR menyelenggarakan konferensi nasional tentang etika, tetapi MPR sendiri belum memiliki badan kehormatan anggota MPR. Apalagi MPR adalah lembaga yang melahirkan Tap MPR No. VI Tahun 2001. Ketetapan ini justru menjadi rujukan bagi lembaga negara lainnya untuk membentuk badan kehormatan, seperti di DPR ada Mahkamah Kehormatan Dewan, di DPD ada Badan Kehormatan Dewan, dan di KPU ada

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). MPR yang mengeluarkan Tap MPR No. VI Tahun 2001 justru malah belum memiliki forum khusus yang mengurus persoalan etika.

Usulan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam Rapat Pimpinan MPR dan mendapat sambutan baik. Kemudian usulan itu juga dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Rapat Gabungan kemudian menyepakati membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Kini tahapan ke arah pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis sedang dalam proses pematangan dan diharapkan badan tersebut akan terbentuk tidak lama lagi.

Satu pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan Mahkamah Kehormatan Majelis tidak tumpang tindih dengan Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR dan Badan Kehormatan Dewan di DPD mengingat anggota MPR adalah juga anggota DPR atau anggota DPD?

Baik Ketua MPR Bambang Soesatyo maupun Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memastikan keberadaan Mahkamah Kehormatan Majelis tidak akan rancu. Sebab masing-masing lembaga memiliki Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Lembaga. Apa yang menjadi urusan Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR atau Badan Kehormatan Dewan di DPD berbeda dengan apa yang menjadi urusan Mahkamah Kehormatan Majelis. Nantinya, Mahkamah Kehormatan Majelis hanya fokus pada kegiatan anggota MPR yang khas, seperti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, kegiatan di badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR, seperti pengkajian atau perubahan terhadap UUD dan Tata Tertib MPR.

Karena itu, Mahkamah Kehormatan Majelis ini dibentuk untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR dan mencegah anggota MPR melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota MPR sebagaimana diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). □



#### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

#### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasisa,

Heri Herawan, Mafrizal

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Budi Muliawan

#### **KOORDINATOR REPORTASE**

Ario Setiawan

#### **REDAKTUR FOTO**

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

#### **REPORTER**

Ana Suzana, Bayu Nugroho,

Yenita Revi, Ikhwani Bimo F,

Amelia Rubinta

#### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

#### **PENANGGUNG JAWAB/**

#### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayat

#### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Armansyah,

Dhita Fitasari Junaid

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

#### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

## Selesaikan Krisis Kesehatan, Mencegah Krisis Ekonomi

**K**RISIS kesehatan dan krisis ekonomi dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi. Karena itu, menyelesaikan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 sekarang ini menjadi prasyarat, bahkan harga mati, agar perekonomian nasional maupun global lolos dari krisis ekonomi.

Apalagi, ketika pandemi Covid-19 belum berakhir, perekonomian dunia sudah masuk zona resesi. Dan, semua negara masih harus all out mengerahkan semua daya dan upaya untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap semua aspek kehidupan manusia. Ragam subsidi dan stimulus ekonomi direalisasikan. Mulai dari anggaran untuk merawat mereka yang terinfeksi Covid-19, membiayai ragam program perlindungan sosial hingga tunjangan gaji, subsidi untuk menjaga ketahanan sektor bisnis agar tidak bangkrut hingga alokasi puluhan triliun untuk belanja bahan baku dan program pengadaan vaksin corona.

Kocek banyak negara benar-benar terkuras. Untuk membiayai semua program subsidi itu, sebagian negara harus menguras tabungan, sebagian lainnya mencari utang atau hibah. Banyak negara mengalami tekanan pada neraca pembayaran, maupun cadangan devisa yang terkuras. Tak kurang 100 dari 189 negara anggota IMF telah berkomunikasi dengan lembaga keuangan multilateral ini untuk mendapatkan dana darurat. Dan, IMF pun mengalokasikan bantuan pinjaman sebesar 1 triliun dolar AS untuk membantu negara anggota menangani pandemi Covid-19.

Wabah corona pun menjadi pukulan telak bagi perekonomian dunia. Permintaan barang dan jasa anjlok. Konsekuensinya, sektor bisnis atau perusahaan melakukan efisiensi dengan menurunkan volume produksi hingga mengurangi jumlah karyawan. Karena permintaan pasar dunia melemah, penerimaan banyak negara dari ekspor pun anjlok. Penerimaan dari pajak pun pasti tidak signifikan karena sektor bisnis hanya mampu bertahan dari potensi kebangkrutan. Untuk alasan itu pula banyak negara justru memberi keringanan pajak bagi dunia usaha. Mengharapkan investasi baru

pun tidak realistis karena investor atau pemilik modal masih menunggu kepastian baru pasca pandemi.

Pertanyaan mendasarnya adalah mau berapa lama lagi situasi seperti sekarang ini akan berlangsung? Seberapa kuat keuangan negara terus menyubsidi atau memberi perlindungan sosial? Pada akhirnya, kemampuan setiap negara ada batasnya. Dan, karena keterbatasan itulah banyak negara berutang. Ketika negara mulai mengurangi atau menurunkan volume subsidi saat perekonomian masih berkontraksi, ancamannya jelas pada memburuknya kualitas kehidupan.

Kualitas hidup yang memburuk adalah benih-benih krisis. Sekarang, perekonomian banyak negara, termasuk negara kaya, sudah di zona resesi. Indonesia pun sudah di zona yang sama. Jika stimulus ekonomi yang sudah direalisasikan itu gagal membawa sebuah negara keluar dari zona resesi, yang terjadi kemudian adalah krisis ekonomi.

Ketika perekonomian global dilanda krisis, segala sesuatunya menjadi sangat sulit. Apalagi masih ada krisis kesehatan sebagaimana terjadi sekarang ini. Semua negara akan fokus dan berorientasi mengamankan berbagai aspek kepentingan nasional, utamanya bahan pangan. Kalau sudah begitu, negara kaya dengan cadangan devisa melimpah pun tidak akan bebas dari kesulitan.

Indonesia pun akan mengalami kesulitan itu karena sejumlah kebutuhan komoditi pangan masih diimpor, seperti biji gandum, gula, kedelai, beras, jagung hingga tepung terigu dan bawang putih. Dengan cadangan devisa per September 2020 sebesar 135,2 miliar dolar AS sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia (BI), nilai tambah dari jumlah itu mungkin menjadi minim ketika perekonomian global dilanda krisis. Volume cadangan devisa itu setara pembiayaan 9,5 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, impor bahan pangan menjadi tidak mudah dalam periode krisis global.

Karena itu, krisis kesehatan skala global maupun nasional saat



**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
Ketua MPR RI



ini harus segera dan cepat diselesaikan. Hanya itu opsinya agar perekonomian tidak terjerumus ke dalam lingkaran krisis. Untuk menghindari malapetaka, krisis kesehatan yang melanda dunia sekarang ini jangan sampai dibebani lagi dengan krisis ekonomi. Sangat mengerikan jika peradaban sekarang harus menghadapi dua krisis sekaligus di periode waktu yang sama.

Untuk alasan strategis itulah kerja dan kesadaran memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci. Semua elemen masyarakat Indonesia harus aktif berperan dalam upaya memerangi Covid-19. Peran masyarakat jelas sangat menentukan karena besar-kecilnya jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri benar-benar ditentukan oleh perilaku masyarakat, utamanya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi.

Semua orang hanya perlu realistis dan mengakui bahwa ancaman virus corona SARS-CoV-2 itu nyata. Ancaman itu bisa dihindari jika semua orang mau mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Wacana tentang Covid-19 sebagai rekayasa atau konspirasi sama sekali tidak produktif dan juga tidak menyelesaikan masalah. Virus corona mewabah dan merenggut banyak nyawa manusia di negara-negara kaya hingga negara paling miskin sekalipun. Amerika Serikat (AS) yang adi daya itu bahkan mencatatkan jumlah kasus terbanyak dan korban jiwa terbanyak. Memasuki Oktober 2020, wajah Eropa pun kembali suram karena banyaknya bermunculan klaster baru Covid-19 di berbagai negara di Benua Biru itu.

Daripada berwacana tentang rekayasa atau

konspirasi, lebih produktif dan solutif jika semua orang yang peduli memaknai data tentang jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri maupun jumlah kasus di seluruh dunia. Lebih dari satu juta orang telah meninggal dunia karena penyakit Covid-19. Dengan memaknai data kasus Covid-19, semua orang akan terdorong untuk mencari solusi. Saling menyalahkan atau menuduh pemerintah lamban mengantisipasi penularan Covid-19 juga tidak solutif. Tak satu orang pun atau satu negara pun yang tahu cara paling efektif menghentikan penularan virus ini. Pun tak ada teknologi canggih kekinian yang bisa diandalkan untuk mengeliminasi virus ini. Virus corona memiliki akses jelajah penularan karena ketidaktahuan semua orang sejak awal pandemi.

Karena ketidaktahuan itu, dan juga karena alasan begitu sulitnya mengatur perilaku miliaran orang untuk menaati protokol kesehatan, semua orang akhirnya hanya berharap pada hadirnya vaksin corona. Di penghujung 2020 ini, rangkaian proses uji klinik vaksin corona diperkirakan tuntas, sehingga vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity) dijadwalkan realisasinya pada kuartal pertama 2021.

Vaksinasi corona pun belum menyelesaikan keseluruhan masalah. Setelah vaksinasi itu, banyak negara, termasuk Indonesia, pun harus menata lagi perekonomian yang pondasinya nyaris rusak berat karena pandemi Covid-19. Vaksinasi yang sukses mewujudkan herd immunity akan membuka ruang bagi proses pemulihan semua mesin perekonomian. Sebab, sukses vaksinasi akan menghilangkan rasa takut sehingga semua orang lebih percaya diri untuk memulai lagi kegiatan-kegiatan produktif. □

## Mahkamah Kehormatan Majelis

# Komitmen MPR Laksanakan Tap MPR Tentang Etika Kehidupan Berbangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis maka MPR telah menghadirkan komitmen yang lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuat MPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat dan marwah pimpinan serta anggota dan lembaga MPR itu sendiri.

**T**AK seperti biasanya Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III. Lantai 9, Kompleks MPR/ DPR Senayan, Jakarta. Dengan mempertimbangkan kondisi yang masih dalam masa pandemi Covid-19, Ragab yang berlangsung Selasa (6 Oktober 2020) ini tidak dilaksanakan sebagaimana biasanya di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV—sebuah ruangan cukup luas, dapat menampung seluruh peserta Ragab yang terdiri dari pimpinan fraksi (ketua, wakil ketua, sekretaris) dari sembilan fraksi parpol dan kelompok DPD. Namun, karena berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR maka peserta rapat dibatasi, mengikuti ketentuan social distancing.

Ragab yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo itu menghasilkan suatu kesepakatan penting, yaitu rencana MPR RI untuk membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagai lembaga penegak etik terhadap anggota MPR RI. Mahkamah Kehormatan Majelis ini bertujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI. Pembentukan mahkamah itu juga untuk melakukan pemantauan guna mencegah anggota MPR RI melakukan pelanggaran

kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias UU MD3.

Mahkamah Kehormatan Majelis ini sama dan sebangun dengan lembaga yang sama di DPR RI (namanya Mahkamah Kehormatan Dewan) dan DPD RI. Apakah keberadaan Mahkamah Kehormatan Majelis ini menjadi rancu dengan mahkamah kehormatan di DPR dan DPD?

Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, memastikan tidak akan rancu apabila MPR juga memiliki mahkamah kehormatan. Sebab, selain bertugas mengadili dugaan atas pelanggaran etik, Mahkamah Kehormatan Majelis juga melakukan pembelaan atas berbagai tuduhan, tudingan atau fitnah pelanggaran etik terhadap anggota MPR.

“Karena masing-masing lembaga memiliki pedoman dan tata kerja yang berbeda sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik lembaga. Melalui penegakan kode etik dari ketiga lembaga tersebut justru akan memperkuat harkat dan martabat anggota perwakilan dalam lembaga MPR, DPR, dan DPD sebagai



pengemban amanat rakyat,” kata Bamsuet usai memimpin Ragab tersebut.

Bamsuet menambahkan, sebelum membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis, MPR terlebih dahulu akan memperbarui kode etik MPR mengingat adanya perkembangan tugas dan alat kelengkapan MPR saat ini. Ragab telah menyepakati tahapan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis dan diharapkan mahkamah ini bisa segera terbentuk dalam waktu dekat.

Kesepakatan Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD untuk membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Pemantik-nya adalah pertemuan antara Ketua MPR dengan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie di Ruang Kerja Ketua MPR RI, pada Selasa, 11 Agustus 2020. Pertemuan itu membicarakan soal

Mahkamah Etik—yang fungsinya hampir sama seperti Mahkamah Agung (MA). Jika seseorang divonis bersalah secara etika oleh masing-masing penegak kode etik bisa mencari keadilan dengan mengajukan banding di Mahkamah Etik. Dengan demikian, setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak (lembaga) kode etik yang ada di berbagai lembaga profesi maupun organisasi profesi tidak lagi dihadapkan dengan peradilan umum.

Pembentukan Mahkamah Etik ini mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Karena ketiadaan Mahkamah Etik, orang yang diputus melakukan kesalahan etika oleh masing-masing penegak kode etik, mengajukan banding atau mencari keadilan ke peradilan umum, entah melalui Mahkamah Agung maupun PTUN. Padahal antara etika dan hukum adalah dua hal

berbeda. Orang yang bersalah secara etika belum tentu bersalah di mata hukum. Namun yang bersalah di mata hukum sudah pasti bersalah di mata etika,” ucap Bamsuet (lihat bagian kedua “Mahkamah Etik”).

Menurut Bamsuet, MPR yang melahirkan Tap MPR No. VI Tahun 2001 perlu memelopori kultur etika yang baik di masyarakat melalui penegakan kode etik dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. “Sebagai penggagas Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana diatur dalam Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001, MPR perlu memelopori kultur etika yang baik di masyarakat melalui penegakan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Majelis,” tuturnya.

Gayung pun bersambut. Rupanya pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis sudah lama menjadi obsesi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pertemuan antara Ketua MPR, Ketua KY, Ketua DKPP, dan anggota DPD Jimly Asshiddiqie yang menggagas



Hidayat Nur Wahid

sebuah Mahkamah Etik juga membuat Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kembali melontarkan obsesinya tentang perlunya Mahkamah Kehormatan Majelis.

“Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini menjadi obsesi saya sejak menjabat Ketua MPR dulu (periode 2004 – 2009). Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini karena MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi saat itu mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang masih berlaku sampai sekarang,” katanya kepada *Majelis*.

Karena itu, setelah pertemuan Ketua MPR dengan Ketua KY, Ketua DKPP, dan Jimly Asshiddiqie, Hidayat Nur Wahid kembali mengusulkan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis kepada Pimpinan MPR RI. Pertemuan Ketua MPR dengan Ketua KY, dan Ketua DKPP itu menyepakati sebuah konferensi nasional tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk mendorong munculnya Mahkamah Etik Nasional.

“Waktu itu saya sampaikan sebelum MPR sebagai host menyelenggarakan konferensi nasional, sebaiknya MPR membuat terlebih dahulu Mahkamah Kehormatan Majelis. Sebab akan menjadi aneh jika MPR menyelenggarakan konferensi tersebut, tapi MPR sendiri belum memiliki badan kehormatan anggota MPR,” tutur Hidayat.

“Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini adalah usulan saya. Usulan itu

saya lontarkan di Rapim MPR dan mendapat sambutan baik dan berlanjut dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD. Rapat Gabungan kemudian menyepakati membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis ini,” sambungnya.

Hidayat mengatakan, pada 2001, saat MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara, MPR membuat Tap tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai komitmen terhadap penegakan etika. Tap MPR ini menjadi rujukan lembaga negara lain untuk membentuk badan kehormatan, seperti DPR, DPD, KY, dan DKPP. Namun, sayangnya, MPR yang mengeluarkan Tap MPR No. VI Tahun 2001 justru malah belum memiliki forum khusus yang mengurus persoalan etika.

“Oleh karena itu, sudah seharusnya MPR segera membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagaimana di DPR yang mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan dan DPD memiliki Badan Kehormatan Dewan (DBD). Memang, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Tetapi, ada berbagai kegiatan yang khas di MPR diikuti oleh anggota MPR dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD,” jelasnya.

Hidayat memberi contoh kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, kegiatan di badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR, seperti pengkajian atau perubahan terhadap UUD dan Tata Tertib MPR.

“Sehingga Mahkamah Kehormatan Majelis tidak tumpang tindih dengan apa yang menjadi urusan MKD-DPR dan BKD-nya DPD. Karena apa yang menjadi urusan Mahkamah Kehormatan Majelis hanyalah yang terkait dengan MPR dan kegiatan di MPR saja,” terangnya.

“Dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis maka MPR telah menghadirkan komitmen yang lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuat MPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat dan marwah pimpinan serta anggota dan lembaga MPR itu sendiri,” tandas politisi PKS ini.

Bagaimana tanggapan anggota MPR terhadap rencana pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini? Anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana, menyambut baik usulan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis. Namun, dia menyebutkan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis itu harus dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih dengan badan yang sama di DPR dan DPD, mengingat anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD.

“Saya menyambut baik usulan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis. Namun, kita harus mengkaji betul pembentukan mahkamah ini agar tugas dan wewenangnya tidak tumpang tindih dengan mahkamah kehormatan yang ada



Eva Yuliana

di DPR dan DPD,” katanya kepada *Majelis*.

Eva menyebutkan, salah satu kewenangan Mahkamah Kehormatan Majelis adalah agar bisa menindak anggota MPR yang melakukan pelanggaran etik ketika menyosialisasikan Empat Pilar MPR kepada masyarakat. “Sebagai anggota MPR, salah satu tugas kita adalah menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) kita. Mungkin, salah satu fokus kewenangan Mahkamah Kehormatan Majelis adalah menindak anggota MPR yang melakukan pelanggaran etik ketika menyosialisasikan Empat Pilar

“Wacana pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis justru bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi, karena anggota MPR adalah orang yang sama dengan anggota DPR atau anggota DPD, maka tidak mungkin ada dua lembaga yang mengatur penegakan kode etik karena nantinya akan menimbulkan kerancuan,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Habiburokhman, dalam UU MD3 juga sudah jelas bahwa Mahkamah Kehormatan hanya ada di DPR. Adapun sanksi terhadap anggota DPR sekaligus berimbas pada status keanggotaan yang

saya adalah untuk mewujudkan kesetaraan,” katanya kepada *Majelis*.

Nasir Jamil juga tidak melihat ada tumpang tindih antara Mahkamah Kehormatan Majelis dengan mahkamah yang sama di DPR atau DPD, karena tupoksinya berbeda. “Tidak tumpang tindih karena tupoksinya berbeda. Tingkat kewenangan mahkamah di DPR dan DPD hampir sama. Mahkamah di DPR tidak punya fungsi pengawas sehingga rentan pelanggaran kode etik. MPR tidak seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Nasir Jamil, Mahkamah Kehormatan Majelis ini fokus pada semua anggota MPR saat menjalankan tugas



**Habiburokhman**

MPR kepada masyarakat,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Eva juga berharap, Mahkamah Kehormatan Majelis ini bisa bekerja secara independen. Karena itu, keanggotaan Mahkamah Kehormatan Majelis sebaiknya mewakili semua unsur di MPR, tidak hanya unsur kepartaian tapi juga unsur ke-daerahan, dan harus ada perwakilan perempuan sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Majelis.

Pendapat berbeda disampaikan anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. Bagi Habiburokhman, MPR tidak perlu lagi membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Sebab, pembentukan mahkamah itu justru bertentangan dengan konstitusi dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

bersangkutan sebagai anggota MPR. “Jadi jelas tidak perlu ada Mahkamah Kehormatan Majelis di MPR. Ini bukan hanya menabrak konstitusi dan UU MD3, tapi juga tidak berlandaskan logika hukum yang wajar,” tegasnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, melihat, MPR perlu membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Alasannya, setiap institusi atau lembaga harus memiliki mahkamah kehormatan untuk mengadili atau memeriksa atau memutuskan perkara terkait kode etik. “Maka ada urgensinya MPR membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Yaitu agar ada kesetaraan. Lucu bila MPR tidak mempunyai Mahkamah Kehormatan Majelis. Mahkamah ini dibuat agar integritas bisa ditegakkan dan dijaga. Kehadiran mahkamah ini dalam pandangan



**Nasir Jamil**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sebagai anggota MPR. “Yang paling penting masyarakat mengetahui kode etik anggota MPR. Kode etik ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak tahu, bagaimana bisa melaporkan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota MPR,” tambahnya.

Nasir Jamil berharap, kehadiran Mahkamah Kehormatan Majelis ini tidak hanya sekadar ada dan jangan sampai tidak efektif. “Memang Mahkamah Kehormatan Majelis ini belum tersosialisasi. Baru 2021 mungkin bisa terbentuk. Masyarakat harus diberikan sosialisasi tentang Mahkamah Kehormatan Majelis ini sehingga peluang terjadinya pelanggaran kode etik menjadi kecil saat anggota MPR menjalankan tugas-tugas MPR,” ujarnya. □

**DER/EFP/BSC**

## Mahkamah Etik

# Hukum dan Etika, Dua Hal Berbeda

Pengadilan hukum menilai hukum. Pengadilan Etik menilai etik. Hukum dan Etik adalah dua hal yang berbeda. Segala sesuatu yang melanggar hukum pasti melanggar etik. Tapi, sesuatu yang melanggar etik tidak harus melanggar hukum.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo duduk meriung dengan Ketua Komisi Yudisial Vaja Ahmad Jayus, Ketua DKPP Muhammad, dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie. Obrolan mereka disiarkan dalam *Bamsoet Chanel* yang diunggah perdana pada 24 Agustus 2020. Inti obrolan dalam tajuk “Ngompol” (Ngomong Politik) adalah gagasan tentang membentuk Mahkamah Etik.

Dalam obrolan itu, Jimly Asshiddiqie mengawali dengan pendapat mengenai implementasi Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan MPR ini masih berlaku hingga sekarang. Salah satu implementasi dari Tap MPR ini, menurut Jimly, adalah dengan membangun infrastruktur etik. “Ada sesuatu yang perlu kita masukkan dalam agenda nasional kita, yaitu bagaimana mengimplementasikan Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” ujarnya.

Jimly menjelaskan infrastruktur etik ada dua. *Pertama*, kode etik. *Kedua*, lembaga penegak etik. Maka, lembaga negara dan organisasi profesi mempunyai kode etik dan

lembaga penegak etik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1996 telah merekomendasikan agar seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia, membangun *ethic infra-structure in public offices* yang mencakup kode etik dan lembaga penegak kode etik. Indonesia meresponsnya dengan membentuk berbagai lembaga penegak kode etik,

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak etik dalam jabatan-jabatan publik. Misalnya, di bidang kehakiman sudah ada Komisi Yudisial (KY) di samping ada Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK.

Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adanya Badan Kehormatan Dewan (sekarang menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan) dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik. Di dunia pers dan jurnalistik terdapat Dewan Pers.

Begitu pun di lingkungan organisasi profesi. Misalnya, di dunia kedokteran ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk dan mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang sistem kode etik. Di lingkungan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) diatur Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sejak lama telah berdiri Mahkamah Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya dengan menjamin dan menegakkan semua prinsip etika profesi.

Bahkan sekarang banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal, termasuk mengenai lembaga penegaknya. Di lingkungan pegawai negeri sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnas HAM juga sudah diatur soal Kode Etika Komisioner dan mekanisme

penegakannya.

“Semua ini harus ditata agar didekati dengan hukum. Segala sesuatu yang melanggar hukum, pasti melanggar etik. Segala sesuatu yang melanggar etik harus dihukum. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, belum tentu tidak melanggar etik,” kata Jimly.

Pada praktiknya, penegakan etik masih dipengaruhi pandangan bahwa etika ada ranah private. Karena itu peradilan etik dilakukan secara terbuka. Hal ini juga berlaku di peradilan etik Amerika Serikat. Justru Indonesia memelopori peradilan etik secara terbuka. Adalah Jimly Asshiddiqie saat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada 2009 menggelar sidang terbuka peradilan etik.

Sidang pertama DK-KPU memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang di-

seluruh Indonesia. “Meskipun namanya DKPP, tidak menggunakan istilah pengadilan, tetapi pada hakikat kedudukan, tugas, dan kewenangannya, lembaga ini adalah benar-benar merupakan lembaga peradilan etik, yaitu merupakan lembaga Pengadilan Etik pertama dalam sejarah Indonesia modern. Bahkan, saya sering menyatakan bahwa DKPP bukan hanya lembaga pengadilan etik pertama di Indonesia, tetapi juga di dunia, karena tidak ada negara manapun di dunia yang memiliki lembaga seperti DKPP ini,” papar Jimly.

“Maka saya katakan Indonesia menjadi pelopor membangun sistem peradilan etik. Jangan semua soal diserahkan kepada pengadilan hukum. Kalau pengadilan hukum, ujung-ujungnya adalah pidana. Penjara sekarang sudah penuh. Ini berbeda dengan peradilan etik. Sanksinya adalah pecat. Peradilan etik bisa mengimbangi penegakan

demikian, para pencari keadilan yang divonis bersalah secara etika oleh masing-masing penegak kode etik bisa mengajukan banding di Mahkamah Etik.

Bamsuet menjelaskan bahwa landasan pembentukan Mahkamah Etik bisa mengacu kepada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Karena ketiadaan Mahkamah Etik, orang yang diputus melakukan kesalahan etika oleh masing-masing penegak kode etik mengajukan banding atau mencari keadilan ke peradilan umum, entah melalui Mahkamah Agung maupun PTUN. Padahal, antara etika dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah secara etika belum tentu bersalah di mata hukum. Namun, yang bersalah di mata hukum, sudah pasti bersalah di mata etika,” ungkap Bamsuet.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

rekomendasikan oleh Bawaslu terhadap 5 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sidang ini dilakukan secara terbuka sebagaimana lazimnya praktik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengadilan.

Pada Juni 2012, berdasarkan ketentuan undang-undang yang baru, Dewan Kehormatan KPU mengalami perubahan. Sekarang namanya menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen dengan masa kerja tetap selama lima tahun, dan dengan kedudukan yang bersifat independen dengan kewenangan memutus yang bersifat final dan mengikat.

Sekarang, seluruh mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode etik dan penegakannya tersentralisasi di DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, baik terhadap KPU dan jajarannya maupun terhadap Bawaslu dan jajarannya di

hukum,” imbuhnya.

Sebagai kelanjutan dari peradilan etik, diperlukan sebuah Mahkamah Etik. Fungsi Mahkamah Etik hampir sama seperti Mahkamah Agung (MA). Bila seorang yang diadili dalam peradilan etik tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Etik. “Jadi substansi etik jangan diputus hakim hukum tetapi oleh hakim etika. Jadi nanti ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan ditambah satu lagi Mahkamah Etik,” tutur Jimly.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung terbentuknya Mahkamah Etik yang akan menjadi ujung dari proses penegakan etik sehingga setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara maupun organisasi profesi tak lagi dihadapkan dengan peradilan umum. Dengan

Untuk merealisasikan pembentukan Mahkamah Etik, MPR RI bersama Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan Konvensi Nasional II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bamsuet menambahkan, melalui konvensi tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan dan kesepahaman tentang pentingnya keberadaan Mahkamah Etik. Dengan demikian, mengurangi beban kerja penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum.

“Sehingga Indonesia bisa mencatat sejarah baru di dunia sebagai negara yang memelopori penegakan etika secara transparan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsuet. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Hidayat Nur Wahid** Wakil Ketua MPR RI

## MKM Simbol Komitmen MPR Menguatkan Etika Kehidupan Berbangsa

**R**APAT Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada Selasa, 6 Oktober 2020, menyepakati pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM). MKM ini bertujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR RI. Pembentukan MKM juga untuk melakukan pemantauan guna mencegah anggota MPR RI melanggar kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Saat ini tahapan pembentukan MKM sudah disetujui dan disepakati, tinggal pematangan sehingga diharapkan MKM bisa segera terbentuk dalam waktu dekat. Untuk mengetahui lebih jauh seputar pembentukan MKM ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Berikut petikan wawancara Majelis dengan politisi PKS yang mengusulkan pembentukan MKM ini.

**MPR berencana akan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis (MKM). Bisa dijelaskan lebih jauh tentang rencana pembentukan MKM ini?**

Pertama, pembentukan MKM ini adalah usulan saya. Dan, saya bersyukur usulan itu diterima dan kemudian dibahas di Rapat Pimpinan MPR dan kemudian menjadi bahasan serta wacana publik.

Usulan saya itu berangkat dari dua realitas besar. Pertama adalah pembentukan MKM ini menjadi obsesi besar saya sejak menjabat Ketua MPR dulu (2004–2009). Pembentukan MKM karena MPR sebuah lembaga tertinggi negara (waktu itu) yang mengeluarkan TAP MPR yang masih berlaku sampai sekarang, yakni TAP MPR No. VI Tahun 2001.

Sementara itu, lembaga negara lain sudah membentuk badan kehormatan, seperti di DPR ada Majelis Kehormatan Dewan (MKD), di DPD ada Dewan Kehormatan Dewan, di KPU ada DKPP. Saya ingin MPR memiliki sebuah majelis kehormatan yang permanen atau tidak (*ad hoc*) yang mengelola TAP MPR No. VI Tahun 2001 itu.

Kedua, pembentukan MKM ini kembali terpicu ketika Ketua MPR menyelenggarakan pertemuan dengan para pimpinan Lembaga Tinggi Negara menyepakati akan menggelar sebuah konferensi nasional tentang Etika Kehidupan Berbangsa untuk mendorong munculnya Mahkamah Etika Nasional. Dan,

waktu itu saya sampaikan sebelum MPR sebagai host menyelenggarakan konferensi nasional, sebaiknya MPR membuat terlebih dahulu Mahkamah Kehormatan Majelis. Sebab akan menjadi aneh jika MPR menyelenggarakan konferensi tersebut, tapi MPR sendiri belum memiliki badan kehormatan.

Usulan tersebut saya lontarkan di Rapim MPR dan mendapat sambutan baik dan berlanjut dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota. Rapat Gabungan kemudian menyepakati pembentukan Majelis Kehormatan Majelis ini.

Namun yang masih diperdebatkan atau masih belum final adalah apakah MKM ini bersifat *ad hoc* atau permanen

**Menurut Bapak apakah pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis ini ada urgensinya?**

Jelas ada urgensinya. Yakni, lembaga tinggi seperti MPR dengan tugas-tugas terkait anggaran dan pelayanan publik mesti dilindungi dengan pembentukan MKM. Sebab, lembaga tinggi lainnya sudah memiliki mahkamah etik. Jika, dalam pelaksanaan tugas MPR lalu terjadi pelanggaran etika yang dilihat publik, lalu kemana publik mengadu-



kannya? Karena anggota MPR adalah anggota DPR apakah ke BKD DPR? Tentu saja bukan ranahnya. Maka urgensi pembentukan MKM MPR sangat kuat.

**Apakah keberadaan Mahkamah Kehormatan Majelis ini bisa tumpang tindih dengan mahkamah etik serupa di DPR dan DPD, mengingat anggota MPR adalah juga anggota DPR dan DPD?**

Tidak akan terjadi tumpang tindih, sebab bidang kewenangan antara MPR, DPR, dan DPD juga berbeda, sehingga fokus kategori permasalahan dan penyelesaian masalah sangat berbeda. Misalnya, seorang anggota MPR yang juga anggota DPR dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR diduga publik melakukan pelanggaran etika, maka penyelesaiannya ada di MKM MPR karena terkait dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Kalau dia menyalahi dalam konteks pembuatan UU maka itu adalah ranah BK DPR.

Atau, misalnya, anggota MPR melakukan pelanggaran asusila saat melaksanakan kegiatan MPR maka MKM lah yang berperan. Dilihat dahulu dalam porsi kegiatan apa dia melakukan kesalahan.

**Apa yang menjadi fokus dari Mahkamah Kehormatan Majelis? Apakah Mahkamah Kehormatan Majelis ini hanya ditujukan pada Pimpinan MPR atau Pimpinan Fraksi dan Badan di MPR? Atau anggota MPR ketika menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota MPR?**

Ruang lingkup MKM ini nantinya tentu ke MPR. Intinya, semua yang terkait di MPR tercakup dalam bidang kerja atau bidang perhatian dari MKM ini, seperti pimpinan, anggota, badan-badan kelengkapan di MPR.

Tapi, saya tekankan bahwa pembentukan MKM ini tidak dimaksudkan untuk mencurigai atau mencari-cari kesalahan. Tujuan MKM adalah: *Pertama*, MKM ini adalah simbol komitmen serius dari MPR untuk menghadirkan realisasi dari TAP MPR yang dibuat sendiri, yakni tentang etika kehidupan berbangsa. MPR memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kita melaksanakan apa yang menjadi ketetapan kita sendiri.

*Kedua*, MKM ini akan memberikan kepercayaan diri yang lebih kuat lagi kepada MPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. *Ketiga*, dalam rangka membela dan memberikan klarifikasi terhadap pimpinan, anggota,



dan badan-badan kelengkapan MPR bila terjadi salah paham, fitnah, pencitraan negatif yang dilontarkan.

Misal, ada masalah aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar. Ini akan diselesaikan oleh MKM, apakah hanya salah paham atau memang terjadi pelanggaran etika.

Terkait sanksi, apakah hanya teguran, sampai hukuman keras, juga parameter tingkat kesalahan, kategori kesalahan dan hukuman, serta kode etik ini masih dibicarakan lebih jauh di Rapim MPR.

**Bagaimana dengan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Majelis?**

Hal ini juga masih akan dibicarakan lebih jauh di Rapim MPR. Setelah disepakati dalam Rapim dan Ragab maka selanjutnya akan dibahas kembali di Rapim MPR, termasuk soal pimpinan dan keanggotaan MKM.

Yang paling mengerucut sementara ini adalah sifat MKM ini apakah *ad hoc* atau permanen. Sebagian besar yang hadir dalam



Ragab yang lalu mengusulkan untuk *ad hoc*. Tapi, pendapat saya pribadi adalah MKM harus permanen. Argumentasi MKM *ad hoc* karena akan tumpang tindih dengan BKD DPR, sebab anggota MPR adalah anggota DPR juga. Menurut saya, tidak akan tumpang tindih, sebab urusan MKM bukanlah urusan BKD DPR. Urusan MKM MPR adalah pimpinan dan anggota MPR yang melakukan tugas-tugas MPR. Misalnya, ada pimpinan atau anggota MPR yang tidak datang saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, padahal peserta sudah jauh-jauh datang. Nah, ini bukan urusan BKD DPR. Ini menjadi urusan MKMMPR.

Ada juga yang beralasan kenapa harus *ad hoc*, karena kasus di MPR tidak banyak. Saya menjawab bahwa kita tidak bisa bilang kasus banyak atau sedikit. Tujuan besarnya adalah untuk memunculkan simbol kuatnya MPR memegang komitmen menguatkan etika. Banyak atau sedikit kasus tidak masalah.

Bayangkan, kalau banyak lembaga tinggi negara memiliki badan kehormatan yang permanen sedangkan MPR yang membuat TAP tentang Etika Berbangsa tidak mempunyai badan kehormatan yang permanen. Tentu ini akan menjadi sangat lucu dan ironi.

Jadi, saya tetap mengusulkan dan tetap berpendirian bahwa MKM ini sifatnya harus permanen. Sebab, kegiatan di MPR juga tidak *ad hoc*. Tapi, biar bagaimanapun saya akan menghormati pendapat yang lain juga apa keputusan yang ditetapkan nantinya.

Saya juga berharap MKM ini sah terbentuk dan diputuskan sebelum 2021. Tujuan dan komparasinya sudah sangat jelas. Lembaga tinggi negara lainnya punya badan kehormatan, sedangkan kita di MPR malah tidak berupaya mempunyai badan seperti itu. Lalu, bagaimana anggapan rakyat nantinya.

**Apa harapan Bapak dengan Mahkamah Kehormatan Majelis ini?**

Seperti sudah saya sebutkan, saya berharap MKM ini akan menjadi simbol komitmen serius dari MPR untuk menghadirkan realisasi dari TAP MPR yang dibuat sendiri, yakni tentang etika kehidupan berbangsa. MPR memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa kita melaksanakan apa yang menjadi ketetapan kita sendiri.

MKM ini akan memberikan dorongan kepercayaan diri yang lebih kuat lagi kepada MPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. □

Temu Tokoh Lamongan

# Empat Pilar MPR Soal Praktik Sehari-hari

Bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan santri, Empat Pilar MPR sudah final dan tidak dipersoalkan lagi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid bersilaturahmi dengan alim ulama di Pondok Pesantren Raudhatut Tullab, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (26/9/2020). Dalam silaturahmi sekaligus Temu Tokoh Kebangsaan itu, Jazilul Fawaid juga menyampaikan tentang Empat Pilar MPR. Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, pemahaman Empat Pilar MPR di pondok pesantren sudah mengakar. Namun, para santri harus tetap diingatkan bahwa Empat Pilar MPR bukan soal pemahaman, melainkan soal praktik sehari-hari. Para santri harus mempraktikkan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

“Bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan santri, Empat Pilar MPR sudah final dan tidak dipersoalkan lagi. Kiai dan santri NU punya andil dalam perjuangan Indonesia merdeka,” kata Gus Jazil. Lalu Gus Jazil menjelaskan mengapa Empat Pilar MPR bagi NU sudah final. “K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri NU, adalah peletak dasar nasionalisme Indonesia. Sudah ada karya K.H. Hasyim Asy’ari yang menunjukkan hal itu. NU sebagai organisasi yang didirikan beliau tentu memiliki

cara pandang terhadap kebangsaan dan agama itu yang tidak dipertentangkan. Bahkan agama dan negara saling menguatkan. Itulah cara pandang NU,” terangnya.

“Kenapa disebut final? Karena memang nilai-nilai Empat Pilar yang ada sama sekali tidak bertentangan dengan pandangan ahlussunnah wal jamaah. Atau pandangan pesantren dan nahdlatul ulama tidak ada satu pun yang bertentangan. Makanya disebut final,” tambahnya.

Meski demikian, Gus Jazil berpendapat, Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) harus tetap diinternalisasikan di kalangan santri pondok pesantren. “Jangan sampai Empat Pilar yang sudah dianggap final itu tidak disosialisasikan di pesantren. Nanti pesantren merasa diabaikan. Jadi proporsional saja,” ujarnya.

Pada dasarnya, lanjut Gus Jazil, pemahaman Empat Pilar MPR sudah mengakar di pondok pesantren. Namun, para santri perlu diingatkan kembali soal Empat Pilar MPR. “Karena Empat Pilar MPR bukan hanya soal pemahaman, tapi soal praktik nilai-nilai Empat Pilar sehari-hari.



Jadi, para santri juga mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar di pesantren,” tuturnya.

Gus Jazil melanjutkan, NU merupakan organisasi yang menyemaikan semangat nasionalisme dan patriotisme. Namun, peran kebangsaan NU belum terlalu besar. Ini bisa dilihat dari belum banyak kader NU yang menjadi pemimpin, sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota. “Contohnya di Lamongan, sejak reformasi belum pernah dipimpin kader NU. “Artinya, kader dari NU tidak diragukan nasionalisme dan patriotismenya, tetapi perlu untuk diberikan kesempatan untuk menjalankan visinya dalam praktik kepemimpinan menjadi bupati, gubernur, atau di jabatan-jabatan lain,” ucapnya. □

BSC

Ancaman Terhadap Tokoh Agama

# Indonesia Perlu UU Perlindungan Tokoh Agama

Di tengah arus sekulerisme, liberalisme, atheisme, dan hedonisme serta ideologi amoral lainnya, posisi para tokoh agama menjadi semakin rentan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan UU Perlindungan Tokoh Agama yang dapat menjamin keselamatannya dari mara bahaya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ENGANIAYAAN terhadap Syekh Ali Jaber di daerah Lampung beberapa waktu lalu mendapat simpati dari Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Berkaca dari peristiwa tersebut, HNW berpendapat, Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama. Bukan hanya tokoh Islam, tapi semua tokoh agama yang diakui di Indonesia.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA) yang sudah diputuskan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2020.

“Indonesia sebagai negara hukum belum mempunyai aturan hukum yang khusus untuk melindungi tokoh dari beragam agama yang diakui sah di Indonesia,” ujar Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Senin (14/9).

Usaha pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber merupakan bukti bahwa intimidasi terhadap ulama dan tokoh agama lainnya nyata adanya. Sehingga Indonesia sebagai Negara Pancasila yang mengakui kebebasan melaksanakan ajaran Agama sebagai bagian

dari Hak Asasi Manusia memerlukan instrumen hukum yang spesifik dan bisa melindungi peran para tokoh agama saat menyampaikan ajaran agamanya masing-masing.

“Kasus yang menimpa Syekh Ali Jaber ini bukan yang pertama, kasus serupa sudah berulang kali terjadi. Amerika Serikat, negara sekuler berpenduduk mayoritas beragama Kristiani mempunyai aturan hukum, seperti Pastor Protection Act, maka sewajarnya bila Indonesia sebagai negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa juga mempunyai aturan hukum yang menjadi lex spesialis untuk melindungi tokoh agama,” ujarnya.

Hidayat selanjutnya menjelaskan, aturan hukum tersebut perlu memuat perlindungan fisik bagi tokoh dari semua agama yang diakui di Indonesia, saat mereka sedang menyampaikan ajaran agamanya. Juga sanksi bagi yang melakukan persekusi terhadap tokoh agama. Perlindungan fisik dapat berupa perlindungan dari intimidasi, ancaman kekerasan, hingga kekerasan fisik seperti yang baru saja menimpa Syekh Ali

Jaber. Hal itu perlu diatur secara tegas di dalam peraturan lex spesialis di level undang-undang. Sanksi bisa berupa kurungan penjara maupun denda.

Di tengah arus sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, atheisme, terorisme, dan hedonisme atau permissivisme serta ideologi amoral lainnya, para tokoh agama berada pada posisi yang rentan ketika menyampaikan ajaran agamanya. Terutama menyangkut masalah moralitas, serta masalah yang haq dan yang bathil, yang boleh dan tidak boleh menurut ajaran agama.

“Itulah konteks perlunya perlindungan diberikan. Apalagi, sebagian tokoh agama gencar menyuarakan bela moral dan negara dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, LGBT, phedopilia, dan ideologi terlarang lainnya. Para pengusung ideologi dan laku terlarang yang tak sesuai dengan Pancasila itu tentu tidak akan tinggal diam ketika ada tokoh agama yang menyadarkan umat bahwa ideologi dan perilaku mereka itu bertentangan dengan ajaran agama, dan dasar Negara Pancasila,” ujar Hidayat. □

MBO

Ponpes Al-Riyadl

# Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Santri adalah elemen bangsa yang kiprah serta perannya tidak diragukan lagi dalam perjuangan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Pancasila juga ada di hati para santri.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM., MBA., menyatakan rasa bangganya kepada warga pondok pesantren, terutama para santri, yang sangat memahami bahkan menjiwai Pancasila. Kebanggaan itu muncul karena di pondok pesantren, selain digembleng ilmu agama, para santri juga mempelajari dan kemudian mendalami Pancasila.

“Saya sering menyaksikan hal tersebut di berbagai pondok pesantren yang saya sambangi. Hampir sebagian besar para santri sangat lekat dengan Pancasila, termasuk di ponpes Al-Riyadl Cipanas ini,” katanya, dalam acara: ‘Temu Tokoh Nasional/ Kebangsaan Bersama Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan’, di Aula Ponpes Al-Riyadl, Cipanas, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2020).

Hadir dalam acara yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan ketat tersebut, jajaran Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Riyadl, antara lain Ketua Dewan Pembina H. Hamdan Malik, Pimpinan Ponpes Putera KH. Pipin S. Arifin, Pimpinan Ponpes Puteri

Hj. Imas Siti Saodah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sekitar serta ratusan santri.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang akrab disapa Syarif Hasan ini menyatakan, lekatnya pemahaman rakyat, terutama generasi muda Indonesia, kepada Pancasila adalah sesuatu yang wajib. “Kewajiban buat kita semua untuk menjaga Pancasila. Sebab, peran Pancasila selama ini sudah sangat terbukti kesaktiannya, mampu sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam wadah negara Indonesia,” ujarnya.

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para santri tentang Pancasila, Syarif Hasan kemudian membuat kuis dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar Pancasila. Ternyata, pertanyaan mampu dijawab dengan baik oleh santri. Bahkan, lebih jauh lagi para santri mampu menjelaskan bahwa Pancasila adalah salah satu dari Empat Pilar MPR RI, selain UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Luar biasa anak-anak ponpes kita.

Makanya saya heran masih ada saja sebagian pendapat yang mendiskreditkan ponpes, yang katanya jauh dari Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya. Buktinya, para santri sangat dekat dengan ideologi bangsa. Malah, dengan kemampuan mereka tersebut para santri bisa menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR,” ujar Syarif Hasan.

Sebenarnya, kata Syarif Hasan menambahkan, tidak sulit buat bangsa Indonesia menjiwai Pancasila. Bahkan, bangsa Indonesia sudah lebih jauh lagi, secara tidak menyadari telah melakukan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, para santri di ponpes yang datang dari beragam latar belakang dan status



sosial. Ternyata, tidak ada persoalan sama sekali. Sikap saling menghormati perbedaan malah kental terlihat di sini.

Kenapa hal itu bisa terjadi? “Karena Pancasila digali dari karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Kini, kita hanya tinggal menjaga dan merawatnya saja. Jangan sampai Pancasila terlupakan atau malah hilang,” ucapnya. □

DER

Nasib Aspal Buton

# Gus Jazil Diminta Ikut Membantu

Banyaknya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum berdampak pada ekonomi masyarakat Pulau Buton. Karena aspal yang dipakai membuat jalan dan jembatan diimpor dari luar.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., menyatakan keprihatinannya terkait krisis yang dihadapi produksi aspal di Pulau Buton. Pasalnya, hingga kini, keberadaan aspal di Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara itu belum mampu mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Padahal potensi kandungan aspal di Pulau Buton sangat besar, mencapai 600 juta ton.

Lebih mengkhawatirkan lagi, meski pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara

besar-besaran, ternyata program tersebut tidak banyak menyerap bahan-bahan lokal, termasuk aspal dari Buton. Semestinya, semakin banyak pembangunan infrastruktur dilakukan, semakin besar pula bahan-bahan lokal yang bisa dimanfaatkan.

Kenapa aspal Buton tidak digunakan? "Alasannya, karena aspal Buton tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. Ini jelas mengada-ada dan tidak berpihak pada hasil dalam negeri. Karena, saat ini, sudah ada teknologi yang bisa membuat aspal Buton dapat memenuhi persyaratan

yang diinginkan," kata Gus Jazil, begitu Jazilul Fawaid biasa disapa.

Pernyataan itu disampaikan Gus Jazil saat bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Ahad (13/9/2020). Acara yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Buton itu dihadiri oleh Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si.; dan Wakil Bupati Buton, Iis Elianti; serta undangan lainnya.

Sulitnya aspal asal Buton menembus pasar, kata Jazil, patut diduga merupakan permainan mafia. Mereka sengaja memilih menggunakan aspal impor daripada aspal Buton karena tergiur keuntungan yang lebih besar. Cara-cara seperti itu, menurut Jazil, lumrah dilakukan oleh para mafia. "Mereka sengaja mencari-cari alasan untuk mengganjal para pesaing, sekaligus membuka celah impor untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar," ujar Gus Jazil.

Menurut Gus Jazil, kalau aspal Buton digunakan untuk membangun jalan niscaya masyarakat ikut menikmati dampaknya, yaitu terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. "Apalagi, cadangan aspal Buton masih sangat besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional sebesar 1,5 juta ton pertahun," ungkap Gus Jazil.

Sebelumnya, Bupati Buton La Bakry dalam sambutannya, meminta bantuan kepada Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid terkait sulitnya aspal Buton menembus pasar. Kondisi tersebut, menurut La Bakry, telah menghambat Pemerintah Buton dalam melaksanakan pembangunan. Padahal, bila pemanfaatan kandungan bumi di Pulau Buton itu bisa dioptimalkan maka akan sangat membantu menyejahterakan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gus Jazil didampingi Bupati Buton beserta jajaran melihat dari dekat kondisi lahan aspal di Kabungka. Kondisinya, nyaris mangkrak karena tidak beroperasi maksimal. Aspal yang siap diolah terlihat menumpuk. Sebagian sudah dimasukkan ke karung, dan sebagian lagi teronggok begitu saja. □

MBO



## UMKM Baubau

# Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Di tengah perekonomian yang kian memburuk sebagai imbas pandemi Covid-19, UMKM Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, masih bertahan.



**K**OMUNITAS kreatif dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tergabung dalam Baubau Creative Forum (BBCF) mampu membuat kagum Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid. Di tengah pandemi corona BBCF tetap bertahan, meski banyak pengusaha dan lapangan usaha lain mati suri.

Ungkapan kekaguman itu disampaikan Jazilul Fawaid, biasa disapa Gus Jazil, saat berdialog dengan komunitas kreatif dan pelaku UMKM Kota Baubau. Acara tersebut berlangsung di Creative Space Mangga Dua Batulo, Kota Baubau, Ahad (13/9/2020). Ikut hadir pada acara tersebut Ketua BBCF La Ode Muhammad Ishak beserta 26 pelaku UMKM yang tergabung dalam Baubau Creative Forum.

Menurut Gus Jazil, eksistensi BBCF pada pandemi Corona bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi para pelaku UMKM bahwa di setiap kesempatan pasti ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Meski sesungguhnya usaha kreatif tidak boleh kehilangan kreativitasnya.

“Usaha kreatif itu tidak boleh kehilangan kreativitas. Kalau kreativitasnya mati, berarti bukan usaha kreatif,” kata Gus Jazil.

Gus Jazil percaya, kalau BBCF mampu mengkreasi kekuatan UMKM niscaya perekonomian di Baubau akan cepat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berkembang. Karena itu, keberadaan BBCF harus mendapat dukungan semua pihak, karena yang akan diuntungkan adalah masyarakat.

Untuk mempermudah perkembangan UMKM, Gus Jazil mengajak seluruh pengusaha untuk merampungkan urusan legal formal usaha yang dibuatnya. “Saya akan ikut mengabarkan gerakan UMKM kepada semua pejabat terkait. Mereka harus ikut mengulurkan tangan untuk membantu, karena UMKM itu sangat dekat dengan perekonomian masyarakat,” tutur Gus Jazil.

Salah satu yang paling penting dalam kehadirannya, menurut Gus Jazil, adalah niat

untuk memberikan sangat kepada para pelaku UMKM. “Karena semangat para pelaku UMKM memang tidak boleh kendor sedikitpun.” ujarnya.

Sebelum itu, dalam sambutannya, Ketua BBCF La Ode Muhammad Ishak mengatakan, hadirnya di creative space bertujuan untuk menyatukan langkah UMKM, dan menjadikan muatan-muatan lokal berkembang secara masif. Karena, pada era modern, tantangan yang dihadapi UMKM semakin berat. “Karena itu, untuk menghadapinya juga dibutuhkan usaha secara kolektif,” ungkap La Ode Muhammad. □

MBO

Kabar dari Kerajaan Arab Saudi

# Ibadah Umroh dan Haji Segera Dibuka Kembali

Setelah sekitar delapan bulan menunggu akibat corona, kini calon jemaah umroh dan haji asal Indonesia berharap untuk bisa segera melaksanakan ibadah di Tanah Suci.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJAK virus corona mewabah di wilayah Indonesia menyebabkan rangkaian ibadah umat Islam, khususnya umroh dan haji, ikut terkena dampaknya. Kedua kegiatan ibadah di Tanah Suci Mekah itu dihentikan. Tapi, setelah delapan bulan terhenti, tersiar kabar bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan segera membuka kembali kegiatan ibadah umroh dan haji.

Mendengar kabar tersebut, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., (HNW), berharap agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), untuk memperjuangkan agar pelaksanaan ibadah umroh yang dibuka kembali pada November 2020, dan juga ibadah haji pada 2021 dapat diisi oleh jemaah dari Indonesia.

“Pelaksanaan ibadah haji dan umroh harusnya bisa diikuti oleh jemaah dari Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar jemaah Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umroh dan haji secepatnya,” harap HNW secara teleconference dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta, Senin (12/10).

HNW berharap, pemerintah Indonesia segera mendapatkan solusi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19 ini. “Kami di Komisi VIII DPR juga berulang kali menyampaikan ke Menteri Agama untuk setiap peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia, agar Kemenag memaksimalkan lobi dan mengomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi,” ujarnya.

Apalagi, lanjut HNW, pihaknya mendengar bahwa rencana ibadah umroh akan dibuka kembali oleh Arab Saudi pada November 2020. Karena itu, HNW melihat itu sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Dia mendukung agar Menag dapat menjalankan perannya secara maksimal, agar jemaah umrah dan haji bisa beribadah secepatnya. Dan, masalah daftar tunggu akibat penundaan bisa segera diatasi.

Sebagai informasi, pihak Kemenag telah menginformasikan bahwa pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umroh pada November 2020. Salah satu ketentuannya adalah umroh hanya bisa dilakukan satu kali per jemaah. Meski masih menunggu

keputusan Arab Saudi terkait negara mana yang bisa melakukan umroh pada November 2020.

Kemenag optimistis jemaah asal Indonesia termasuk yang diperbolehkan. Pasalnya, saat ini hanya tiga negara yang warga negaranya tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena penanganan Covid 19 dinilai buruk, yakni: India, Brasil dan Argentina.

## Syekh Junaid al-Betawiy

HNW berharap, pelaksanaan haji dan umroh dapat segera diteruskan untuk jemaah asal Indonesia, karena selama ini para jemaah asal Indonesia dikenal memiliki citra yang positif, terutama pada saat pelaksanaan ibadah haji. “Jemaah kita dilihat oleh jemaah negara lain sebagai jemaah yang tertib, teratur dan taat kepada peraturan. Ini yang perlu dijaga dan menjadi poin lebih yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

HNW menuturkan, citra positif itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kiai besar asal Nusantara yang menjadi ulama di sana. Seperti, Syekh Nawawi al-Bantani dan



Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Juga Syekh Junaid al-Betawiy, Syekh Mahfud Termas, serta Syekh Yasin Padang, yang namanya masih harum di Arab Saudi hingga saat ini.

Ulama-ulama asal Nusantara itu memiliki wawasan kebangsaan yang sangat baik, sehingga patut diteladani dan dilanjutkan oleh para jemaah haji dan umroh asal Indonesia. “Mereka adalah contoh bagaimana orang Indonesia bisa menjadi terhormat, menjadi mufti, imam atau ulama, bahkan di Mekah

dan di Masjid Haram. Keduanya sangat penting dijadikan paradigma haji sebagai diplomasi positifnya Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memperjuangkan secara maksimal agar pelaksanaan haji dan umroh bisa segera dilakukan kembali oleh jemaah asal Indonesia. Ia mengingatkan bahwa nama baik Indonesia yang sudah harum tersebut bisa tercoreng apabila Kementerian Agama tak bisa melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia tetap dimasukkan sebagai salah satu negara

yang warganya dilarang melaksanakan umroh karena penanganan Covid-19 secara domestik yang dinilai buruk.

“Kita sudah punya modal sejarah dan penerimaan publik yang sangat baik untuk jemaah asal Indonesia. Ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah agar jemaah Indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji secepatnya, layaknya negara-negara lainnya,” pungkas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini. □

MBO

## Kunker Syarief Hasan di Cianjur

# Dukung Program KUR Bunga 0% untuk UMKM

UMKM dan usaha kecil lainnya sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Bantuan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran sangat diharapkan agar perekonomian rakyat bangkit.

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM., MBA., memberikan apresiasi terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah dengan suku bunga 0% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan pada September 2020.

“Di masa pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya, program KUR bunga 0% sangat dibutuhkan dan membantu UMKM untuk bertahan, serta bangkit dari keterpurukan. Mereka perlu itu sekarang untuk memutar kembali usahanya, kehidupan dirinya dan juga keluarganya,” ujar politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief Hasan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2020).

Namun demikian, Syarief Hasan memberikan beberapa catatan, yakni keluhan para pelaku UMKM Indonesia di bidang pembiayaan, bukan hanya pada bunga pinjaman. Tapi, yang pertama harus diberikan adalah kemudahan dan kecepatan memperoleh pinjaman di bank. “Percuma juga jika kredit berbunga 0%, namun sangat sulit mendapatkannya karena terganjal birokrasi. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah,” imbuhnya.

Mantan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ini menegaskan, jika tiga kriteria (kemudahan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kecepatan, dan bunga 0%) dijalankan beriringan maka dampaknya akan luar biasa. “Coba amati mengapa ‘bank keliling’ atau rentenir itu tumbuh subur walaupun bunganya mencekik, karena mereka sangat mudah dan cepat dalam memberikan pinjaman, hanya dengan KTP saja langsung cair. Program ini jika bisa melampaui itu maka akan sangat membantu sekaligus menghindarkan rakyat kecil dari jeratan rentenir,” ujarnya.

Sebagai Pimpinan MPR, Syarief Hasan berharap agar program tersebut berlangsung lancar tanpa kendala. Dalam pelaksanaannya, tentu ada birokrasi yang

harus dipatuhi untuk memastikan program tersalurkan secara tepat. Namun, pastikan birokrasi itu dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa memberatkan rakyat.

“Terakhir, saya mengajak semua masyarakat Indonesia di masa pandemi ini untuk lebih mengasah lagi nilai-nilai luhur bangsa, seperti saling toleransi, gotong royong, saling merasakan penderitaan sehingga bersama-sama kita bisa dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa menghadapi dan lepas dari permasalahan berat ini,” tandasnya. □

DER

Kunker di Jawa Barat

# Ulama Juga Berperan Besar Melahirkan Indonesia Merdeka

Ulama adalah sosok terhormat di Indonesia, bukan hanya dilihat dari keilmuan agamanya, tapi jasa kepada bangsa dan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., mengungkapkan bahwa Indonesia lahir karena perjuangan para pahlawan dan juga ulama. Berkat perjuangan para pahlawan bangsa dan peran ulama yang bahu-membahu dengan seluruh rakyat, Indonesia berhasil mengusir penjajah dari Bumi Indonesia, dan memproklamakan kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, Jazilul Fawaid menganggap sudah seharusnya sebagai warga bangsa yang telah menikmati kemerdekaan, memberi penghormatan kepada para pejuang pendiri bangsa, termasuk juga ulama. Khusus penghormatan kepada ulama, menurut Jazilul, bukan hanya dilihat dari keilmuan agamanya saja, tapi juga karena jasa besar kepada bangsa negara tersebut.

“Bentuk penghormatan para ulama, selain

menziarahi kubur para ulama besar yang telah tiada, juga melakukan silaturahmi kepada para ulama yang masih hidup,” katanya, usai melakukan ziarah kubur ke makam ulama besar Ki Syekh H. Abdul Muhyi, di Pamijahan, Jawa Barat, Rabu malam (16/9/2020). Sehari sebelumnya, Jazilul juga melakukan ziarah ke makam ulama Banjar, Syekh Ahmad Sobrowi.

Pimpinan MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Jazil ini, melakukan ziarah ke makam para ulama besar, selain untuk mendoakan juga mengharapkan berkah, dan juga mengambil energi positif untuk meneladani sifat serta karakter para ulama yang sudah pasti sangat luhur dan berdampak baik bila dijalankan.

“Sebagai Pimpinan MPR yang juga sebagai kader partai, melakukan kegiatan ini (ziarah dan silaturahmi) sangat penting agar

perjalanan (saya) dalam mengemban amanah rakyat bisa berlangsung mulus, aman tanpa kendala, serta diridhoi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam, sehingga bermanfaat buat negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dalam lingkup yang lebih luas, yakni negara, tambah Gus Jazil, hal tersebut makin dibutuhkan. Apalagi bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi cobaan yang sangat berat, yaitu menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan akan berakhirnya, tapi yang sudah menimbulkan kerusakan sebagian besar sendi kehidupan rakyat.

“Selain tindakan-tindakan nyata dalam melawan pandemi ini, kita semua butuh satu kekuatan besar dari Sang Maha Pencipta agar mental bangsa ini kuat, dan bisa tenang sehingga pandemi ini berakhir. Menurut saya, para ulama adalah saluran terbaik untuk meminta pertolongan Tuhan agar membantu



kita semua,” ujar Gus Jazil.

Gus Jazil mengajak seluruh rakyat Indonesia, apapun kondisi negara sekarang untuk tetap menguatkan hati dan pikiran dengan menyandarkan diri kita semua dan pasrah kepada Allah.

“Tetap jaga semangat kebersamaan, saling membantu sesuai tuntunan Islam yang telah diajarkan oleh para ulama,” ucapnya. □

DER

## Dialog Masyarakat Sunda

# Keinginan Mengganti Jawa Barat Dengan Sunda

Tokoh dan masyarakat Sunda ingin nama Provinsi Jawa Barat diganti dengan Provinsi Sunda. Tujuannya agar nama Sunda tidak sirna. Fadel Muhammad mendukung namun perlu strategi dan jangan dilakukan secara 'underground'.

**B**ERTEMPAT di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 12 Oktober 2020 digelar 'Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda.' Acara itu diikuti oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad; anggota MPR dari Kelompok DPD Jawa Barat, Hj. Eni Sumarni; serta para tokoh masyarakat Sunda seperti Andri Prawira, Avi Taufik, Dyna, Acil Binbo, Prof. Ginanjar, Memet Hamdan, dan para wartawan.

Dalam acara itu, masyarakat Sunda menyampaikan aspirasi mengenai keinginan mereka untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Mereka satu persatu menyampaikan soal sejarah, demografi, sosiologi, dan budaya Sunda. Salah seorang tokoh menyebutkan bahwa aspirasi untuk menjadikan Sunda sebagai nama provinsi sudah dilakukan sejak 1926.

Selepas acara, Fadel Muhammad menuturkan bahwa kehadirannya di kota berjuduk Paris Van Java itu untuk melakukan serap aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Ini merupakan salah satu tugas MPR," ujarnya. Dia menyatakan, pada waktunya nanti aspirasi dari tokoh dan masyarakat Sunda akan disampaikan kepada Presiden. Lebih lanjut, alumni ITB itu mengatakan, ia bersama dengan anggota DPD dari Jawa Barat dan tokoh Sunda pada hari itu berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah itu.

Bagi Fadel Muhammad aspirasi untuk mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda sah-sah saja. "Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, juga mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat diganti dengan Provinsi Minangkabau," ungkapnya. "Aspirasi Fadli Zon dan tokoh Sunda itu tidak masalah," tutur Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu. Baginya, suku, agama, dan ras, itu bukan masalah. "Tak ada masalah dengan primordialisme," tuturnya.

Bila para tokoh Sunda bercita-cita demikian, Fadel Muhammad menyatakan,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tinggal bagaimana mencari strateginya. Menurut Fadel, harus ada yang berani memelopori dan berani memulai, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon yang mengusulkan mengganti nama Sumatera Barat dengan Minangkabau," ujarnya. Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut, kata Fadel, harus dilakukan secara terbuka, jangan *under ground*. "Tinggal mengatur strateginya saja," tambahnya.

Aspirasi mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu merupakan semangat baru. "Dengan nama yang demikian akan muncul budaya daerah sehingga tidak hilang ditelan waktu," paparnya.

Di hadapan peserta dialog, Fadel Muhammad menceritakan bagaimana proses terbentuknya Provinsi Gorontalo. Sebelum disepakati nama Gorontalo, ada yang mengusulkan pemekaran provinsi dari Sulawesi Utara itu dengan nama Provinsi Sulawesi Utara Barat, namun dia bersikukuh nama yang tepat disematkan kepada provinsi yang baru adalah

Gorontalo. "Semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi menggunakan nama Sulawesi, kecuali Gorontalo," paparnya. "Sejarah nama Provinsi Banten sama dengan Gorontalo," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eni Sumarni menuturkan, sebagai wakil Jawa Barat di DPD, dia mengapresiasi para tokoh Sunda yang bercita-cita mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda atau Tatar Sunda. "Nama Sunda dari dulu ada di peta dunia," ungkapnya. Ia khawatir bila nama ini tidak digunakan, Sunda bisa tergerus dan semakin menghilang. "Nah kita dukung para tokoh Sunda yang ingin mengembalikan nama Sunda ke provinsi," tegasnya.

Sunda, menurut Eni Sumarni, tidak hanya di tatar Pasundan. Dulu ada wilayah yang bernama Sunda Besar dan Sunda Kecil. "Intinya, nama Sunda jangan sampai hilang di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri," ujarnya. Untuk menggapai keinginan tersebut, menurut Eni Sumarni, dia melakukan dialog dengan berbagai masyarakat di Jawa Barat lainnya. "Dengan dialog akhirnya mereka bisa memahami," ungkapnya. □

AWG

**Kekerasan Terhadap Ulama**

# Harus Diusut Tuntas, DPR Perlu Bentuk Panja

Aksi perusakan dan corat-coret tempat ibadah makin sering terjadi. Agar tidak menjadi preseden buruk yang terus berulang, DPR perlu membentuk Panja untuk mencari tahu penyebab dan cara mengatasinya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**KSI corat coret dan vandalisme terhadap Mushola Darussalam, di Pasar Kemis, Tangerang, Provinsi Banten, mendapat reaksi dari Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Atas peristiwa tersebut, Hidayat mendorong agar Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan keagamaan, untuk membentuk Panitia Kerja (Panja).

“Panja perlu dibentuk agar kekerasan terhadap ulama dan perusakan masjid, serta mushola, yang marak terjadi belakangan bisa diusut tuntas,” ujar Hidayat melalui pers di Jakarta, Kamis (1/10/2020). Mengingat, kekerasan yang menyasar para ulama dan perusakan masjid semakin meresahkan masyarakat. “Uniknya, hampir semua kasus berujung pada kesimpulan, pelakunya gila atau depresi,” ujar Hidayat, yang biasa disapa HNW.

Jadi, menurut HNW, kasus-kasus tersebut perlu diusut tuntas. Terkait pengawasan, DPR bisa menggunakan kewenangannya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa dalang di balik peristiwa itu. Melalui Panja, hukum bisa ditegakkan, kejahatan sejenis bisa dihentikan, dan

negara betul-betul hadir melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia, termasuk para tokoh agama dan simbol agama, seperti masjid dan mushola.

Kekerasan terhadap ulama dan perusakan masjid, kata HNW, masih terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, terjadi saat bangsa Indonesia memperingati peristiwa G-30S/PKI. Kasus terakhir terjadi terhadap ulama kondang Syekh Ali Jaber yang ditusuk ketika berceramah di Lampung. Juga perusakan masjid di Dago (Bandung), dan terakhir tindakan vandalisme (corat coret) mushola disertai merobek kitab suci Alquran dan gunting sajadah, di Mushola Darussalam, Pasar Kemis, Tangerang, Provinsi Banten.

Jadi, kata HNW, pengawasan DPR terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara dan simbol agama, termasuk ulama dan tempat ibadah, perlu dilakukan. Apalagi, bila dikaitkan dengan analisis kontroversial Menteri Agama bahwa radikalisme menyebar, antara lain melalui masjid, dilakukan oleh penghafal Alquran yang mahir berbahasa Arab dan good-looking.

“Tapi faktanya, justru masjid di Dago dan mushola di Tangerang dirusak secara radikal oleh orang yang tidak hapal Alquran, tidak

pintar bahasa Arab, dan tidak good-looking. Sedangkan Syekh Ali Jaber, penceramah di masjid yang moderat dan tidak radikal, penghafal Alquran, mahir bahasa Arab, dan good-looking malah menjadi korban teror dan radikalisme,” ujarnya.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan bukti nyata, perlu adanya UU yang bersifat lex specialis sebagai perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Karena itu, RUU ini penting untuk segera dibahas dan disahkan. “DPR dan Pemerintah harusnya responsif terhadap pelanggaran hukum yang makin sering terjadi, seperti kasus pengrusakan rumah ibadah dan penusukan ulama, dengan segera membahas dan mengesahkan RUU itu,” tuturnya.

Sembari menunggu pembahasan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, Komisi VIII DPR RI bisa segera membentuk Panja sebagai realisasi dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja pemerintah, dalam hal melindungi ulama dan rumah ibadah. “Ini salah satu tupoksi utama Komisi VIII DPR RI, yakni melakukan pengawasan terhadap urusan keagamaan di Indonesia,” pungkasnya. □

MBO

## Mencari Solusi Persoalan Bangsa

# MPR “Rumah Kebangsaan” Terbuka Sebagai Tempat Dialog

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.

**P**ERSOALAN kebangsaan yang muncul belakangan ini terjadi karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Karena itu harus ada lembaga yang menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi kebuntuan itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.

“Saya sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Hubungan Antarlembaga akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa. Inilah makna MPR sebagai Rumah Kebangsaan,” kata Jazilul Fawaid di sela-sela kegiatan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Masjid Agung Banten, Kota Serang, Jumat (9/10/2020). Ziarah ke makam itu masih dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pandeglang, Banten.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, memberi contoh aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjurus anarkis berupa perusakan fasilitas umum, halte, perkantoran, dan berujung bentrok serta rusuh pada Kamis (8/10/2020) merupakan bentuk dari adanya kebuntuan tersebut. Aksi-aksi demo anarkis itu terjadi di berbagai kota di Indonesia.

“Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi. Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan pula. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog,” katanya.

Lalu di mana tempat untuk berdialog itu? Gus Jazil menyebutkan MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” tegas politikus PKB ini.

Dalam dialog itu, lanjut Gus Jazil, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.

Gus Jazil menilai saat ini belum ada lembaga yang mengajak berbagai elemen masyarakat itu untuk duduk bersama memecahkan persoalan bangsa. “MPR sangat tepat untuk berperan menjadi lembaga sebagai tempat dialog berbagai elemen masyarakat sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan. Jadi, orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum, apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran,” imbuhnya.

Gus Jazil menambahkan, untuk meredam kemarahan publik, seperti aksi demo menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. Artinya,

menggunakan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur. “Tidak bisa lagi show of force seperti itu. Yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi. Dialog itu bisa dilakukan di mana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” tegasnya.

Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya. □

BSC

Refleksi Hari Santri

# Semangat Mewujudkan Negeri Adil Makmur Diridhoi Allah

Hari Santri, 22 Oktober, diperingati untuk mengingatkan kembali perjuangan para santri dan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengajak seluruh santri khususnya dan umat Islam umumnya untuk memaknai lebih dalam dalam memperingati Hari Santri, 22 Oktober. Hari Santri, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, adalah mengingatkan kembali bagaimana umat Islam, ulama atau kiai, dan santri terjun dan berjuang di medan laga dengan hukumnya wajib dan fardu kifayah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

“Kita berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan,” ujar Jazilul Fawaid, Jakarta (16/10/2020). Umat Islam dan para santri membela negara terjun di medan laga setelah Rais Akbar NU Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari mendeklarasikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Selanjutnya, tanggal dan bulan dikeluarkan Resolusi Jihad, 22 Oktober, itu ditetapkan sebagai Hari Santri.

Memaknai lebih dalam Hari Santri, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu adalah bila dulu umat Islam dan santri berjuang,

berusaha, dan bekerja keras untuk mempertahankan kemerdekaan. “Nah, sekarang kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mengisi pembangunan,” tutur Jazilul yang biasa disapa Gu Jazil.

Gus Jazil menyatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya. Kaya dengan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga Rote. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat beragam, dan semuanya menjadi potensi besar yang bisa menjadi modal untuk memakmurkan rakyat Indonesia. “Kita mempunyai berbagai jenis hasil tambang yang ada di darat dan laut. Juga mempunyai hasil hutan, perkebunan, dan ladang yang melimpah,” katanya.

Kekayaan yang ada itulah, menurut Gus Jazil, perlu dieksplorasi dan dieksploitasi. “Meski demikian harus memerhatikan unsur keberlanjutan,” tegasnya. Hasil bumi dan air, menurut Gus Jazil, seperti yang tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara.

Nah, tugas umat Islam dan para santri

dalam memaknai Hari Santri adalah bagaimana kekayaan alam yang ada dikelola dengan usaha dan kerja keras. Hasilnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara. “Ini yang harus kita lakukan,” ujarnya. “Semangatnya sama, bagaimana umat Islam dan para santri pada tahun 1945 mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” tuturnya.

Sebagai umat Islam dan santri, alumni PMII itu, juga mengingatkan agar kita terus dan selalu mendekati diri kepada Allah SWT. “Kita harus selalu ingat, menyebut, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah,” tuturnya. “Menjauhi larangan-Nya, itu merupakan hal yang pasti,” ucapnya. “Dan, bagi para santri harus terus mengaji,” tambahnya.

Perpaduan antara urusan dunia dan akhirat inilah yang membuat Jazilul Fawaid yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kaya raya, adil makmur, dan diridhoi oleh Allah SWT. “Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Negeri yang diberkati oleh Allah, rakyat dalam suasana adil dan makmur,” katanya. □

Hari Santri

# Ahmad Basarah: Jihad Berarti Bela Tanah Air



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Santri 22 Oktober dalam semangat bela negara dan cinta Tanah Air. Hari Santri diperingati untuk mengenang Fatwa Resolusi Jihad Fii Sabilillah oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang saat itu mewajibkan setiap muslimin dan muslimat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gempuran tentara sekutu atas dasar keimanan pada Allah dan cinta Tanah Air.

"Dalam fatwa itu, KH. Hasyim Asy'ari mengungkapkan 'hubbul wathan minal iman', artinya cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, bela negara adalah bagian dari menjalankan syariat agama. Karena itu, kata 'jihad' yang artinya bersungguh-sungguh seharusnya selalu dimaknai positif, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di jalan Allah, termasuk mencintai Tanah Air demi kebaikan bangsa," jelas Ahmad Basarah, di tengah masa reses yang dijalannya di Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10).

Anggota dewan dari daerah pemilihan Malang Raya ini menjelaskan, lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri bukan hanya bagian dari upaya Ir. Joko Widodo memenuhi janji-janjinya dalam kampanye di Pemilu 2014, tapi lebih dari itu,

Keppres Hari Santri merupakan pengakuan negara terhadap peran, jasa, dan kontribusi seluruh ulama Tanah Air dalam berjihad merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang heroik tidak akan pernah terjadi tanpa fatwa perang sabil yang diserukan KH. Hasyim Asy'ari dan alim ulama di Jawa-Madura. Fatwa itu menjadi landasan moral sekaligus spirituil untuk menggelorakan api perjuangan rakyat Indonesia. Inilah hasil ijtihad alim ulama yang menempatkan ajaran agama dan semangat kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Jihad harus dimaknai sebagai bela Tanah Air," kata dosen tetap Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) itu.

Menurut Ahmad Basarah, latar belakang ditetapkannya keputusan politik ketatanegaraan Hari Santri bermula ketika dirinya mendampingi Ir. Joko Widodo untuk memperingati haul pendiri NU dan Bung Karno di Jawa Timur pada 27 Juni 2014. Saat itu Ir. Joko Widodo, dalam kapasitasnya sebagai calon presiden, berkunjung ke Pesantren Babussalam di Jalan Hasyim Asy'ari, Banjarejo, Malang, Jawa Timur. Di sanalah Ir. Joko Widodo, di hadapan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam KH. Thoriq

Bin Ziad, juga alim ulama dan ribuan pendukungnya, menandatangani kontrak politik bahwa ia sanggup menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri jika kelak memenangkan Pemilu 2014.

"Ide awalnya memang hari santri direncanakan diperingati setiap 1 Muharram seperti yang tertera dalam kontrak politik itu. Namun, dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri yang tentu saja dengan pertimbangan matang," jelas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Kini, setelah kontrak politik itu direalisasikan oleh Presiden Jokowi, Ahmad Basarah mengajak semua pihak untuk mengenang peran alim-ulama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Pengurus Lazis NU ini menegaskan, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama sebagai dasar dan ideologi negara adalah hasil ijtihad para alim ulama.

"Ada peran KH Wahid Hasyim di situ, juga ada kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dan jasa Kasman Singodimedjo serta tokoh-tokoh bangsa lainnya. Bahkan negara telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo melalui

Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018 atas jasanya menjadi jembatan pemersatu antara Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945,” jelas Ahmad Basarah.

Dalam peringatan Hari Santri ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan apresiasinya kepada dua organisasi besar nasional, Nahdlatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah. NU telah meneguhkan kembali komitmennya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, sementara Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa Negara Pancasila merupakan Darul Ahdi (negara kesepakatan) Wa Syahadah (dan tempat kesaksian).

“Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila adalah kalimatun sawa, titik temu di antara perbedaan yang ada. Inilah khittah bangsa Indonesia, negara nasional-religius. Marilah kita warisi api perjuangan para pendiri bangsa, jangan ambil abunya,” tandas Ahmad Basarah. □

## Peringatan Hari Santri

# Kebangkitan Santri Mengawal Perubahan

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menggelar peringatan Hari Santri 22 Oktober yang diikuti berbagai kelompok masyarakat. Dalam pesannya, dia berharap agar para santri menguasai lptek agar menjadi pelopor perubahan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**B**ERTEPATAN Kamis, 22 Oktober 2020, sekitar 200 orang elemen masyarakat berkumpul di Rumah Rahlia, Kelurahan Bojong Sari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Hari itu, di rumah berbentuk joglo, mereka yang terdiri dari para ulama, seniman, budayawan, santri, alumni santri, IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Banser, memperingati Hari Santri.

Pada acara bertema: ‘Kebangkitan Santri Dalam Mengawal Perubahan Dengan Nilai Kemandirian’, hadir Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Serta dihadiri pula oleh Pembina Rumah Dahlia Yusra Amir, Pendiri Marjinal Muhamad Isrofil, Pendiri Rumah Rahlia Indonesia Mansyur Alfariy, Pembina Tasawuf Underground KH Halim, Pimpinan Pondok Pesantren Al kharimiyah KH Ahmad Damanhuri, serta Pimpinan Pondok Pesantren Al Azis KH Robin.

Jazilul Fawaid dalam pidatonya mengatakan, peringatan Hari Santri dilaksanakan di mana-mana di seluruh Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, peringatan Hari Santri ditandai dengan peluncuran santrinnet. Saat ini, di Jakarta, Hari Santri diperingati bersama dengan para santri, ulama, budayawan, seniman, dan generasi muda lainnya yang datang dari wilayah Jabodetabek. Perayaan dilakukan secara sederhana, karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. “Alhamdulillah para peserta, khususnya para santri, antusias mengikuti dan ingin agar Hari Santri menjadi pemicu semangat kebangkitan,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid.

Selanjutnya, Gus Jazil menyatakan, hari ini tepat 75 tahun dideklarasikan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad merupakan seruan yang disampaikan oleh Rais Akbar NU

Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari kepada umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman agresi tentara Inggris dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

“Saat ini, 22 Oktober 2020, kita bisa bersenang-senang, tapi pada 22 Oktober 1945 rasa bersenang-senang itu tidak ada,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Soalnya, kala itu, bangsa Indonesia sedang menghadapi agresi musuh bersenjata lengkap. Setelah berhasil mematahkan serang musuh yang ingin kembali menjajah Indonesia, selanjutnya tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan. “Namun tidak lagi dengan mengangkat senjata”, ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, tokoh nasional kelahiran Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu mengajak seluruh peserta





upacara, khususnya para santri, untuk tetap menggelorakan semangat Resolusi Jihad, namun dalam konteks yang lain.

Semangat Resolusi Jihad, menurut Gus Jazil, perlu ditanamkan kepada santri untuk tekun belajar dan sungguh-sungguh agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). “Menguasai Iptek inilah yang akan mengubah hidup dan kehidupan kita,” tegasnya. Perubahan bisa terjadi berawal dari diri sendiri. “Pastinya, perubahan yang kita inginkan adalah menuju kebaikan”, tegasnya. Untuk itu, Gus Jazil menyerukan, agar para santri rajin menuntut ilmu. Dengan menguasai dan mencintai Iptek, tutur alumni PMII itu, maka hidup ini menjadi mulia.

Gus Jazil lalu mengutip pesan KH. Hasyim Asy’ari yang bunyinya: *...hendaklah kita segera kita menuntut ilmu dan jangan terperdaya untuk menunda-nunda dan berangan-angan panjang waktu yang tak akan kembali.* “Nah, hilangkan kebiasaan kita mengatakan tarsok-tarsok (entar dan besok)”, tuturnya. Dan, para santri harus bersegera bila ingin menuntut ilmu.

Apalagi tantangan yang dihadapi generasi muda cukup berat. Dia menyebut, siaran televisi yang banyak menayangkan film, iklan, dan lain sebagainya itu, bisa menyebabkan panjangnya angan-angan. “Bila terlalu panjang angan-angan dan tak menguasai ilmu, maka santri akan ketinggalan zaman”,

ujar Jazilul Fawaid mengingatkan.

Maka, bangsa ini harus maju dalam Iptek. “Santri harus menjadi pelopor dalam hal ini. Dengan menguasai Iptek maka santri tidak berada pada kelompok pinggiran,” ungkap Gus Jazil. Ia berharap agar santri tidak mudah mengeluh, apalagi suka menyalahkan orang lain. “Santri dididik untuk mandiri,” paparnya. Maka, jadikan Hari Santri sebagai momen kebangkitan.

Masih soal pentingnya menguasai Iptek, Gus Jazil mengingatkan kembali ramalan Sastrawan Jawa, Ronggowarsito. Ronggowarsito dalam ramalannya mengatakan: *...akan tiba suatu masa yang disebut ‘kolotido’ atau zaman yang semuanya membingungkan. “Pada masa itu antara hitam dan putih, benar dan salah, semua tidak jelas. Semua merasa benar,”* katanya.

Itu adalah gambaran sebuah masa disebut zaman edan. Zaman edan adalah zaman di mana bila seseorang ingin mendapatkan sesuatu maka jalan yang ditempuh adalah dengan menghalalkan segala cara. Zaman edan ini, menurut Gus Jazil, membuat orang berada pada pilihan yang sulit. Bila tidak edan, tidak menghalalkan segala cara, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu. “Inilah zaman edan, *yen ora edan ora keduman* (kalau tidak menghalalkan segala cara tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan),” tuturnya.

Dalam zaman edan, menurut Gus Jazil, masih ada orang yang selamat. Juga mengutip pesan Ronggowarsito berbunyi: *sak bejo bejone wong edan isih bejo wong sing eling lan waspodo* (seberuntung-untungnya orang yang lalai masih beruntung orang yang sadar dan ingat jati dirinya). Untuk itulah, Wakil Ketua Umum DPP PKB, itu mengingatkan untuk tetap sadar diri dan jangan ikut-ikutan pada sesuatu yang tidak jelas.

Untuk menghindari zaman edan, menurut Gus Jazilul, kiat atau caranya adalah mengikuti pesan Sunan Kalijaga, lewat tembang Ilir-Ilir – sebuah tembang yang membangunkan kita agar sadar. Nah, sekarang tergantung kita, mau sadar atau tidak. Bila mau sadar, selanjutnya adalah bersemangat. Bersemangat dalam menjalankan kehidupan duniawi dan akhirat. “Jadi, santri harus sadar dan bersemangat”, tegasnya. □

AWG

## Peringatan Hari Pahlawan

# Pahlawan di Era Pandemi



Hidayat Nur Wahid



Elnino H. Husein Mohi

**K**EPRES Nomor 316 Tahun 1959 tertanggal 16 Desember 1959 menandai penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tanggal 10 November dipilih untuk mengingatkan seluruh warga bangsa Indonesia bahwa pada tanggal dan bulan itu di tahun 1945 terjadi pertempuran di Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertempuran 10 November itu, Bung Tomo membakar semangat jihad arek-arek Suroboyo di medan pertempuran dengan tak henti-hentinya mengumandangkan takbir... Allahu Akbar, melalui corong radio. Pertempuran itu semakin fenomenal setelah komandan pasukan musuh (Sekutu), Brigadir Jenderal Mallaby, tewas.

Pertempuran 10 November di Surabaya itu berhasil menggagalkan tipu muslihat pasukan Sekutu yang diboncengi pasukan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Itu menunjukkan bahwa sekitar 6000 pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran itu tak sia-sia. Mereka gugur untuk membela Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945.

Nah, peristiwa heroik di Surabaya itulah

yang diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November. Tahun ini, Hari Pahlawan terasa spesial, diperingati dalam suasana prihatin. Di tengah pandemi Covid-19. Maka tak kalah heroiknya perjuangan para anak bangsa dalam menyelamatkan rakyat Indonesia dari serangan virus corona.

Para pejuang yang dimaksud adalah tenaga medis, dokter, sopir ambulans, penggali makam, dan lainnya gugur dalam tugasnya. Mereka ini berada di garis terdepan dalam "perang" melawan Covid-19. Dan, mereka layak disebut pahlawan. "Mereka yang gugur dalam tugas menangani Covid-19 pada 2020 ini perlu diberi penghargaan yang tinggi,

sebagai pahlawan," ujar Elnino H. Husein Mohi, pimpinan Fraksi Partai Gerindra di MPR, kepada Majalah *Majelis*.

Pandemi Covid-19, menurut Elnino, telah memantik keberanian dan sikap kejuangan putra dan putri bangsa Indonesia untuk tampil di garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Mereka yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini berani menerima segala risiko, seperti halnya arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945.

Karena itu, menurut politisi Partai Gerindra ini, mereka yang gugur dalam tugas mengatasi Covid-19 perlu diberi penghargaan





yang tinggi. Penghargaan tersebut perlu diberikan kepada, antara lain dokter dan paramedis yang gugur dalam menjalankan tugasnya, menolong para korban akibat virus Corona Covid-19.

“Kalau perlu gelar pahlawan itu diberikan berdasarkan SK Presiden. Ini penting untuk menghormati dan menghargai segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam membantu sesama, khususnya pasien corona,” kata Elnino.

Elnino memberikan beberapa alasan kenapa dokter, paramedis, dan orang-orang yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 perlu mendapat penghargaan yang

besar. Alasannya, antara lain karena mereka ikhlas mempertaruhkan jiwanya untuk menyelamatkan para pasien yang terpapar virus corona.

Sikap ikhlas mempertaruhkan jiwa inilah yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan pada masa lalu. Mereka yang berjuang membela negara, rela menerima risiko terjelek. Termasuk jika sewaktu-waktu gugur di medan perjuangan. Sikap seperti itu diharapkan menjadi inspirasi bagi para dokter dan perawat, sehingga mereka memiliki dedikasi yang sama dalam menangani pandemi Covid.

“Ketika mereka menjadi martir dalam perang melawan Covid-19 semestinya pemerintah semakin memperbaiki sistem penanggulangan virus yang awalnya ditemukan Tiongkok itu. Agar tidak ada lagi dokter dan paramedis terpapar virus corona,” ujar Elnino.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua MPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. Sejak jauh-jauh hari Hidayat sudah mengingatkan pemerintah untuk memberikan penghargaan, khususnya insentif kepada semua orang yang menjadi bagian dari garda terdepan

penanggulangan Covid 19. Terutama insentif yang menjadi hak mereka, karena memang pernah dijanjikan oleh pemerintah.

Menurut Hidayat Nur Wahid, pemberian insentif ini penting untuk memacu semangat mereka dalam bekerja. Insentif juga akan membantu meringankan tugas mereka, setelah menyelesaikan pekerjaan yang penuh tekanan.

“Segera cairkan dan serahkan kepada mereka yang berhak. Pemberian insentif itu sangat penting sebagai bagian dari perhatian pemerintah. Jangan pernah ditunda, apalagi untuk alasan yang tidak mendesak,” begitu harapan Hidayat.

Di Indonesia sendiri belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Hingga akhir Oktober, jumlah pasien terpapar Covid-19 mencapai lebih dari 396.454 kasus. Dari jumlah tersebut pasien yang sembuh berjumlah lebih dari 322.248 pasien, sementara meninggal dunia mencapai 13.512 lebih. Sedangkan pertambahan jumlah pasien tertular Covid-19 tiap hari di atas 3000 orang. □

MBO



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

# Pahlawan Pejuang Melawan Covid-19

**H**INGGA September 2020, tenaga kesehatan gugur akibat terinfeksi virus corona sudah ratusan jumlahnya, dan 115 di antaranya dokter. Dan, inilah beberapa pejuang medis yang berada di garda terdepan, baik yang telah gugur maupun mereka yang setia menjalan tugas masing-masing selama pandemi Covid-19.

## Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc., Guru Besar Ilmu Epidemiologi UI.

Di Indonesia, kasus pertama korban virus Corona diketahui pada awal Maret 2020. Tak lama setelah itu, satu-persatu korban berjatuh, termasuk dari kalangan dokter. Bahkan, jumlah dokter yang terpapar virus corona, dan berakhir dengan kematian terus bertambah. Para dokter ini tertular antara lain karena tak cukup menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) saat menolong pasien.

Apalagi, pada periode awal pandemi corona, keberadaan APD sangat langka. Beberapa rumah sakit mengeluhkan karena kelangkaan APD ini. Begitu langkanya beberapa rumah sakit terpaksa mencuci APD-nya agar bisa dipakai lagi. Sementara rumah sakit yang lain, pasrah karena memang keberadaan APD tidak bisa ditemukan.

Hingga pertengahan Oktober 2020 tercatat tak kurang dari 136 orang dokter harus tutup usia akibat terpapar Corona. Salah satu dokter tewas akibat Corona adalah Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc.

Terakhir Bambang Sutrisno (almarhum) tercatat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Epidemiologi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Prof. Bambang menghembus nafas terakhir pada Senin, 23 Maret 2020, pukul 08.30 WIB, dan terkonfirmasi sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Dua hari sebelum berpulang, Prof. Bambang masih sempat mengajar mahasiswanya secara daring, meski saat itu dia sudah mengidap serangan batuk cukup parah.

Prof. Bambang Sutrisna adalah salah satu contoh dokter yang tertular covid dari pasiennya. Karena itu, kepergiannya



**Bambang Sutrisna**

menimbulkan rasa duka cita yang mendalam, bukan hanya pihak keluarga tapi juga dari koleganya, termasuk para mahasiswa.

Sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, pihak keluarga sudah melarang dr. Bambang Sutrisna untuk tetap membuka praktik. Namun, larangan tersebut tak diindahkan. Alasannya, dia merasa kasihan kepada pasiennya, karena ada di antara pasiennya itu datang dari tempat yang jauh. Dan ternyata, salah satu dari pasien yang dikasihaninya itulah menularkan virus ke dokter Bambang.

Seperti dikisahkan anaknya, sebelum berpulang, ayahnya (dr. Bambang) mengalami penderitaan yang tidak ringan.



**Ninuk**

Demam tinggi, batuk tak berkesudahan, dan sesak nafas. Almarhum selalu terlihat kuat, meski mengeluhkan akibat sakit yang diderita. Itu artinya, sakit yang dia rasakan sudah tak terperi. Dan, Tuhan pun memanggilnya kembali pada Senin, 23 Maret 2020, pukul 08.30 WIB.

## Ninuk, Perawat RS Dr. Cipto Mangunkusumo

Selain dokter, tenaga medis yang juga rawan terpapar virus corona, Covid-19, adalah perawat. Bahkan perawat memiliki risiko terkena penularan lebih tinggi ketimbang dokter. Karena, perawat lebih intens melakukan kontak dengan pasien dibanding dokter. Merekalah yang mengambil sampel darah dan mengganti popok pasien. Perawat jugalah yang membetulkan alat infus jika terjadi kerusakan.

Beratnya perjuangan perawat selama pandemi Covid-19 ini makin lengkap karena banyak di antara mereka yang terusir dari rumah kos. Bukannya bersimpati atau membantu meringankan beban pekerjaan perawat, malah beberapa pemilik rumah kos memilih mengusir mereka dengan alasan khawatir menularkan virus corona kepada penghuni lain.

Hingga pertengahan Oktober lalu, tak kurang dari 98 orang perawat meninggal akibat corona. Sebagian besar dari mereka terserang saat menjalankan tugasnya sebagai perawat. Salah satu perawat yang gugur akibat terinfeksi corona itu adalah Ninuk.

Menurut data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ninuk tercatat perawat pertama meninggal akibat Covid-19. Ia menghembuskan nafas terakhir pada Kamis, 12 Maret 2020, dalam usia 37 tahun. Ia dikabarkan terpapar virus corona setelah merawat seorang WNA Korea Selatan dengan gejala Covid-19 pada Februari. Namun, kabar ini tak terkonfirmasi hingga Ninuk tutup usia.

Ninuk adalah seorang perawat di RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia sudah mengabdikan dirinya sebagai tenaga medis di Ruang ICU RSCM selama 12 tahun. Tapi siapa nyana, pada 10 Maret ia terbaring di

ruang di mana tempat sehari-hari dia bekerja. Ia mengalami kelelahan amat sangat, diare dan sesak nafas. Ninuk juga terserang demam tinggi dengan suhu tubuh 39 derajat Celsius.

Saat masih dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Ninuk memberitahukan pada suaminya, jika ia positif corona. Di tempat tidur (ruang perawatan) tubuh Ninuk tak henti berpeluh, sementara hidungnya terus berair. Ia terus mengeluh pada suaminya jika pinggangnya terasa nyeri.

Selama dalam perawatan Ninuk hanya ditemani suaminya. Laki-laki itu pula yang setia menyeka keringat istrinya, Ninuk, dan sesekali mengoleskan obat gosok di pinggangnya untuk meredakan rasa nyeri. Ninuk juga selalu mendapat semangat dari suaminya agar ia tetap punya semangat hidup, dengan mengatakan bahwa Allah-lah yang memberikan sakit dan Allah jualah yang menyembuhkan.

Seolah membulatkan tekadnya sebagai perawat, Ninuk membalas pesan suaminya dengan mengatakan bahwa dirinya hidup untuk orang yang disayangi, dan mati untuk orang yang disayangi, termasuk (untuk) profesinya. Dalam kondisi yang makin parah, Ninuk dipindahkan dari RSCM ke RSPI Suliati Saroso, Jakarta Utara, salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta. Dia diisolasi di sana hingga ajal menjemputnya.

### Sahrul Ridha, Pemulasaran Jenasah

Seperti dokter dan paramedis, petugas pemulasaran jenazah juga mengalami peningkatan volume pekerjaan selama pandemi Covid-19. Bahkan, pekerjaan yang harus diselesaikan terasa bertambah berat. Karena korban virus corona hanya boleh dimandikan sesuai protokol kesehatan. Termasuk penggunaan ADP. Ini penting agar petugas pemulasaran tidak tertular virus corona.

Sahrul Ridha, salah seorang petugas bagian mencucikan jenazah di PSPI Suliati Saroso, mengakui beratnya tugas pemulasaran jenazah Covid-19. Salah satu faktor yang membuatnya sedih saat membersihkan jenazah Covid-19 adalah tak tega melihat kesedihan keluarga korban yang ditinggal. Sahrul membayangkan, bagaimana kalau nasib itu menimpa dirinya atau keluarganya,



Junaidi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tentu dia pun akan sedih.

Sebagai petugas pemulasaran, Sahrul menjadi orang terakhir yang dapat melihat dan mengurus korban Covid-19. Karena itu, ia berkewajiban menyalatkan jenazah yang selesai dimandikan. Beberapa keluarga sempat memohon ikut mengurus jenazah, namun permintaan itu tak ada yang dikabulkan.

Bagi petugas pemulasaran, pemakaian ADP saat memandikan jenazah membuat mereka makin terasa berat. Karena penggunaan ADP membuat mereka kepanasan, berkeringat, kekurangan cairan serta oksigen. Namun, karena penggunaan ADP adalah persyaratan pemulasaran jenazah Covid-19 maka mereka pasrah menerima. Apalagi ketentuan itu bertujuan baik, agar tidak tertular Covid-19.



Sahrul Ridha

### Junaidi, Penggali Kubur

Petugas penggali kubur adalah profesi yang kesibukannya juga meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Pada hari-hari biasa, bukan di masa pandemi, mereka hanya menggali 1 atau 2 liang lahat dalam satu hari. Namun, selama pandemi, tiap hari puluhan tempat peristirahatan terakhir korban pandemi harus disediakan. Bahkan, mereka kerap harus melakukannya hingga dini hari. Tergantung jenazah yang akan dimakamkan.

Tantangan yang dihadapi para penggali kubur itu terasa semakin besar selama Ramadan lalu. Soalnya, mereka harus menunaikan kewajibannya menggali puluhan liang lahat dalam kondisi perut kosong, karena puasa. Namun, beratnya tugas tersebut terasa ringan, setelah melihat kesedihan keluarga korban Covid-19 yang tidak bisa menguburkan anggota keluarga, seperti seharusnya.

Adalah Junaidi (42 tahun), termasuk salah seorang tukang gali kubur di pemakaman Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pondok Rangon ditetapkan sebagai salah satu lokasi pemakaman bagi korban Covid-19 di Jakarta. Selama pandemi, Junaidi bersama teman-temannya bekerja hingga malam hari, tujuh hari dalam seminggu, dengan upah bulanan sebesar Rp 4,2 juta. Meski tantangan yang dihadapi tidak ringan, Junaidi tetap berusaha menjalankan tugas dengan baik. Junaidi mengaku, rasa lelahnya hilang manakala melihat kesedihan keluarga korban corona yang ditinggalkan.

Junaidi sangat sadar bahwa risiko pekerjaannya selama Covid-19 ini meningkat. Karena kalau nasib sedang tidak beruntung mereka bisa saja terpapar Covid dari orang yang dimakamkan. Untuk itu, ia menjalankan tugasnya dengan sangat berhati-hati, terutama saat menurunkan peti mati, karena ketika itu ia harus menyentuhnya.

Hanya saja, meski dia menjalankan tugas mulia, namun Junaidi prihatin dengan perubahan sikap tetangganya semenjak pandemi berlangsung. Karena sejak ada Covid, dia merasa tetangganya merenggangkan hubungan. Mereka seolah sengaja membuat jarak, mungkin karena takut tertular virus. □

MBO

## Ragam Pendapat dan **Dinamika** Omnibus Law Cipta Kerja

Disahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Ada yang merasa hak-haknya dipotong dan dikurangi, namun ada pula yang menyebut hak-haknya dipertahankan bahkan ditambah. Apa dan bagaimana UU itu sebenarnya? Berikut pendapat dua anggota Panja UU Omnibus Law.

**Ledia Hanifa Amaliah**, Anggota MPR Fraksi PKS

### Tidak Menjamin Investor Datang

**K**ALAU ada yang mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan cepat, dalam beberapa hal memang betul. Padahal, menurut kami, ada beberapa hal yang masih kurang, yakni mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum, pakar, dan lain sebagainya. Mengambil masukan dari masyarakat sudah dilakukan, namun kurang banyak karena itu sangat penting dan krusial. Saat pada masa reses lalu, kami tidak ikut membahas Omnibus Law, karena kami ingin menampung banyak masukan dari masyarakat untuk mengambil aspirasi. Kami Fraksi PKS sejak awal sudah menerima masukan dari gabungan serikat pekerja.

Mengatur dan mengelola 79 undang-undang itu tidak gampang, karena banyak hal terkait satu dengan yang lain, perlu sinergi satu dengan yang lain. Dari proses yang ada menjadi kesulitan besar bagi kita semua, karena, misalnya, dalam Rapat Pembahasan Tingkat I, pengambilan keputusan juga belum menerima draf bersihnya.

Karena keterbatasan dan tidak memungkinkan, Tim Perumus melakukan penyisiran di mana di sana banyak sekali undang-undang sehingga bisa saja banyak sekali menyebabkan kelolosan-kelolosan. Maka dalam pemeriksaan tingkat 1, lazimnya draf diberikan lebih dulu. Hal demikian seharusnya lebih banyak dilakukan oleh banyak orang, karena banyak mengandung sektor undang-undang. Menurut saya, ini jadi pelajaran bagi kita terkait faktor teknis. Undang-undang ini perlu sinergi dengan yang lainnya itu sehingga merupakan suatu kerumitan tersendiri.

Kalau dikatakan konsultasi publik sudah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dilakukan oleh pemerintah, tetapi kenyataan di lapangan waktu kita bahas banyak di internal kementerian, pembahasan sektoral, mereka masih banyak mengatakan seharusnya bukan begini, seharusnya begitu. Banyak yang kemudian ternyata kok tidak menyambung.

Pembahasan undang-undang dengan metode Omnibus Law ini yang pertama kali sehingga sangat rumit. Meskipun Ketua Panja mengatakan, cuma sebagian yang diubah tetapi kita tidak boleh lupa, ketika ada yang diubah atau dihapus itu mengubah konstruksi undang-undang asalnya. Ketika mengubah undang-undang asalnya itu, perlu kejelian tersendiri untuk melakukan pembahasan-pembahasan.

Konstruksi tentang ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2009. Misalnya, A. Konsep PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dihilangkan batas jumlah perpanjangan. Dengan demikian status pekerja dapat PWKT terus-menerus. B.

Tentang alih daya (*outsourcing*) yang semula dilarang untuk pekerjaan yang terkait langsung dengan proses produksi, pada UU Cipta Kerja hilang. Artinya, memperluas cakupan jenis pekerjaan yang bisa di-*outsourcing*. C. Hilangnya Pasal 166 tentang santunan bagi pekerja wafat. D. Pesangon PHK (berdasar lama masa kerja) yang semula pengaturannya 'paling sedikit' 32x upah menjadi 'paling banyak' 25x upah (19x dibayar pengusaha, 6 dibayar pemerintah melalui BPJS).

Apakah UU *Omnibus Law* ini akan menjamin semakin banyaknya investor dalam dan luar negeri mendirikan perusahaan di Indonesia? Tidak yakin karena respon negatif juga muncul dari investor Eropa yang mengkritik kurang berpihaknya UU ini pada pelestarian lingkungan. Dalam beberapa kajian problem tidak masuknya investasi ke Indonesia, karena masalah terbesarnya korupsi. □

AWG

H. Syamsul Rizal, Anggota MPR Fraksi PPP

## Untuk Menyambut Indonesia 2045

**R**ANCANGAN Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang kini telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja tidak saja mengatur tentang Tenaga Kerja, tetapi juga mengatur banyak hal. Karena UU Cipta Kerja disiapkan untuk menjadi jawaban pasti terhadap banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. UU Cipta Kerja memang disiapkan untuk jangka panjang, bahkan ketika Indonesia berulang tahun ke-100 pada Tahun 2045 banyak harapan yang digantungkan pada UU Cipta Kerja ini. Ada banyak UU yang di-*Omnibus Law*-kan agar UU *existing* tersebut menjadi efektif dan dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang saat ini, baik perkembangan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Baik menyangkut kemajuan teknologi, perkembangan peraturan dan hukum yang berlaku secara nasional ataupun hukum internasional. Kesemuanya memengaruhi persaingan global antara negara di dunia, utama dalam konteks hubungan dagang yang dikawal oleh PBB melalui *World Trade Organisation* (WTO).

Khusus untuk perdagangan dalam negeri, UU Cipta Kerja diarahkan untuk pengaturan yang memberi pelayanan yang optimal dengan kemudahan berbagai bidang, khususnya menyangkut Penerbitan Perizinan Berusaha. Oleh karena itu sebagaimana telah disebut di atas bahwa UU Cipta Kerja tidak semata-mata mengatur tentang urusan tenaga kerja/perburuhan, tapi mengangkat banyak sisi yang penekanannya tentang bagaimana pembangunan perekonomian Indonesia yang dikaitkan dengan upaya kemudahan berinvestasi di tanah air.

Berkaitan dengan klaster, Tenaga Kerja UU ini memberikan perhatian khususnya terhadap UMK-Koperasi. Karena fakta di lapangan dan dengan data yang ada ternyata UMK-Koperasi mendapat kedudukan khusus di tengah masyarakat, karena UMK-Koperasi mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan perusahaan-perusahaan

menengah dan perusahaan besar lainnya. Tidak kurang 80-95% tenaga kerja yang ada mampu diserap oleh UMK-Koperasi, serta memberi sumbangan mencapai 70%-80% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Jadi, peran besar UMK-Koperasi dengan kelahiran UU Cipta Kerja mampu mem-

akan mengundang banyak penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian lapangan kerja baru segera terbentuk di tanah air, tinggal lagi bagaimana para pekerja lebih meningkatkan lagi kualitas diri agar tuntutan jenis pekerjaan dapat dipenuhi dalam negeri sendiri. Begitu juga



berikan kepastian hukum bagi para pekerja di masa akan datang. Juga memberikan sumbangan tidak saja di dalam negeri, tapi *Small Medium Enterprise* ini juga berperan sama di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand. Dengan UU Cipta Kerja ini UMK-Koperasi memegang peran lebih strategis lagi, mengingat setiap tahun Indonesia ini tercatat kurang sedikit dari 3 juta orang memerlukan peluang untuk dapat bekerja.

UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada siapapun dan tidak semata-mata untuk menguntungkan pihak pengusaha, tapi UU ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka sebagai pengusaha ataupun masyarakat sebagai buruh/pekerja. Ke depan seorang anggota masyarakat akan sangat mudah menjadi pengusaha, karena persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha akan menjadi sangat ringan. Dengan iklim seperti itu maka diharapkan

peluang investasi yang diperoleh dari penanam modal luar negeri akan memperbesar lapangan pekerja di tanah air.

Setidaknya UU Cipta Kerja akan membuka jalan untuk masuknya investasi dengan memudahkan proses mendapatkan perizinan berusaha. Di samping itu, UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum berkaitan dengan urusan tenaga kerja dan urusan pertanahan, serta hal lainnya yang di perlukan untuk memenuhi suatu usaha. Kepastian hukum tentang upah pekerja, pengaturan jam bekerja, serta pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pekerja. Hanya saja dalam suasana pandemi Covid-19 yang telah menjangkau seluruh pelosok dunia, dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan berakhirnya membuat terjadinya perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, dan juga berpengaruh pada ekonomi Indonesia. □

AWG

Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat

# Dede Yusuf Bahas Isu Tenaga Kerja Indonesia

Permasalahan seputar tenaga kerja Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dibicarakan. Solusi penyelesaian masalah sangat diperlukan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**NGGOTA MPR RI Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, ST., M.Si.Pol., melihat bahwa isu tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar, harus mendapatkan perhatian lebih seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah. Sebab, masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi para tenaga kerja Indonesia yang belum juga terselesaikan. Antara lain, rendahnya upah, masuknya tenaga kerja asing dan rendahnya pendidikan.

“Apalagi di saat kita memasuki era bonus demografi, di mana angkatan kerja di Indonesia menjadi lebih besar. Jangan sampai terjadi ledakan tenaga kerja, tapi minim lapangan kerja,” ungkap Dede Yusuf.

Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf saat hadir secara virtual di acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, sekaligus bedah buku karyanya berjudul: ‘Bersaing atau Tenggelam: Indonesia Bukan Bangsa Kuli’. Judul buku ini juga menjadi tema acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna, Gedung Mess MPR RI, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9/2020).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM.; Tenaga Ahli DPR M. Akhiri Khailuki, M.Si.; Dosen ITB Dr. Epin Saepudin, M.Pd.; Sekjen Asia Afrika Reading Club (AARC) Hermawan Wahyudin, S.Sos.; dan para peserta perwakilan dari AARC, Forum Literasi Bandung, Sahabat Museum Sri Baduga, Yayasan Al Hanifah, dan Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika Bandung.

Dede Yusuf mengungkapkan, ada lima jurus yang diyakini bisa menjadi solusi dari permasalahan tenaga kerja Indonesia tersebut, yakni: *Pertama*, Beasiswa Vokasional yang memberikan pendidikan kepada tenaga kerja agar menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis sesuai kebutuhan pasar.

*Kedua*, Sekolah Binaan Industri. Pemerintah mesti mengintegrasikan dunia pendidikan dengan pelaku usaha dan industri. Selanjutnya, jurus *ketiga* hingga *kelima* adalah: Sertifikasi Kompetensi, Rangsangan Ekonomi Kreatif, dan Gerakan Pencerahan. “Intinya adalah fokus kepada peningkatan

sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompeten memenuhi pasar kerja di dalam negeri juga mampu bersaing secara global,” tambahnya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyampaikan, tema acara ini sangat berkualitas dan menggugah untuk dibahas. Setiap pembahasan permasalahan bangsa yang pada akhirnya lahir solusi, menurut Siti Fauziah, patut diapresiasi. “Acara ini juga bertujuan ke arah itu. Dan, saya harap, acara ini memberikan manfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua,” katanya.

Terkait acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, Siti Fauziah juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut adalah program rutin dan dilaksanakan secara periodic. Perpustakaan MPR RI yang sebagai pengagas acara bedah buku ini memilih bedah buku-buku yang berbobot dan berkualitas, serta dipadu dengan diskusi seru dan interaktif bersama para narasumber yang juga berkualitas. □

DER



75 Tahun Kereta Api Indonesia



Spirit Baru  
Dengan Nilai Utama AKHLAK

Sistem perkeretaapian di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan pesat. Logo baru diharap menjadi semangat agar PT KAI semakin ber-AKHLAK. Sejarah perjalanan panjang perkeretaapian di Indonesia dimulai saat Baron Sloet mencangkul tanah di Kemijen. Sekarang pembangunan jalur kereta terus ditingkatkan, double track dari Cikarang hingga Manggarai, dan lintas selatan Jawa panjang hingga 550 km menghubungkan Cirebon - Purwokerto - Kroya - Yogyakarta - Solo - Madiun - Jombang.



PT. KERETA API INDONESIA  
(PERSERO)  
KANTOR-PUSAT

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**I USIANYA yang ke-75 tahun, PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) mempunyai logo baru. Logo berbentuk tulisan *KAI*. *KAI* merupakan logo kelima sejak perusahaan kereta api milik negara itu menggunakan penanda. Pada 1953 – 1988, perusahaan kereta api Indonesia memakai logo pertama berupa sayap kembar berwarna hijau tua. Logo kedua, 1988 – 1990, segilima berwarna biru tua disertai huruf KA, akronim Kereta Api, yang dibentuk dari roda boogie kereta api. Pada 1991 – 2011, perusahaan ini mengganti logonya (logo ketiga) berupa jajaran genjang berwarna oranye yang memiliki siluet kereta cepat berujung runcing. Di bawah logo ada tulisan Kereta Api. Lalu, pada 2011, perusahaan kereta api ini merancang logo baru dengan melibatkan masyarakat, dengan mengadakan lomba terbuka. Dan, pemenangnya adalah Farid Stevy Asta, dengan karya berupa gambar anak panah. Karya Farid Stevy Asta ini dijadikan logo perusahaan kereta api (keempat), dan berlaku sampai 2020.

Kini, pada 2020, PT. KAI memberlaku logo baru lagi. Dalam akun resmi *facebook* PT. KAI, logo baru diciptakan sebagai wujud untuk mengikuti perkembangan zaman, dan agar tetap relevan. “Melalui logo baru ini diharapkan memberikan spirit baru bagi Kereta Api Indonesia untuk mewujudkan visi berlandaskan pada nilai-nilai utama yang baru, yaitu AKHLAK: Amanah, Kompeten,

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” begitu bunyi rilis PT. KAI yang tercantum di *facebook* tersebut.

Logo baru ini berwarna biru tua dan oranye dengan sebuah garis pada huruf A. Garis pada huruf tersebut merupakan bentuk rel kereta. Garis ini dimaknai sebagai harapan agar PT. KAI terus maju, dan solusi bagi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Huruf *italic* dipilih pada A di logo baru ini menggambarkan karakter perusahaan, yakni progresif, berpikiran terbuka, dan tepercaya. Pemilihan warna oranye pada huruf A sebagai simbol antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sedangkan warna biru tua pada K dan I sebagai wujud stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri. Jadi, beragam warna yang terdapat pada logo baru PT. KAI itu bermakna sebagai harapan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam sebuah berita *online* pada 2 Oktober 2020, VP Public Relations PT. KAI, Joni Martinus, mengatakan, logo baru sebagai hadirnya visi dan budaya perusahaan yang baru, sehingga perlu diikuti dengan perubahan logo sebagai upaya transformasi yang berkelanjutan. “Hal demikian merupakan rangkaian transformasi

perusahaan dari berbagai aspek yang sudah terjadi sebelumnya,” ujarnya. PT. KAI berharap, perubahan logo akan semakin mengintegrasikan bisnis KAI Group dan memudahkan proses komunikasi dengan para *stakeholder*. “Terciptanya logo baru melalui proses pertimbangan yang matang dan mendalam,” tuturnya.

Gonta-ganti logo dan makna yang diungkapkan dari logo-logo yang pernah digunakan, menunjukkan PT. KAI sebagai perusahaan yang terus berkembang dan dinamis, meski menghadapi berbagai tantangan yang berat. Beratnya seperti bobot lokomotif kereta jarak jauh.

Terbentuknya PT. KAI ini bermula ketika Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, L.A.J. Baron Sloet van de Beele mencangkul tanah di Kemijen. Sekarang wilayah ini secara administrasi berada di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Baron mencangkul tanah bukannya berperan sebagai petani, namun pada 17 Juni 1864 itu di Kelurahan Kemijen itu ada acara *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api di Jawa, Indonesia.

Meski kehadiran Baron di acara itu mewakili pemerintah, namun pembangunan jalur kereta itu dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan swasta *Naamlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij* (NV. NISM). Pembangunan



Joni Martinus



jalur kereta sepanjang 26 km dari Kemijen menuju Temanggung itu di bawah pengawasan Ir. J.P. de Bordes. Proses pembangunan jalur kereta itu memakan waktu sekitar tiga tahun, dan pada 10 Agustus 1867 kereta api yang memiliki lebar jalur 1.435 mm itu sudah bisa melintas dan dibuka untuk umum.

Pembangunan jalur kereta api sebenarnya sudah muncul selepas masa Tanam Paksa, 1825 – 1830. Untuk mengangkut hasil tanam paksa berupa hasil perkebunan, sawah, ladang, dan hutan perlu angkutan. Meski ada jalan tanah, darat, namun sarana itu dikatakan tidak maksimal. Di samping untuk menangkut hasil bumi, jalur kereta juga digunakan untuk keperluan

dari Merak hingga Banyuwangi, dari Semarang hingga Magelang. Jalur kereta ini membentang dari ujung barat sampai timur, dan dari wilayah utara hingga selatan Jawa. Ditambah beberapa kota di luar Jawa, seperti di Sumatera, Madura, dan Sulawesi Selatan.

Pemain perkeretaapian di Jawa pun bukan hanya NISM dan SS, namun juga *Semarang Joana Stoomtram Maatschappij* (SJS), *Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS), *Serajoedal Stoomtram Maatschappij* (SDS), *Oost Java Stoomtram Maatschappij* (OJS), *Paseroean Stoomtram Maatschappij* (Ps.SM), *Kediri Stoomtram Maatschappij* (KSM), *Probolinggo Stoomtram Maatschappij*

Kedatangan Jepang di Jawa pada 1942 melalui invansi militer membuat keberadaan perkeretaapian menjadi terancam. Perusahaan kereta api milik swasta dan pemerintah Belanda dialih tangankan secara paksa. Perusahaan-perusahaan itu dilebur menjadi satu ke dalam *Rikuyu Sokyuku* (Dinas Kereta Api). Bila pada masa kolonialisme Belanda, mereka membangun jalur kereta api untuk kepentingan angkutan hasil bumi, penumpang, dan kepentingan militer, maka pada masa Jepang, semua aktivitas kereta api untuk kepentingan militer.

Meski Jepang di Jawa dan Sumatera membangun jalur kereta, yakni antara Bayah – Cikara sepanjang 83 km, dan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

militer. Alasan untuk kepentingan militer tersebut atas dasar proposal yang dibuat atau diajukan oleh Kolonel J.H.R. Carel Van der Wijck, pada 1840.

Investor pertama pembangunan kereta di Jawa adalah NISM, sebuah perusahaan swasta. 'BUMN' pemerintah baru ikut melakukan investasi pada 8 April 1875 melalui *Staatssporwegen* (SS). Pembangunan jalur kereta api yang dilakukan NISM dan SS berjalan sukses dan mendapat sambutan dari masyarakat. Karena dinilai sukses maka pembangunan jalur kereta api terus berlanjut. Kalau awalnya pada 1864 panjang jalur kereta yang berhasil dibangun 26 km, kemudian menjadi 3.338 km pada 1900, dan 6.811 km pada 1939. Jalur kereta itu menghubungkan kota-kota di Jawa, yaitu

(Pb.SM), *Modjokerto Stoomtram Maatschappij* (MSM), dan *Malang Stoomtram Maatschappij* (MS).

Investor kereta api tidak hanya tertarik membangun jalur kereta di Jawa, tapi juga di luar Jawa, seperti Sumatera, Madura, Sulawesi, Kalimantan, Lombok, dan Bali. Di luar Jawa yang sudah dibangun jalur kereta adalah di Aceh pada 1874, Sumatera Utara pada 1886, Sumatera Barat pada 1891, Sumatera Selatan pada 1914, Madura pada 1897, Makasar-Takalar pada 1923. Sedang untuk Kalimantan Barat, Bali, dan Lombok masih dilakukan studi lapangan. Sedangkan operator kereta di luar Jawa, yakni *Madoera Stoomtram Maatschappij* (Mad.SM), *Deli Spoorweg Maatschappij* (DSM).

antara Muaro – Pekanbaru sepanjang 220 km, namun Jepang membongkar jalur kereta yang sudah dibangun oleh Belanda sepanjang 901 km. Rel-rel yang ada itu diangkut ke Burma (Myanmar) untuk pembangunan kereta di sana. Salah satu bentangan yang dibongkar adalah jalur dari Ponorogo - Badegan.

Meski Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun proses 'nasionalisasi' aset-aset kereta milik perusahaan swasta dan pemerintah Belanda tidak gampang. Jepang sudah kalah perang, namun pasukannya di Indonesia masih menguasai objek-objek strategis.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Merasa sudah merdeka maka bangsa Indonesia menyatakan bahwa aset-aset milik asing menjadi milik Indonesia. Untuk melakukan hal itu, pada 2 September 1945, para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API) mengadakan pertemuan dengan sebagian buruh Djawatan Kereta Api (DKA). Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Menteng 31, Jakarta, itu di mana API diwakili oleh Wikada dan DKA diwakili oleh Legiman Harjono, menghasilkan kesepakatan untuk merebut stasiun dan isinya.

Esoknya, 3 September 1945, sekitar pukul 09.30 hingga 12.00, anggota API dan buruh DKA melakukan aksi perebutan dan pendudukan pada stasiun-stasiun di Jakarta, yakni Stasiun Jatinegara, Manggarai, Tanjung Priuk, Beos (Jakarta Kota), Gambir, dan Pasar Senen. Mereka tidak

hanya menguasai bangunan stasiun, namun juga aset-aset lainnya, seperti lokomotif, gerbong, bengkel, dan lain sebagainya. Tentu untuk menguasai stasiun-stasiun besar itu tidak mudah. Mereka harus bentrok dengan tentara Jepang.

Setelah terjadi beberapa rangkaian peristiwa maka pada 28 September 1945 Ismangil dan beberapa pemuda kereta api Indonesia membacakan ‘Proklamasi Kereta Api Indonesia’. Proklamasi itu berbunyi: Mulai 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. “Proklamasi” pada 28 September 1945 inilah yang dijadikan dasar untuk menetapkan Hari Kereta Api di Indonesia. Pada tanggal, bulan, dan tahun

itu juga dibentuk Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Di luar DKARI ada *Kereta Api Soematra Oetara Negara Repoeblik Indonesia* dan *Kereta Api Negara Repoeblik Indonesia*. Dua operator itu berada di Sumatera.

Masalah perkeretaapian di Indonesia belum selesai. Jepang memang sudah pulang kampung, namun Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia lewat pasukan Sekutu. Salah satu misi pasukan Sekutu adalah menguasai aset perkeretaapian yang ada dan selanjutnya diserahkan kepada SS.

Pada 1946, perusahaan kereta api pemerintah, SS; dan *Verenigde Spoorwegbedrijf* (VS), menghimpun diri dalam wadah (SS/VS). VS merupakan gabungan dua belas operator kereta api swasta. Mereka berfusi pada satu perusahaan, dengan alasan karena situasi tidak memungkinkan bila berjalan sendiri-sendiri untuk menguasai aset yang sudah dinasionalisasi oleh bangsa Indonesia.

Upaya merebut aset dengan kekuatan fisik rupanya tidak berhasil, sehingga dilakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Desember 1949. Menurut sejarah seperti dikutip dari *kai.id*, berdasarkan perjanjian KMB maka dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia-Belanda. Pengalihan itu dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950.

Setelah terjadinya kesepakatan itu, perkeretaapian di Indonesia tidak lagi gaduh dengan Jepang dan Belanda. Buktinya, DKA dari waktu ke waktu melakukan reorganisasi. Pada 25 Mei 1963, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada 1971, PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Tak berhenti di situ, pada 1991, PJKA diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Dan, selanjutnya pada 1998 menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). □

AWG/dari berbagai sumber





# Berkembang dengan Kereta Commuter

Meningkatnya pelayanan Kereta Commuter di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung, Lebak, tercatat jutaan orang menggunakan moda transportasi ini. Standar pelayanan yang diberikan sudah tidak kalah dengan pelayanan kereta serupa di Singapura dan Kuala Lumpur. Setelah di Jabodetabek, PT. KCI juga mengembangkan diri di Yogyakarta, Solo, dan Banten.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**T**AMPAK puluhan bahkan ratusan orang bergegas ke jalur 5 setelah turun di jalur 1 di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka pindah dari jalur 1 ke jalur 5 untuk melanjutkan perjalanan ke arah Stasiun Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, bahkan Angke. Ada pula yang menuju ke jalur 7 atau jalur 8 untuk mereka yang hendak bepergian ke Depok, Nambo, Bogor, serta stasiun sebelum dan sesudah-

nya. Suasana itu khusus terlihat di saat pagi hari atau jam-jam masuk kerja. Setiap hari ribuan orang lalu lalang di stasiun itu.

Stasiun Manggarai merupakan stasiun transit yang menghubungkan ke berbagai stasiun besar dan kecil yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, bahkan sampai Lebak dan Cikarang. Di sini, setiap saat pada jam operasional, kereta mengalir tak putus-

putusnya. Maka tak heran, kalau banyak kalangan menyebutkan, Stasiun Manggarai merupakan stasiun tersibuk dalam pelayanan KRL (Kereta Rel Listrik) atau Kereta Commuter. Setiap hari tercatat ratusan perjalanan KRL, singgah dan melanjutkan perjalanan di stasiun yang dibangun pada 1914 ke stasiun-stasiun lainnya.

Kesibukan KRL di stasiun Manggarai dan stasiun-stasiun lainnya menyebabkan jasa pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan profesional. Standar pelayanan yang diberikan sudah tidak kalah dengan pelayanan kereta serupa di Singapura, Kuala Lumpur, dan Tokyo. Bila dulu menunggu KRL penuh *gregetan* sebab terlalu lama, namun saat ini hal demikian tak dirasakan lagi. Jeda waktu menunggu tidak sampai 5 menit untuk jalur-jalur sibuk.

Suasana dalam gerbong, stasiun, dan cara pembayaran pun sudah maju sehingga proses keluar masuk stasiun terasa lebih cepat dan tertib. Proses pelayanan KRL yang demikian tentu terjadi tidak dalam satu malam. Masyarakat pasti pernah merasakan bagaimana susah dan pahitnya pelayanan kereta di wilayah Jabodetabek. Gerbong kereta penuh sesak, sehingga saat naik dan turun mengalami kesulitan. Penumpang juga banyak yang bertengger di atas gerbong, dan juga di sambungan kereta. Akibatnya, saat kereta jalan dengan kecepatan tinggi, pintu tidak ditutup. Bobroknya pelayanan kereta api, saat itu, tak hanya sebatas itu. Di dalam gerbong kereta banyak pedagang dan pengamen mengganggu kenyamanan. Begitu pula copet setiap saat mengincar barang milik para penumpang lengah. Belum lagi, banyak penumpang yang tidak bayar alias memiliki tiket.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Era pelayanan kereta api yang tak sedap itu telah berakhir. Munculnya pemimpin-pemimpin yang inovatif, kreatif, dan tegas, membuat KRL berbenah. Dalam *krl.co.id*, sejarah dari KRL diawali dengan dibentuknya Divisi Angkutan Perkotaan oleh PT. KAI. Divisi ini terpisah dari PT. KAI Daop 1 Jakarta. Pembentukan divisi baru itu akhirnya membagi tugas: Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek mengelola pelayanan KRL, sedang PT. KAI Daop 1 mengurus pelayanan kereta jarak jauh dan jarak menengah.

Dalam perkembangan selanjutnya, badan yang bernama Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek dijadikan perseroan terbatas dengan nama PT. KCJ (PT. KAI Commuter Jabodetabek). PT KCJ dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. PT KCJ resmi menjadi anak perusahaan PT. KAI pada 15 September 2008.

PT. KCJ baru mendapatkan izin usaha No. KP 51 Tahun 2009 dan izin operasional penyelenggara sarana perkeretaapian No.

KP 53 Tahun 2009. Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. PT. KCJ mempunyai tugas menyelenggarakan perusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api commuter dengan menggunakan sarana KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya, serta perusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang.

Pembentukan Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek dan selanjutnya menjadi PT. KCJ, disebut sebagai keinginan untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks.

Dinamika pun terjadi dalam pengelolaan PT. KCJ. Pada 2011 terjadi penyederhanaan rute, KRL Ekspres Gambir-Bogor langsung dihapus. Menyediakan kereta khusus wanita, dan mengubah nama KRL Ekonomi-AC menjadi kereta Commuter Line. Langkah itu dibarengi dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana, termasuk jalur kereta dan stasiun kereta

yang dilakukan bersama PT. KAI dan Pemerintah.

Setelah sukses menata di dalam, selanjutnya PT. KCJ melakukan pembenahan dalam pembayaran pelayanan. Pada 1 Juli 2013 diterapkan sistem tiket elektronik (*e-ticketing*) dan sistem tarif progresif. Langkah-langkah ke dalam dan keluar itu merupakan kebijakan untuk modernisasi PT KCJ.

Pada 19 September 2017 terjadi perubahan yang sangat berarti pada perusahaan ini, yakni nama PT. KCJ diubah menjadi PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI). Proses pergantian nama mengacu pada risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada 7 September 2017. Pergantian nama ini juga telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019228.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

Dalam *krl.co.id* dituliskan, hingga Desember 2019, KCI memiliki 1.100 unit KRL dan akan terus bertambah. Sepanjang 2019, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 168 unit. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Selama 2019, rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 979.853 pengguna pada hari kerja, dengan rekor terbanyak yang dilayani dalam satu hari mencapai 1.154.080 pengguna.

Sebagai operator sarana, kereta Commuter Line yang dioperasikan PT. KCI saat ini melayani 80 stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km.

Sejak 1 Oktober 2020, PT. KAI menugaskan KCI untuk mengoperasikan kereta api lokal di wilayah Daop 1 Jakarta, dan Daop 6 Yogyakarta. Dalam tahap awal kereta api lokal yang dikelola PT. KCI adalah KALokal Merak Jaya relasi Rangkasbitung-Merak pp di wilayah Daop 1 Jakarta, dan KA Prambanan Ekspres relasi Kutoarjo-Yogyakarta-Solo Balapan pp di wilayah Daop 6 Yogyakarta. □

AWG/dari berbagai sumber



# Kereta Juga Memberi Pelayanan Sektor Wisata

Jalur-jalur rel kereta yang menuju ke berbagai kota dimanfaatkan oleh PT. KAI untuk ikut menikmati potensi sektor wisata. Selain menyediakan gerbong mewah, penumpang juga ditawarkan jalan-jalan ke tempat wisata populer, kuliner, dan belanja.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

INDONESIA adalah negara kaya dengan tempat wisata, baik wisata alam maupun budaya. Di sekujur Pulau Jawa, dari ujung barat sampai timur, dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur, berjajar tempat wisata dengan aneka rupa. Hal demikian merupakan potensi ekonomi bagi pemerintah dan swasta untuk menghasilkan keuntungan.

Berbagai jasa transportasi yang melayani wisata telah tersedia dan disediakan oleh

pemerintah dan swasta. Untuk menuju ke tempat wisata tersedia sarana transportasi umum berupa mini bus, bus, kereta, kapal laut, dan pesawat terbang. Mana yang dipilih, semua tergantung pada jarak yang hendak ditempuh, harga tiket, dan soal kenyamanan saat di perjalanan. Pastinya masing-masing moda transportasi memiliki kelebihan masing-masing. Namun, ada sebagian masyarakat enggan naik bus, karena tak tahan bau bahan bakar. Kondisi

demikian semakin terasa bila jalan yang ditempuh berliku-liku, berkelok-kelok, dan naik turun.

Pun demikian bila naik pesawat terbang. Ada sebagian dari masyarakat yang mengalami akrofobia atau rasa takut di tempat ketinggian, serta alasan harga tiket yang mahal, serta jauh dari bandara. Sebagian juga ada yang takut naik kapal laut dengan alasan takut gelombang dan lamanya perjalanan bila naik angkutan yang terapung-apung di laut itu.

Masalah seperti itu memberi peluang bagi PT. KAI untuk menyediakan layanan kereta api pariwisata bagi masyarakat. Naik kereta bagi sebagian masyarakat terasa lebih nyaman. Tak ada bau bahan bakar, tetap di darat, dan bila bosan duduk bisa jalan ke Kereta Makan atau gerbong lainnya. Naik kereta, terutama di siang hari, bisa menyaksikan pemandangan di kanan kiri di sepanjang perjalanan, seperti sawah yang hijau, ladang, gunung, bukit, pantai, dan sesekali perkampungan penduduk, dan kota.

Peluang pariwisata di Indonesia tersebut dimanfaatkan oleh PT KAI dengan membentuk PT. Kereta Api Pariwisata (*Indorailtour*) pada 2009. Menurut *indorailtour.com*, KAI Wisata merupakan pelopor pariwisata berbasis kereta api di Indonesia. Produk jasa atau layanan yang ditawarkan meliputi paket-paket wisata menggunakan kereta api sebagai transportasi utama, didukung dengan angkutan lanjutan, serta layanan penunjangnya seperti *ticketing domestik* dan internasional, membuat paket wisata baik bagi individu maupun kelompok, akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan (paspor, visa, dan asuransi), dan lain sebagainya.

Layanan kepada masyarakat yang diberikan KAI Wisata, selain tempat wisata yang ada, juga gerbong mewah. Gerbong yang mewah tersebut bernama Kereta





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Wisata. Kereta Wisata ini terdapat beberapa layanan, yakni: *Kereta Bali*, *Nusantara*, *Toraja*, *Jawa*, *Sumatera*, *Imperial*, dan *Priority*. Dalam *Kereta Bali*, misalnya, fasilitas di dalam gerbong berupa interior kereta kental dengan nuansa budaya Bali. Didesain secara cantik dan apik dengan ukiran serta lukisan yang bernuansa Pulau Dewata. Kereta wisata Bali bernomor seri S.67801 memiliki 20 tempat duduk eksklusif dalam 2 ruangan, 16 tempat duduk terletak di Meeting Room, dan 6 tempat duduk di ruangan khusus (kabin). Fasilitas lainnya seperti Mini Bar, kamar mandi (toilet), Audio/Video dan pendingin ruangan (AC) tersedia di dalam kereta ini.

Sedang pada *Priority* dilengkapi dengan LCD TV layar sentuh pada tiap kursi, sehingga selama perjalanan penumpang dapat menikmati ragam pilihan hiburan audio dan video. Selain kursi yang sudah dilengkapi meja portable, tersedia juga power socket di sebelah kursi sehingga selama perjalanan Anda tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dengan laptop atau gadget lainnya. Penumpang dapat bersantai dengan kenyamanan kursi ergonomis dengan ruang kaki yang lapang. Fasilitas lainnya, yakni karaoke system, mini bar (termasuk makanan dan minuman), bagasi (20 kg), dan toilet.

Seperti ditulis dalam *Wikipedia*, KAI Wisata menyelenggarakan pengoperasian kereta api di Museum Kereta Api Ambarawa. Juga mengoperasikan sejumlah fasilitas operasi stasiun seperti Anggrek *Executive Lounge* di Stasiun Yogyakarta, serta *Rail*

*Transit Suite* di Stasiun Gambir.

Dalam *indorailtour.com*, KAI Wisata menawarkan jalan-jalan ke Cirebon. KAI Wisata mengajak penumpang mengenal Cirebon, terutama destinasi wisata yang bisa dikunjungi mulai dari obyek wisata religi, wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja, hingga hal menarik yang perlu diketahui.

Tempat wisata religi yang ada di Cirebon adalah Makam Sunan Gunung Jati. Di sini, selain dimakamkan Sunan Gunung Jati (Syekh Syarif Hidayatullah) juga terdapat makam Fatahillah, Panglima Perang Pembebasan Batavia. Makam ini terletak di Desa

Astana, 6 km ke arah utara dari Kota Cirebon. Masih di Cirebon, juga terdapat Makam Pangeran Cakrabuana (Mbah Kuwu Sangkan), salah seorang pemimpin tertinggi di wilayah Cirebon. Selain sebagai tokoh masyarakat, Pangeran Cakrabuana juga sangat disegani karena ilmu pengetahuannya. Makam yang terletak di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, atau 5 km dari Kota Sumber.

Tawaran ke Yogyakarta pastinya lebih banyak, sebab kota ini merupakan kota budaya dan wisata. KAI Wisata di kota pelajar ini menawarkan jalan-jalan ke Masjid Kotagede, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta. Juga kuliner ke Bakmi Jawa, Gudeg, dan jalan-jalan ke Malioboro.

Bila para penumpang saat wisata ingin mengetahui sejarah perkeretaapian di Indonesia, maka penumpang akan diajak ke Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di Ambarawa terdapat Museum Kereta Api Indonesia. Selain memperoleh penjelasan tentang asal mula kereta api di Indonesia, para peserta wisata juga bisa menikmati perjalanan wisata dengan naik Kereta Api Wisata relasi Ambarawa-Tuntang (pp) dengan lokomotif penarik jenis lokomotif uap maupun kereta diesel vintage. Juga terdapat rute Kereta Api Wisata Ambarawa-Jambu-Bedono (pp) yang menggunakan lokomotif uap bergigi melewati rel bergerigi. Rel bergerigi tersebut satu-satunya yang masih aktif di Indonesia. □

AWG/dari berbagai sumber





## Ujang Sahudin

Pelaku UMKM

### Pelaku UMKM Butuh Dukungan

**S**EBAGAI pelaku usaha kecil, makanan dan jajanan, di daerah Cianjur, Jawa Barat, saya termasuk yang sangat terpuak dengan bencana pandemi virus Corona ini. Sudah enam bulan lebih, sejak virus menyebar dan ada pembatasan-pembatasan, usaha saya merugi terus.

Modalpun makin menyusut. Saya harus putar otak untuk mengakali itu semua. Kalau tidak begitu, usaha saya bakal tutup. Untuk itu, saya sangat mendukung berbagai program, dari mana saja, untuk membantu rakyat kecil seperti saya ini.

Bantuan-bantuan tersebut, terutama bantuan modal, sangat membantu kami untuk terus menjalankan roda usaha, dan tentunya berusaha menghidupi keluarga di rumah. Saya melihat beberapa pejabat pun banyak yang turun langsung membantu kami.

Seperti dilakukan Bapak Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR, menyambangi pelaku usaha kecil langsung di tempatnya. Saya harap banyak pejabat yang turun langsung membantu kami. Saya juga berharap banyak program pemerintah untuk kami. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Markudin

Pedagang Batagor

### Bersyukur diberi Bantuan Modal Usaha

**S**AYA jualan batagor di depan sekolah, di Jl. Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Sebagai pedagang kecil, saya sangat bersyukur diberi bantuan modal usaha oleh pejabat Negara, yakni Bapak Syarief Hasan sebagai Pimpinan di MPR Jakarta.

Bantuan tersebut untuk menambah modal saya, karena selama wabah virus ini modal saya selalu habis, sedangkan untung tidak didapat. Kalau biasanya, sebelum wabah, saya sehari bisa mendapatkan sekitar 300 sampai Rp 500 ribu, tapi selama wabah kalau mendapatkan omset sekitar Rp 100 ribu sehari sudah bagus.

Sebagai orang kecil, saya berharap agar para pejabat negara kita, sering-sering tengok kami di masa wabah ini. Kami sangat harapkan bantuan-bantuan yang ada janganlah dipersulit. Agar dipermudah begitu. Pokoknya, jangan berbelit-belit, harus urus ini urus itu yang menghabiskan waktu saja.

Terakhir, sekali lagi, terima kasih untuk bantuannya kepada pedagang kecil. Modal ini akan saya gunakan buat tambahan modal. Tidak akan saya pakai untuk beli rokok, seperti pesan Bapak Syarief Hasan. □

DER

Sosialisasi R2C Bali

# Pimpinan MPR Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan

Pimpinan MPR berharap masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan begitu, maka masalah bangsa ini akan cepat selesai



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum usai. Bahkan di beberapa daerah, penularan virus masih tinggi. Untuk itu, Fadel mengajak kita agar selalu menjaga kesehatan diri dan mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dalam segala kegiatan di luar rumah.

“Menurut informasi dari para dokter, virus corona penularannya sangat cepat. Jika virus ini masuk ke tubuh, sedangkan daya tahan tubuh atau imun lemah maka virus akan mengganggu organ-organ tubuh kita. Itu sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Denpasar, Bali, Rabu (2/9/2020). Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Riyadhoh dan Rihlah Club (R2C) ini antara lain, anggota MPR dari Kelompok DPD Bambang Santoso, Ketua Umum R2C H. Eky Cules, dan ratusan peserta yang mewakili beberapa ormas, antara lain HMI, KAMMI, serta masyarakat umum.

Fadel menyatakan, sangat prihatin dan khawatir terhadap dampak

pandemi ini. “Kesehatan masyarakat pasti terganggu. Selain itu, pandemi juga berdampak pada perekonomian. Contohnya di Bali ini. Dunia pariwisata yang menjadi andalan pulau Dewata sangat terpukul. Hotel-hotel, restoran, usaha-usaha rakyat banyak yang tutup. Masyarakat sudah mendesak pemerintah untuk berbuat





sesuatu,” ujarnya.

Namun, Fadel menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan berputus asa dalam menghadapi situasi pandemi ini. Pemerintah sedang berupaya keras melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan penyebaran virus. Salah satunya dengan pembuatan vaksin.

Fadel menyatakan, akan ada tiga jenis vaksin, yakni vaksin dari luar negeri, vaksin kombinasi hasil kerjasama alih teknologi luar negeri dengan Indonesia, dan satu lagi vaksin buatan dalam negeri. Kabar terakhir, vaksin-vaksin ini dalam tahap ujicoba. “Saya sebagai Pimpinan MPR berharap, vaksin segera selesai dan cepat didistribusikan kepada masyarakat. Kalau bisa bulan Oktober atau November tahun ini,” katanya. □

DER



## Sosialisasi Empat Pilar MPR di Tanah Datar

# HNW: Jangan Sangsikan Kesetiaan Warga Minang Terhadap Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**IHADAPAN warga masyarakat Sumatera Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang terhadap Pancasila dan NKRI. Karena pada kenyataannya banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Misalnya saja, Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan KH. Agus Salim. Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan dasar dan Ideologi Pancasila.

Menurut Hidayat, pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah. Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan baru, dia mengajak mereka untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia menyebut Moh. Yamin dan KH. Agus Salim merupakan anggota kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno, yang menghasilkan Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara,” tutur Hidayat.

Sedangkan Moh. Hatta adalah tokoh yang menerima keberatan

masyarakat Indonesia Timur terkait bunyi sila pertama Pancasila 22 Juni atau yang biasa disebut Piagam Jakarta. Bahkan Hatta jugalah yang mengajak tokoh-tokoh Islam berdiskusi, membahas keberatan masyarakat Indonesia Timur. Dari hasil diskusi itu lahirlah Pancasila 18 Agustus yang dipakai hingga saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR secara virtual saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM). Acara itu berlangsung di Aula Hotel Pagaruyung, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Senin (5/10). Ikut hadir anggota MPR Fraksi PKS Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, S.E., M.M.

Selain itu, lanjut Hidayat, ada juga tokoh Minang yang berjasa mengembalikan Indonesia ke bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), seperti yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus. Dia adalah M. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS. Berkat Mosi Integral M. Natsir yang disampaikan di hadapan Sidang Paripurna DPR RIS pada 3 April 1950, Indonesia kembali ke NKRI, menggantikan Republik Indonesia Serikat.



Provinsi Sumatera Barat di pentas nasional. Salah satu putra terbaik Indonesia dari Sumatera Barat adalah Wakil Presiden RI pertama Moh. Hatta.

Hatta, kata Sidi Hermanto, adalah sosok yang patut diteladani seluruh warga bangsa Indonesia. Dia adalah sosok yang memiliki hati besar, mau menghormati dan memperjuangkan keinginan kelompok kecil, termasuk yang berbeda pendapat dengan dirinya sekalipun.

"Hatta mau menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia Timur untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Padahal, teks Pancasila 22 Juni itu hasil kesepakatan dari berbagai kelompok yang ada saat itu, termasuk kelompok agamis dan nasionalis," kata Sidi Hermanto Tanjung. □

MBO

Selanjutnya jelang Pilkada Serentak 9 Desember, Hidayat mengingatkan, Indonesia merdeka pada 17 Agustus bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Karena itu, Hidayat mengajak warga bangsa Indonesia untuk tidak menjual murah kedaulatan yang dimilikinya. Jangan sampai hak suara milik masyarakat ditukar dengan sembako atau iming-iming uang lainnya.

"Pilihlah pemimpin terbaik di antara calon-

calon yang ada. Jangan menggadaikan kedaulatan kita kepada pemimpin yang tidak amanah, karena potensi kerugiannya sangat besar. Jadi, jangan memubazirkan hak pilih yang dimiliki. Dan, jangan pula menimbulkan klaster Covid-19 di lingkungan kita," pintanya.

Tak jauh beda dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Anggota MPR Fraksi PKS Dr. H. Sidi Hermanto Tanjung, S.E, M.M., juga memaparkan sejumlah tokoh-tokoh terbaik asal

## Sosialisasi Empat Pilar di Kabupaten Bogor

## Jadilah Generasi Yang Berkarakter Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM., MBA., atau biasa disapa Syarif Hasan mengungkapkan, pemuda dan pemudi Indonesia adalah harapan bangsa di masa kini dan di masa akan datang. Untuk mewujudkan itu, menurut Syarif Hasan, para pemuda harus menjadi generasi yang berkarakter Pancasila. "Hal tersebut sangat penting dan harus dimulai sejak dini. Sebab, dalam diri pemuda tersimpan potensi besar yang bisa menjadi kekuatan jika terus dikembangkan dengan baik," katanya.

Hal tersebut dikatakan Pimpinan MPR dari partai Demokrat ini dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di lapangan Demokrat Sport Center, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Dalam acara yang digelar oleh MPR bekerjasama dengan komunitas Pasukan Kang H. Anton S. Surattono (PASKHASS) Bogor ini hadir Sekretaris Fraksi Demokrat MPR Anton Sukartono Surattono, dan peserta dari kalangan pelajar se-Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut Syarif Hasan mengungkap-

kan, beberapa potensi tersebut adalah pantang menyerah, tidak ragu-ragu, dan konsisten. "Pergunakanlah potensi-potensi tersebut untuk mengangkat bangsa ini. Beranilah tampil menyuarakan persatuan, keadilan, kemanusiaan dalam setiap kesempatan. Jadikan itu kebiasaan," ujarnya.

Namun, kata Syarif Hasan, banyak dari



mereka kurang memaksimalkan potensinya tersebut. "Saya maklum. Kemungkinan karena kurang percaya diri, takut salah, takut gagal. Nah, untuk itu harus banyak latihan atau melihat contoh-contoh bagus. Jangan berat berat. Dari hal yang sederhana saja, seperti menghafal Pancasila," katanya.

Di tengah pemaparan, Syarif Hasan menguji keberanian para peserta dengan memberikan tantangan menyebutkan sila-sila Pancasila secara urut dan lengkap. Syarif Hasan seorang pelajar puteri langsung mengangkat tangan dan maju ke depan. Lalu dengan mantap dia menyebutkan sila-sila Pancasila. "Jawaban betul. Luar biasa anak muda kita ini. Ini adalah teladan baik buat semua," puji Syarif Hasan.

Selanjutnya, Syarif Hasan berpesan agar para pelajar tetap rajin menuntut ilmu pengetahuan dan tetap konsisten menyelaraskan intelektualitas dengan Pancasila sehingga akan muncul manusia Indonesia yang mampu menjawab berbagai masalah bangsa.



### Sosialisasi Empat Pilar di Kota Bogor Pancasila Hadir Khusus untuk Rakyat Indonesia

**W**AKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengungkapkan, keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara buat rakyat Indonesia sangat istimewa. Salah satu keistimewaan Pancasila adalah mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, kemampuan Pancasila tersebut sudah terbukti, Indonesia bertahan dari segala

permasalahan berat, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, berbagai konflik SARA yang terjadi di beberapa daerah, dan aksi terorisme serta radikalisme.

“Padahal perbedaan yang ada di Indonesia tidak sedikit. Logikanya, perbedaan yang banyak akan berpotensi besar bermasalah. Tapi, ternyata tidak berlaku di Indonesia,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang oleh MPR bekerjasama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Paguyuban Pekerja Bongkar Muat (P2BM), di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).

Mereka yang hadir dalam ini mematuhi

protokol kesehatan secara ketat, antara lain: Ketua Organda Kota Bogor Muhammad Ishak, Ketua P2BM Kota Bogor Freddy Djuhardi, serta anggota Organda dan P2BM, juga masyarakat sekitar sebagai peserta.

Pimpinan MPR dari partai Demokrat yang biasa disapa Syarif Hasan selanjutnya mengatakan, banyak negara yang tingkat perbedaannya tidak sekaya Indonesia sudah tercerai berai dan hancur. “Contohnya, Korea, Uni Soviet, Suriah. Kenapa seperti itu, karena mereka tidak mengenal dan tidak memiliki falsafah Pancasila,” ujarnya.

Melihat fakta-fakta tersebut, Syarif Hasan menegaskan bahwa Pancasila adalah kekuatan besar bangsa Indonesia, anugerah dari Sang Maha Pencipta. “Coba bayangkan kalau Indonesia tanpa Pancasila. Kehancurannya mungkin lebih besar dan Indonesia sudah lama hilang dari peta dunia,” tambahnya.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak semua anak bangsa untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap Pancasila. Juga rasa syukur tak terhingga kepada Tuhan Semesta Alam yang telah sudi mengirimkan Pancasila hanya untuk rakyat Indonesia. “Mulai sekarang jagalah selalu Pancasila sampai kapanpun demi kedamaian dan kesejahteraan Indonesia,” ucapnya. □

DER



## Pagelaran Wayang Golek

# Penanaman Nilai-nilai Empat Pilar di Desa Sukamanah



**P**ERTUNJUKAN Wayang Golek yang digelar di Balai Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (12/9/2020), berlangsung meriah. Meski harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang cukup ketat, tak mengurangi antusiasme ratusan warga masyarakat Desa Sukamanah dan sekitarnya menyaksikan kesenian Wayang Golek dengan lakon “Kesatria Daerah,” dibawakan dalang K. Ceceng Arifin. Di antara ratusan warga itu, juga tampak hadir Camat Megamendung Endi Rismawan, Kepala Desa Sukamanah Ismail bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH., anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), adalah penginisiasi acara pagelaran seni Wayang Golek di Desa Sukamanah ini. Bagi warga masyarakat Desa Sukamanah, politisi asal Sulawesi ini tak asing lagi. Dia sudah tiga tahun berdomisili di wilayah Desa Sukamanah, dan mengaku sudah menjadi bagian dari masyarakat setempat. Nah, dalam berbagai kesempatan, Sudding mengaku, sering berdiskusi dengan Kepala Desa Sukamanah, Ismail. Masalah yang didiskusikan, antara lain tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur, dan nilai adab kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Sukamanah.

“Alhamdulillah malam ini pagelaran seni budaya Sunda, Wayang Golek, bisa terlaksana di Desa Sukamanah,” ujar Sudding saat menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan pagelaran seni budaya itu. Jadi, kata Sudding, acara malam ini diadakan secara mendadak, tapi sudah dirancang jauh-jauh hari. Sebagai penyelenggara sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Sudding, MPR sering melaksanakan sosialisasi dengan berbagai metode, seperti diskusi, seminar, outbound, kemah Empat Pilar, dan sebagainya. Tapi, malam ini, di Desa Sukamanah, sosialisasi Empat Pilar MPR diselenggarakan dengan metode pagelaran seni budaya, dalam hal ini seni budaya

Sunda, yakni Wayang Golek.

Karena, menurut Sudding, dalam situasi memprihatinkan seperti saat ini, penanaman nilai-nilai Empat Pilar lewat kesenian lebih gampang diterima oleh masyarakat, dibanding lewat metode yang sifatnya satu arah. Bahkan, lanjut Sudding, sosialisasi dengan metode seni budaya justru dapat meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita. “Salah satu yang dapat menangkal virus corona ketika daya tahan tubuh betul-betul dalam kondisi prima,” ujar Sudding yang kehadirannya di lokasi acara disambutkan secara adat Sunda, *Mapak Pengagung*—sebuah prosesi penyambutan tamu kehormatan.

Sudding menegaskan, Empat Pilar ke-







hidupan berbangsa dan bernegara merupakan konsensus atau kesepakatan para pendiri bangsa. Kita sadar betul, bangsa kita adalah bangsa majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, juga agama. Wilayahnya terdiri dari jajaran pulau-pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga pulau Rote. Kondisi seperti itu, menurut Sudding, rentan terjadinya disintegrasi bangsa. Makanya, pada 28 Oktober 1928, pemuda/pemudi Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. "Peristiwa itu terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu menunjukkan cita-cita bersatu dalam keberagaman sudah ada sebelum Indonesia merdeka," katanya.

Untuk itu, Sudding mengingatkan, masyarakat yang plural, majemuk, hendaknya betul-betul dibangun dengan penuh kesadaran bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, kita adalah bangsa yang satu. "Ketika perbedaan ini dikelola dengan baik maka itu merupakan satu kekuatan bangsa ini dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi, ketika kemajemukan tidak dikelola dengan baik maka itu merupakan sumber perpecahan," ungkap Sudding.

Dalam kesempatan itu, Sudding tak lupa mengajak para hadirin yang menyaksikan pagelaran seni budaya ini untuk berdoa, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Dia berharap, di suatu saat kelak, ketika situasi

sudah kembali normal, pementasan seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini bentuk penanaman nilai Empat Pilar MPR untuk masyarakat Sukamanah, desa percontohan dan menjadi kiblat desa seluruh Indonesia. Seperti kata Ismail, kepala desanya, sudah ada 32 ribu kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia datang ke Sukamanah dengan tujuan melakukan studi banding.

Sebelumnya, Budi Muliawan, SH., MH., Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Biro Humas MPR, selaku panitia pelaksana menyatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode pagelaran seni budaya merupakan salah satu bentuk penerapan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal itu, negara wajib melestarikan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

"Maka, MPR atas inisiasi Pak Sudding, hadir pada malam hari ini, selain menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Empat Pilar MPR, juga sebagai bentuk tindakan nyata dalam melakukan pelestarian seni dan budaya yang ada di Indonesia," ungkap Wawan, sapaan akrab Budi Muliawan.

Dalam kesempatan itu, sarjana hukum lulusan Universitas Brawijaya, ini juga menyampaikan sedikit informasi tentang

lembaga negara yang bernama MPR. MPR periode 2019-2024 masuk lima besar lembaga negara yang dipercaya masyarakat, setelah TNI, Kepresidenan, Polri, dan KPK. Urutan ini, jelas Wawan, diperoleh dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. "Tentu ini membanggakan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja MPR sesuai dengan visinya sebagai Rumah Kebangsaan," ujar alumni program Pasca-sarjana Universitas Indonesia ini.

Bukan hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap MPR juga dapat diindikasikan bahwa pola pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah, serta pola kerja yang bersifat gotong royong juga didukung oleh masyarakat. Nilai-nilai ini, menurut Wawan, terkandung dalam Empat Pilar MPR. Untuk itu, dia berharap, melalui pagelaran Wayang Golek ini, nilai-nilai luhur bangsa dapat diinternalisasikan kepada masyarakat yang menyaksikan pertunjukan seni budaya tersebut.

Pagelaran seni budaya Sunda, Wayang Golek, di Desa Sukamanah ini ditandai dengan penyerahan tokoh wayang kepada dalang K. Ceceng Arifin. Tokoh wayang itu diserahkan oleh H. Sarifuddin Sudding, SH., MH., didampingi Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Biro Humas MPR RI, Budi Muliawan, SH.,MH. □

SCH

## PSB Desa Mekar Sari Jambi

# MPR Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan



**A**NGGOTA MPR RI dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Jambi. H.M. Syukur, SH., MH., melakukan pemukulan gong penanda dibukanya Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pagelaran Seni Budaya (PSB) Campur Sari. Acara tersebut berlangsung di halaman Balai Desa Mekar Sari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Ahad (20/9).

Ikut hadir pada acara tersebut, anggota MPR Ir. Stefanus BAN Liow, Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR RI Drs. Maifrizal M.Si., Kabag Akuntansi dan Verifikasi Setjen MPR Muhamad Jaya, Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro, SE., Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setyo Bhakti, Camat Sungai Bahar Hartono, SE., Kepala Desa Mekar Sari Makmur Budiyo, serta para kepala desa se Kecamatan Sungai Bahar.

Dalam sambutannya M. Syukur mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis seni budaya yang sangat banyak. Salah satu kelebihan seni budaya milik bangsa Indonesia tidak hanya menghibur, tapi juga memiliki nilai estetika dan tuntunan. Karena itu, seluruh kekayaan seni budaya Indonesia harus

senantiasa dijaga dan dilestarikan.

“Menjaga dan mempertahankan seni budaya bisa juga berfungsi untuk meminimalisir risiko negatif dari nilai-nilai asing yang terus masuk dan memberikan pengaruh pada generasi muda. Apalagi, saat ini, semakin banyak paham-paham dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk ke Indonesia tanpa melalui saringan apapun,” ujar M. Syukur mengingatkan.



Provinsi Jambi, kata Syukur, adalah provinsi yang menjadi miniatur bangsa Indonesia. Karena di Jambi terdapat hampir seluruh suku bangsa yang hidup di Tanah Air. Karena itu, masyarakat Jambi harus pandai-pandai menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai mengusik kerukunan yang sudah terjalin selama ini.

Terlebih, kata Syukur, sebentar lagi akan dihelat pemilihan kepala daerah yang rawan menimbulkan perpecahan terhadap keberagaman seni budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Karena itu, seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya mempertahankan persatuan. Jangan sampai pilkada malah merusak keberagaman hanya karena terjebak pada kepentingan sesaat.

“Mari kita terapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti selama ini diserukan oleh MPR, agar seluruh rakyat Indonesia mengamalkan Pancasila, dimulai dari hal-hal yang paling dekat. Misalnya, menjalankan ajaran agamanya secara baik dan penuh tanggung jawab. Serta menghormati umat agama lain melaksanakan ibadahnya,” kata M. Syukur.

Sebelumnya Kepala Biro Administrasi dan



Pengawasan Setjen MPR RI Drs. Maifrizal M.Si, menyambut gembira digelarnya acara seni budaya di Provinsi Jambi ini. Ia berharap, acara tersebut bisa menjadi ajang pertemuan, silaturahmi dan mempererat persatuan kesatuan di antara kelompok masyarakat.

“Jambi ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang hidup di Indonesia. Semakin sering ada pertemuan di antara masyarakatnya maka semakin besar pula rasa persatuan yang bisa dibangun. Dan, itu bisa mempersempit potensi perpecahan yang bisa muncul karena keberagaman kita,” ujar Maifrizal.

Sementara Kepala Desa Mekar Sari Makmur Budiyo mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan acara tersebut. Selain menghibur, kehadiran kegiatan sosialisasi Empat MPR dengan metode seni budaya di wilayahnya menjadi ajang pertemuan bagi kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Kehadiran anggota MPR dan pe-

merintah daerah juga menjadi kebanggaan tersendiri. Karena sudah lama, di wilayahnya tidak pernah dihadiri pejabat, baik pusat maupun daerah.

“Kami semua bangga mendapat kehormatan atas hadirnya tamu-tamu terhormat. Kami juga senang karena anak-anak muda dapat menyalurkan hobinya dalam berkesenian. Semoga, ini tidak menjadi kesempatan terakhir, mudah-mudahan ada acara lain yang juga bisa diselenggarakan di tempat ini,” kata Budiyo.

### Perubahan Cuaca

Rangkaian pertunjukan PSB Campur Sari dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR disambut dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Sebelum pukul 14.00, saat acara digelar, cuaca terasa sangat panas. Namun tiba-tiba mendung, tepat pada saat anggota MPR tiba di tempat acara, diiringi

tabuhan musik tradisional Tambau dari Padang.

Sejurus kemudian, setelah tarian dan prosesi penyambutan selesai mendung makin gelap, hingga akhirnya prosesi pembukaan pagelaran seni benar-benar diliputi hujan deras. Tetapi, hujan yang ditingkahi tiupan angin kencang itu hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, cuaca terasa lebih bersahabat, sinar matahari tidak lagi terasa panas.

Diiringi musik dan lagu-lagu campursari, enam penari perempuan muda segera melenggak-lenggok di hadapan tenda penonton. Kondisi ini memaksa penonton untuk langsung menyaksikan dari jarak dekat. Mereka merangsek ke tengah lapangan, tempat acara tersebut dihelat.

Suasana tersebut semakin riuh, saat para tamu tampil ke depan mengikuti lenggak lenggok penari. Diawali Kepala Desa Mekar Sari Makmur yang turun gelanggang ikut menari bersama para ledek. Lalu bupati dan pimpinan DPRD mengikuti di belakangnya. Kemudian, anggota MPR juga dipaksa untuk bergoyang sesuai irama campursari. Keadaan ini makin hiruk pikuk karena beberapa anggota masyarakat, ikut tampil ke depan menari bersama para tamu.

Selain campursari, pagelaran seni di Jambi ini juga menampilkan beberapa kesenian daerah lainnya, seperti kuda lumping dan karawitan. Kegiatan tersebut benar-benar meriah, saat penonton terus berdatangan, hingga jelang berakhirnya kegiatan. Puluhan pedagang pun ikut tersenyum, karena dagangan mereka jadi laris manis. □



MBO

Sosialisasi di Sukabumi

# HNW Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk KH. Ahmad Sanusi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendukung upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada pejuang dan ulama asal Sukabumi Jawa Barat, KH. Ahmad Sanusi. Dukungan itu diberikan, menurut Hidayat, karena Ahmad Sanusi merupakan sosok yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia.

KH. Ahmad Sanusi adalah salah seorang anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dia merupakan pendiri organisasi Persatuan Umat Islam. Keterlibatannya dalam upaya perlawanan terhadap penjajah dan per-

juangan kemerdekaan Indonesia sangat nyata. Buktinya, dia sempat ditahan oleh pemerintahan kolonialis.

“Teman beliau di BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo sudah terlebih dahulu mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada 2010. Karena itu, sudah sepatutnya jika KH. Ahmad Sanusi juga mendapat gelar Pahlawan Nasional, sebagai penghargaan atas darma bakti serta perjuangannya bagi kemerdekaan Indonesia,” kata Hidayat Nur Wahid secara daring.

Pernyataan itu dikemukakan Hidayat Nur Wahid (HNW) selaku narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di

kalangan masyarakat Sukabumi, Senin (28/9/2020). Sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Persaudaraan itu berlangsung di Sekretariat Yayasan Persaudaraan Jl. Pasar Baru Cisaat Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara tersebut, HNW hadir secara daring di lima tempat berbeda, yaitu: Kecamatan Pelabuhan Ratu, Cicurug, Cibadak, Sagaranten, dan Surade. Sementara narasumber lainnya, dr. H. Slamet, dan tokoh masyarakat Sukabumi TB. Soenmandjaja. Dan, hadir pula Ketua Yayasan Persaudaraan H. M. Shodiqin.

Hidayat berharap, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Ahmad Sanusi bisa mendorong warga Sukabumi, khususnya generasi milenial. Ini penting agar generasi muda lebih mengenal para pahlawan. Kalau generasi milenial mengenal para pahlawan diharapkan akan timbul rasa cinta yang semakin besar terhadap hasil-hasil perjuangan para pahlawan.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah kegiatan yang di dalamnya juga terkandung maksud melanjutkan upaya perjuangan kemerdekaan yang dulu dilakukan oleh para pahlawan, termasuk KH. Ahmad Sanusi. Karena itu kita patut menjaga dan melanjutkan perjuangannya, bukan malah merusaknya,” ungkap Hidayat.

Semangat dan nilai-nilai yang disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR, kata HNW, sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Karena Sosialisasi Empat Pilar ikut melestarikan hasil-hasil yang diperoleh secara susah payah diperjuangan para pahlawan.

Pada kesempatan tersebut, Hidayat tak lupa mengingatkan perlunya sikap kehati-hatian jelang Pilkada Serentak 9 Desember. Jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi itu malah menghasilkan klaster baru penyebaran Covid 19. Karena itu, Hidayat berharap, semua pihak mesti memerhatikan diri dan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. □

MBO



PSB Cianjur, Jawa Barat

# Syarief Hasan Ajak Seniman Jadi Pelopor Pengamalan Empat Pilar

**K**EGIATAN Pagelaran Seni Budaya (PSB) dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika terus gencar digelar MPR RI dengan mengangkat berbagai budaya di berbagai daerah di Indonesia. Tentu karena Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraannya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Seperti pagelaran seni budaya di aula Gedung Kesenian, Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (3/10/2020) dengan mengangkat tradisi Cianjuran 'Ngaos, Mamaos, Maenpo'. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.; Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi MPR Budi Muliawan, SH., MH.; dan Ketua Paguyuban Seniman Tradisional Kabupaten Cianjur Ook Mubarak.

Wakil Ketua MPR H. Syarifuddin Hasan, dalam sambutannya, mengajak para seniman di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengamalan Empat Pilar MPR, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara benar dan konsisten. Menurut Syarief Hasan, begitu politisi Partai Demokrat ini biasa disapa, ini sangat penting, sebab para seniman adalah penjaga budaya bangsa yang dalam praktik kesehariannya sudah sangat terbiasa dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR, seperti menghormati keberagaman dan saling menghargai satu sama lain.

Para seniman juga sangat kental nasionalismenya, karena di era modern sekarang ini masih konsisten menjaga budaya daerahnya masing-masing. "Hal baik tersebut harus ditularkan kepada masyarakat luas. Makanya, peran mereka menjadi pelopor pengamalan Empat Pilar MPR menurut saya sangat luar biasa," katanya.

Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menegaskan, jika seluruh rakyat Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

apa yang ada dalam Empat Pilar MPR tersebut maka itu akan menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama membawa bangsa ke arah lebih baik. Bahkan, bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama atau lepas 100 tahun Indonesia merdeka, Republik ini akan menjadi salah satu negara maju di dunia.

"Saya meyakini itu. Dan, saya percaya masyarakat Cianjur bersama-sama masyarakat daerah lainnya akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada kemajuan bangsa di masa depan itu. Khusus untuk para seniman Cianjur, saya apresiasi dan mendukung kegiatan pelestarian budaya yang terus dijaga. Semoga eksistensi budaya Cianjur akan lebih cemerlang," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyampaikan bahwa penyelenggaraan pagelaran seni budaya ini adalah salah satu metode penyampaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan merupakan metode penyampaian yang efektif. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga budaya daerah yang sangat beragam agar tidak punah.

Dipilihnya seni dan budaya Ngaos, Mamaos, Maenpo, ini, lanjut Siti Fauziah, karena merupakan tradisi luhur bahkan sudah sangat lekat dengan masyarakat

Cianjur. Tradisi budaya ini juga sangat pas dengan Empat Pilar MPR.

"Pelestarian budaya daerah sangat penting untuk rakyat, terutama generasi muda bangsa. Saya berterima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI, Bapak Syarief Hasan, di tengah kesibukannya menyempatkan hadir dan mengapresiasi budaya daerah," katanya.

MPR, lanjut Siti Fauziah, berharap agar kesenian Cianjur ini terus dikembangkan dengan baik. Sebab, di dalam seni budaya daerah bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi di dalamnya ada tuntunan serta nilai-nilai yang kemudian bisa menjadi teladan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pagelaran Seni Budaya kemudian berlangsung lancar. Diawali dengan pertunjukan seni suara yang membawakan lagu tatar Sunda, dilanjut dengan pertunjukan bela diri atau pencak silat khas Cianjur. Yang lebih menarik perhatian penonton adalah pertunjukan lawak daerah dibawakan Cacu, Sarip, dan Iwan dari sanggar Sekar Panghegar. Lawakan segar trio ini sanggup memancing tawa pengunjung. Sesekali mereka menyelipkan pesan Empat Pilar di tengah-tengah pertunjukan. □

DER

## Sosialisasi DMI Jakarta Pusat

# Dewan Masjid Bisa Jadi Pionir Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan, banyak istilah dalam Alquran dan Al-Hadits yang diadopsi ke dalam Pancasila. Ini menjadi bukti bahwa peran ulama dan umat Islam bersama tokoh bangsa lainnya dalam proses pembentukan dan penyusunan Pancasila.

“Apabila kita memahami Pancasila secara

yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Hidayat menambahkan, apabila ada pandangan Islamophobia yang menuduh umat Islam anti Pancasila atau anti NKRI maka tuduhan tersebut jelas tidak benar dan bertentangan dengan fakta sejarah. Tetapi, umat Islam sendiri perlu memahami Pancasila dan NKRI dengan spirit pengenalan fakta sejarah kontributif ini. Sehingga umat Islam bisa memahami Pancasila dan NKRI dengan

Begitu pula umat Islam juga perlu memahami bahwa Indonesia Merdeka, Pancasila, dan NKRI adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah, dan tadhhiyyah (pengorbanan) dari ulama, baik dari ormas maupun orpol. Maka seharusnya umat Islam, termasuk Pengurus Dewan Masjid, akan menjaga warisan perjuangan ini agar tidak diselewengkan, sehingga menjauh dari fakta-fakta sejarah itu. Atau menjauh dari cita-cita Indonesia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

seksama, di situ akan ditemukan istilah adil, rakyat, hikmah, adab, wakil, hingga musyawarah. Itu semua bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari Bahasa Arab dan termuat dalam Alquran dan juga Hadis Nabi. Istilah “adil” dan “rakyat” malah disebut berulang-ulang di dalam Pancasila,” ujarnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerjasama dengan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Pusat di Jakarta, Senin(21/9).

Istilah-istilah itu menjadi bukti keterlibatan tokoh umat Islam bersama tokoh bangsa dari beragam latar belakang, dalam proses pembentukan dasar negara. Bukan hanya terkait dengan personilnya saja (di mana ada banyak ulama dari berbagai ormas dan orpol Islam yang ikut dalam pembahasan di BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI), tetapi juga secara istilah dan konsep, mereka perjuangankan hingga diterimanya terminologi dan nilai-nilai

benar, bukannya malah salah paham terhadap Pancasila dan NKRI.

HNW lalu menunjuk fakta sejarah, para ulama, baik dari Ormas Islam seperti Muhammadiyah (dengan tokohnya KH. Kahar Muzakki, Ki Bagus Hadikusumo) dan NU (KH. Wahid Hasyim) maupun ulama yang terhimpun dalam partai politik Syarikat Islam dan Penyadar (H. Abikusno Tjokrosujoso dan H. Agus Salim) bersama tokoh bangsa lainnya, terlibat secara aktif dan konstruktif menghadirkan Pancasila. Sehingga, banyak istilah dalam Alquran dan Hadis diterima dan digunakan dalam Pancasila.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, semua sila Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan aqidah ataupun syariat Islam. “Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila seperti ini, saya berharap, terkoreksilah mereka yang salah paham terhadap umat Islam,” lanjut HNW.

Merdeka yang disepakati oleh Founding Fathers and Mothers.

“Umat Islam juga jangan menjadi Indonesiophobia, antipati dengan negerinya sendiri, karena mengira bahwa hadirnya Negara Indonesia ini tidak ada hubungannya dengan peran dan jasa tokoh umat Islam. Pemahaman seperti ini penting juga untuk para aktivis dan pengurus Masjid. Sehingga akan berdampak positif bagi peran masjid dan para pengurusnya untuk menjaga masalah umat, menguatkan NKRI, dan terlaksananya Pancasila dalam kehidupan nyata, seperti dalam kegiatan di masjid,” tukasnya.

Apabila sejarah tersebut dipahami dengan baik dan benar maka para pengurus dan aktivis masjid bisa menjadikan masjid sebagai wasilah dan sarana pengamalan ajaran Islam moderat yang berorientasi tauhid, melaksanakan ajaran agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin –manusiawi, adil dan

beradab. Mementingkan ukhuwah dan persatuan, mengedepankan prinsip inklusif dengan hikmat dan permusyawaratan, serta kepedulian untuk menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi jamaahnya dan bagi umat. Semua sesuai dengan sila-sila Pancasila.

### Memakmurkan Masjid

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, jika semua berjalan lancar akan terkoreksilah kesalahpahaman terhadap umat Islam dan relasinya dengan Pancasila dan NKRI. Dan, terkoreksi pula kesalahpahaman sebagian kecil umat akan relasi Indonesia dengan umat Islam. Juga terkoreksi pula pihak yang sempat mencurigai aktivis masjid yang bisa bahasa Arab, hafidh Alquran yang diistilahkan *goodlooking*, sebagai agen penyebaran radikalisme via masjid. Kecurigaan tidak benar, basisnya adalah Islamophobia.

HNW berharap, aktivis masjid yang

tergabung dalam DMI sesudah mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini bisa semakin fokus melaksanakan kegiatan memakmurkan masjid dan agenda dakwahnya, karena itu juga sejalan dengan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. “Apalagi UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa menjalankan ajaran agama adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara,” tegasnya.

Sekali lagi HNW menegaskan, agar para aktivis masjid memperoleh pemahaman yang utuh terkait peran ulama, umat, dan umaro (para sultan), bersama tokoh bangsa lainnya telah berjasa menghadirkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang sudah dimulai sejak dia menjabat sebagai Ketua MPRI RI pada periode 2004-2009. Dan, dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, MPR selalu bekerja sama dengan seluruh komponen

bangsa, seperti ormas keagamaan, kampus, sekolah, pondok pesantren, lembaga-lembaga negara, dan lainnya. .

Hidayat menambahkan, sosialisasi Empat Pilar ini penting agar umat dan bangsa makin memahami konsensus dasar dalam bernegara, agar makin cinta dengan Indonesia (sejarah, dasar negara, dan cita-citanya). Juga dapat mengatasi tantangan zaman, mengisi peluang kebaikan ke depan. Serta, mengantisipasi penyimpangan, seperti separatisme, terorisme, neo-kolonialisme, komunisme dengan pemberontakan PKI-nya.

Atau mereka yang “diam-diam” mencoba mengubah esensi Pancasila yang telah final sejak 18 Agustus 1945 menjadi Trisila atau Ekasila, seperti pernah muncul dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Untuk itu, HNW berharap, hal-hal yang menyimpang itu bisa dikoreksi oleh umat dan bangsa agar tidak lagi terjadi. □

MBO

## Sosialisasi dengan Pena Bakti Institute

# Kunci Kemajuan Bangsa Tersedianya SDM Berkualitas

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, salah satu faktor kunci mewujudkan kemajuan bangsa adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam konsepsi ini, patut disyukuri bahwa pembangunan SDM telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan.

“Langkah pemerintah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama selaras dengan kebutuhan kita untuk dapat bertahan dalam pusaran persaingan global. Saat ini, kita sedang dihadapkan pada era di mana lompatan kemajuan teknologi ‘memaksa’ untuk terus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, dan ketersediaan SDM unggul adalah sebuah keniscayaan,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pena Bakti Institute secara



virtual di Jakarta, Sabtu (17/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, konstitusi telah memberikan landasan legalitas yang kuat dan arah yang jelas

dalam hal pendidikan. Sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan dibentuknya





## Sosialisasi di Kalangan Riders

# Pimpinan MPR Ajak Para Pemotor Terapkan Empat Pilar MPR RI

INDONESIA dibangun di atas nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat. Cerdik cendekia, tokoh agama, rakyat biasa, hingga para raja, semua berpartisipasi membantu perjuangan Indonesia. Salah satu kaum bangsawan yang ikut membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia adalah Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II. Dia adalah Sultan ke -12, Kasultanan Siak Indrapura.

Sultan Syarif Kasim II dikenal sebagai raja yang pro terhadap perjuangan Indonesia. Salah satu buktinya, Sultan Syarif Kasim II menyatakan bahwa Kasultanan Siak merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyumbangkan hartanya sejumlah f 13 juta Gulden atau sekitar Rp 1,3 triliun kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Kasim II juga menyerahkan mahkota raja untuk di sumbangkan kepada pemerintah Indonesia.

“Sejarah seperti ini harus disebarluaskan, khususnya kepada generasi muda. Agar mereka paham bahwa Indonesia merdeka merupakan buah perjuangan dan pengorbanan seluruh warga negara. Harapannya, setelah mereka mengetahui sejarah ini maka timbullah rasa makin cintanya pada negara,” kata Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA., secara daring kepada puluhan Riders Pulau Bintan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu (17/10/2020).

Pada acara Temu Tokoh Nasional yang berlangsung di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan itu, Hidayat Nur Wahid memang termasuk pembicara utama. Acara yang diikuti oleh para pimpinan komunitas motor se-Tanjung Pinang dan Bintan itu diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Bintan Max Owner. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Bintan Max Owner, Taufik Anugerah Putra, serta para pimpinan komunitas motor se-Tanjung Pinang dan Bintan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selanjutnya, Hidayat Nura Wahid (HNW) berharap, setelah mendapat materi Empat Pilar MPR, para komunitas motor hendaknya dapat nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mereka berkendara di jalanan. Hidayat percaya, jika Empat Pilar MPR RI hadir di jalanan, situasi dan kondisi berlalu lintas akan semakin membaik. Tidak ada kebut-kebutan, tawuran apalagi fitnah dan caci maki. Dan, itu artinya Empat Pilar sudah dibumikan, bukan hanya di gedung, tapi juga di jalanan.

“Kita di jalan itu sesungguhnya satu, meski tujuan dan jenis kendaraannya berbeda, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah Pancasila makanya kita harus berlaku baik, saling menghormati dan menghargai,” harap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Pada kesempatan itu, HNW juga menegaskan bahwa Indonesia sangat bhinneka dan kaya. Suku dan bahasa sangat banyak dan beragam. Itu semua bagian dari karunia Allah. Saat ini Indonesia diwariskan kepada kita semua. “Mari kita jaga Indonesia agar menjadi jaya, raya, merdeka, dan adidaya. Bukan negara terjajah, miskin, dan terpecah-belah,” ujar HNW. Karena itu, Hidayat mengajak para riders untuk menjaga Indo-

nesia jangan sampai terpecah-belah.

Pada sesi tanya jawab, HNW sempat diminta pendapatnya seputar aksi demo menolak UU Cipta Kerja. Menjawab pertanyaan itu, dia menjelaskan, jika demonstrasi dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, itu adalah konsekuensi negara demokrasi. Karena itu, seharusnya aksi demonstrasi itu tidak dikotori dengan penyusup yang melempari polisi, dan merusak fasilitas umum.

Hidayat percaya tindakan anarkisme dalam demo tolak UU Ciptaker bukan berasal dari para buruh, mahasiswa, maupun umat. Karena itu, Hidayat berharap, pihak berwajib dalam menghadapi aksi hendaknya lebih tenang, tidak serta merta secara represif.

Menyangkut UU Ciptaker, HNW berpendirian bahwa undang-undang tersebut banyak mengandung ketentuan yang bermasalah, tidak sesederhana yang diharapkan. Ini bisa dibuktikan, antara lain dengan banyaknya Peraturan Pemerintah, termasuk kepastian hukumnya. Karena itu, kata HNW, wajar jika para pekerja banyak yang menolak karena merugikan mereka. □

MBO

Jazilul Fawaid

# Rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Yogyakarta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN warga masyarakat Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (4/10/2020), berkumpul di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kecamatan Sewon. Mereka yang terdiri dari para kiai, bu nyai, pemuda, dan elemen masyarakat lain, seperti Pemuda Anshor dan Banser, hari itu mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini dihadiri Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid; Anggota MPR Fraksi PKB, Sukanto; dan Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich.

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, selaku narasumber acara itu, menyatakan, merasa senang para kiai, bu nyai, dan anggota ormas Islam bisa hadir dalam kegiatan ini. "Ini menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam yang baik, juga sebagai warga negara yang

baik pula," tutur Wakil Ketua Umum DPP PKB ini. Para ulama pendahulu mengajarkan kepada umat Islam untuk mencintai Tanah Air. "Ulama terdahulu mengajarkan keteladanan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada bangsa dan negara, yakni mencintai Tanah Air," paparnya.

Menurut politisi PKB yang bisa disapa Gus Jazil ini, seiring sejalanannya antara umat Islam dan negara bukan masalah mudah. Ia mencontohkan bagaimana kondisi Timur Tengah yang kerap bergejolak, karena disebabkan masalah ini. "Di Indonesia hubungan antara negara dan Islam sudah selesai," tuturnya. Terjalannya hubungan harmonis antara Islam dan negara juga berkat peran para santri dan ulama. "Saya yakin kondisi demikian juga terjadi di Bantul", ujarnya.

Lebih lanjut Gus Jazil mengatakan, bangsa Indonesia menganut sistem

Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bagaimana proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. "Musyawarah itu rembugan kalau dalam bahasa Jawanya," jelas Gus Jazil. Dan, cara rembugan inilah yang digunakan untuk memilih pemimpin.

Dalam demokrasi lewat pemilihan langsung, pemilu, jelas Gus Jazil, ada beberapa dampak atau efek samping yang tidak kita harapkan. Memilih pemimpin secara langsung, Pilkada misalnya, sangat mahal. Karena, dalam praktiknya, demokrasi model seperti ini ada proses transaksi atau *money politic*. Lebih menyedihkan lagi bila masyarakat bersikap pragmatis. "Dampaknya, bila kepala daerah terpilih maka ia bisa terkena masalah", paparnya. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya memilih calon



kepala daerah dengan sikap cerdas dan bijaksana.

Tak hanya itu, Gus Jazil juga berharap, Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 bisa berlangsung damai dan aman. Jangan memfitnah pihak lain. “Gunakan senyum saat menjangkau suara masyarakat. Ini penting, agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Dalam pilkada memang ada kompetisi, namun tetap merajut persatuan,” ucap alumni PMII itu.

Hubungan antara masyarakat dan kepala daerah, kata politisi asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu, hendaknya mampu memberi kemaslahatan. “Pemimpin harus mampu memberi keteladanan,” tegasnya. Tak hanya itu, Gus Jazil menekankan, pemimpin yang hadir di tengah masyarakat

harus bersikap adil. “Kalau tidak adil maka akan terjadi ketimpangan dalam berbagai sendi kehidupan,” tuturnya. Untuk itu, menurut Gus Jazil, kepala daerah dalam melakukan pembangunan, Empat Pilar harus hadir di tengah masyarakat, lewat pembangunan.

### Sosialisasi di Bangun Jiwo

Usai sosialisasi di Sewon, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid selanjut menghadiri acara serupa di Balai Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, juga di Kabupaten Bantul. Di sini, Gus Jazil menyebut Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan PBNU. “Untuk mempermudah sebutan, saya sering mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan PBNU”, ujarnya dalam acara yang dihadiri oleh kepala desa dan jajaran, warga

NU, Pemuda Ansor, Banser, dan KGB. Ia melanjutkan, PBNU adalah akronim dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945. “Sosialisasi ini merupakan salah satu tugas MPR”, ujarnya.

Empat Pilar, menurut Gus Jazil, merupakan hasil pikiran para pendiri bangsa. “Bila tak ada Empat Pilar maka tak ada Indonesia yang seperti kita rasakan saat ini,” ujarnya. Empat Pilar dan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia, yang di dalamnya terdapat banyak tokoh umat Islam, santri, dan kiai, ikut berperan. “Ijtihad para ulama mampu menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. Dan, para ulama mendorong agar ajaran agama bisa seiring dengan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Gus Jazil.

Untuk itu, Gus Jazil meminta agar Empat Pilar MPR dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini merupakan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan nilai-nilai inilah maka bangsa ini bisa bersatu. “Bila nilai-nilai ini hidup di tengah masyarakat maka akan tercipta suasana yang harmonis”, paparnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Jazil berpesan, para calon kepala daerah yang tampil dalam pilkada, 9 Desember 2020, harus memiliki visi dan misi yang penuh dengan nilai-nilai Empat Pilar. “Dengan menerapkan Empat Pilar dalam kehidupan, masa depan akan menjadi lebih baik”, tegasnya. Calon yang seperti itulah, menurut Gus Jazil, perlu dipilih. Dia berharap, calon kepala daerah yang





terpilih kelak bisa lebih memerhatikan masa depan pesantren dan membangun desa.

### Ziarah ke Makam Pahlawan Pejuang

Dalam kesempatan melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyempatkan diri melakukan ziarah ke makam pendiri Muhammadiyah, KH. Achmad Dahlan, dan pendiri HMI, Lafran Pane, yang terletak di Karangakajen. Serta makam pendiri Perguruan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara, di Umbulharjo, Yogyakarta.

Kepada wartawan, Gus Jazil mengatakan, sebagai orang NU, ia mempunyai tradisi untuk

melakukan ziarah kubur, memanjatkan doa untuk para pahlawan pejuang. “Sebagai generasi penerus bangsa, saya bangga dan mencintai para tokoh dan pahlawan pejuang yang telah terbukti sumbangsihnya pada sejarah peradaban Indonesia,” ujar Gus Jazil lebih lanjut, “Mereka telah berjuang tulus ikhlas sampai hari ini sehingga kami menikmati perjuangannya.”

Menurut Gus Jazil, Ki Hajar Dewantoro, KH. Achmad Dahlan, dan Lafran Pane adalah para teladan yang telah mendidik bangsa ini. “Di tengah pandemi, kita perlu energi keteladanan dari sejarah perjuangan mereka untuk menghadapi tantangan yang berat ini”,

tuturnya.

Saat tiba di makam KH Achmad Dahlan, Gus Jazil duduk bersimpuh di depan makam dan memanjatkan doa-doa. Selepas memanjatkan doa, kepada wartawan, ia mengatakan, KH. Achmad Dahlan adalah seorang kiai. “Beliau merupakan sedarah dan seiman bagi saya”, tuturnya. “Juga sebagai saudara sebangsa”, tambahnya.

Selepas memanjatkan doa untuk KH Achmad Dahlan, selanjutnya ia melakukan hal serupa di samping makam Lafran Pane. Berkat beliau, kata Gus Jazil, HMI ada dan sekarang kadernya tersebar di berbagai partai dan institusi, serta menduduki berbagai posisi dan jabatan penting.

Setelah ziarah ke makam KH. Achmad Dahlan dan Lafran Pane, selanjutnya Gus Jazil menuju ke pemakaman Taman Siswa di Umbulharjo. Di sini, dia melakukan ziarah di makam Ki Hadjar Dewantara. Di makam ini, ia melakukan tabur bunga. Dalam kesempatan itu, Gus Jazil menyatakan, akan terus melanjutkan dan merawat cita-cita pendiri Perguruan Taman Siswa itu.

### Sosialisasi di Kalasan, Sleman

Esoknya, 5 Oktober 2020, Jazilul Fawaid masih melanjutkan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR berlangsung di dua tempat. Pertama, di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, dan kedua di Dusun Sentono, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Pesertanya adalah warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kalasan.

Kepada para peserta, Gus Jazil mengingatkan petuah atau pesan Sunan Kalijaga yang bisa menjadi pegangan hidup. “Menurut Sunan Kalijaga, *urip iku urup*, yang artinya hidup itu harus memancarkan cahaya, atau hidup itu harus memberi manfaat kepada manusia di sekitarnya”, ujarnya. Demikian pula Pancasila, harus dihidup-hidupkan agar nilainya mampu dirasakan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan maka akan mengantar masyarakat menuju kondisi yang



makmur, sejahtera, dan adil,” tutur Gus Jazil.

Di hadapan masyarakat Kecamatan Sleman, ia menegaskan bahwa Empat Pilar merupakan komitmen kebangsaan. “Pancasila merupakan rumusan dari para pendiri bangsa, di antara mereka banyak dari kalangan ulama,” tuturnya. “Pancasila merupakan ijihad dari ulama”, tambahnya. Jadi, dasar negara dirumuskan oleh orang-orang terpilih, bukan sembarangan orang. Oleh karena itu, menurut Gus Jazil, menjalankan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah menjalankan nilai-nilai leluhur pendiri bangsa dan ulama. “Nilai-nilai inilah yang menyatukan Indonesia,” katanya.

Selanjutnya, Gus Jazil menjelaskan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen, MPR mempunyai wewenang untuk membuat GBHN. GBHN itulah yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Setelah UUD diamandemen maka GBHN dihilangkan, sehingga presiden, gubernur, walikota, dan bupati dalam menjalankan pembangunan berdasarkan pada visi dan misinya. “Visi dan misi inilah yang akan menjadi panduan pembangunan mereka,” paparnya.

Untuk itu, Gus Jazil menekankan, dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, pilihlah calon kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang mengacu pada Empat Pilar.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

### Meninjau Kebun Pembibitan

Di sela kunjungan di Sleman, Jazilul Fawaid menyempatkan diri mengunjungi ‘Krokot Nursery’, kebun pembibitan dan budidaya tanaman spesialis aglonema di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. Di tempat ini terdapat ratusan jenis tanaman aglonema dengan harga bervariasi, mulai Rp150.000 hingga Rp75.000.000.

Setelah menyaksikan kebun pembibitan itu, Gus Jazil menyatakan kepada wartawan bahwa kita harus kreatif dalam menjalankan usaha atau bisnis. “Memilih usaha harus tahu dan paham situasi yang ada,” ujarnya. Ia melihat bisnis usaha tanaman aglaonema

sangat potensial. Dari informasi yang dia peroleh, bibit tanaman itu diimpor dari Thailand. Harga perbibit Rp200.000. Dan, pelaku usaha di Indonesia mendatangkan bibit mencapai 100.000 hingga 200.000 bibit per bulan. Padahal, tanaman jenis ini bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia.

“Mengherankan kalau kita impor dari Thailand. Sebagai negara agraris dan iklimnya cocok seharusnya kita bisa mengekspor,” tuturnya. Semestinya, menurut Gus Jazil, bangsa ini mempunyai potensi besar untuk mengekspor aglaonema ke negara lain.

Gus Jazil berharap, model bisnis ‘Krokot Nursery’ itu bisa dikembangkan. “Pasarnya terbuka di mana-mana,” katanya. Gus Jazil mendorong pemerintah agar melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, mulai dari cara pembibitan, budidaya, serta membuka akses ke pasar. Perlu memberi subsidi kepada yang hendak menjadi petani aglaonema.

Harga dan pasar tanaman ini memang untuk kalangan kelas menengah, sehingga petani dari kalangan masyarakat bawah bisa bergiat dalam usaha aglonema. Dengan harga yang tinggi, tanaman itu tepat bila dipajang di perkantoran, hotel, dan tempat-tempat yang mewah. “Pelaku usaha dari kalangan masyarakat bawah dan pembelinya dari kalangan menengah ke atas”, ujarnya. Dari sinilah maka membawa kesejahteraan bagi masyarakat. □

AWG



## Webinar Wanita FKPPi

# Bamsoet Ajak Terapkan Nilai-Nilai Pancasila di Semua Aspek Kehidupan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo memandang, modernitas memberi peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria. Momentum ini dapat dioptimalkan kaum perempuan untuk berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Patut disyukuri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode 2010 hingga 2019, indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan tren positif.

“Jika pada 2018, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 90,99 (dari skala 0 – 100), maka pada 2019, IPG Indonesia tercatat pada level 91,07 yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki

dan perempuan. Diyakini tren positif peningkatan IPG ini akan terus berlanjut seiring perkembangan kehidupan demokrasi dan peningkatan kedewasaan politik rakyat,” ujar Bamsoet saat mengisi Webinar Aktualisasi Pancasila di Era Disrupsi 4.0 yang diselenggarakan Pengurus Daerah Wanita FKPPi Jawa Timur secara virtual di Jakarta, Sabtu, (17/10/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Seiring perjalanan waktu, tatanan kehidupan akan terus mengalami pergeseran dan perubahan, melahirkan paradigma baru pada berbagai aspek kehidupan. Rangkaian momentum sejarah akan melahirkan ragam peradaban dan membentuk periodisasi zaman. Di mana pada setiap periodisasi

zaman akan menghadirkan tantangan yang terus berkembang secara dinamis.

“Demikian pula halnya dengan era disrupsi 4.0, yang kita kenal juga dengan era revolusi industri 4.0. Kelahiran era disrupsi 4.0, adalah bagian dari proses pergeseran paradigma di mana kemajuan teknologi telah mengubah tatanan konvensional yang sebelumnya kita asumsikan sebagai sebuah kemapanan, dan menghadirkan tatanan baru yang mengoreksi makna kemapanan tersebut,” tandas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial kemasyarakatan, hingga pendidikan, semuanya dituntut berubah dan menyesuaikan diri dengan standar kemapanan yang baru. Tren dunia industri dipenuhi digitalisasi pada semua lini. Segala sesuatu yang manual,



natural, dan mekanis akan digantikan dengan yang serba digital.

“Era ini menjadi koreksi atas capaian-capaian pada tahap-tahap revolusi industri sebelumnya. Mulai dari revolusi industri tahap pertama yang ditandai penemuan mesin uap, revolusi industri 2.0 yang ditandai penemuan tenaga listrik dan dimulainya produksi mobil secara masal, revolusi industri 3.0 yang ditandai penemuan komputer dan robot, dan saat ini revolusi industri 4.0 yang ditandai berkembangnya sistem fisik siber, *the internet of things*, dan penggunaan big data,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, era disrupsi tidak hanya

menghadirkan modernitas dan kemajuan, namun juga tantangan. Konsekuensi logis dari lahirnya era disrupsi adalah tuntutan adaptasi melalui literasi teknologi. Karenanya, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan.

“Kemajuan teknologi pada era disrupsi memang menawarkan berbagai peluang. Tetapi penerapannya juga menyimpan potensi dampak negatif yang merugikan. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi (internet) secara salah dan tidak bijaksana dapat mendorong lahirnya sikap intoleran, penyebaran hoax, bahkan tindakan kriminal,” terang Bamsoet.



Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, berdasarkan riset yang dipublikasikan pada Februari 2020, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 64%. Artinya, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 272,1 juta jiwa, sekitar 175,4 juta jiwa diantaranya menggunakan akses internet. Bisa dibayangkan, satu berita hoax yang tersebar melalui internet dapat dengan segera diakses oleh jutaan warga masyarakat Indonesia hanya dalam hitungan detik.

“Era disrupsi juga membawa dampak pada aspek kehidupan sosial, di mana masyarakat menjadi semakin cenderung bersikap individualistik. Fakta bahwa kemajuan teknologi menawarkan kemudahan dalam banyak hal, sedikit banyak telah mengurangi interaksi sosial. Kemajuan teknologi telah mereduksi ketergantungan kita terhadap peran individu lain dalam sistem sosial kemasyarakatan. Dari sinilah sikap egois dan anti-sosial dapat tumbuh berkembang dan membudaya dalam kehidupan masyarakat,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Parta Golkar ini menambahkan, sebagai sebuah ideologi Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang, atau hanya menjadi hapalan rumusan sila-sila di luar kepala.

“Membantu tetangga yang terdampak pandemi, itu Pancasila. Menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi, itu Pancasila. Menyumbang pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat, itu juga Pancasila. Pancasila sesungguhnya dapat kita temukan kehadirannya dalam kehidupan keseharian. Cara terbaik mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan mengamalkannya. Karena wacana dan narasi tanpa realisasi, betapa pun banyaknya disuarakan hingga menjejali ruang publik, tidak akan bermakna nyata,” pungkas Bamsoet. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Ecky Awal Mucharam**, Anggota MPR Fraksi PKS

## Pemulihan Ekonomi Berbanding Lurus dengan Keberhasilan Menangani Covid-19

INDONESIA mengalami nasib yang sama seperti kebanyakan negara di dunia akibat pandemi Covid-19, yaitu jatuh ke dalam resesi. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 minus 1% sampai minus 2,9%. Dengan kata lain Indonesia sudah resmi masuk ke dalam resesi. Pada kuartal II-2020, Indonesia sudah mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Perumbuhan ekonomi kuartal IV diperkirakan juga negatif. Adapun keseluruhan pertumbuhan ekonomi akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Suatu negara disebut mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonominya tercatat negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Bagaimana melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia hingga masuk ke dalam resesi, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PKS Ecky Awal

Mucharam. Berikut petikan wawancara dengan anggota Komisi XI DPR ini.

**Pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor ekonomi. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II dan kuartal III yang minus (minus 5,32% dan minus 1% - 2,9%). Apa tanggapan Bapak?**

Jelas pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Dampak ini berbeda dengan krisis 1998 yang pada awalnya memukul perbankan dan sistem keuangan, kemudian merembet ke sektor riil. Kalau pandemi Covid-19 ini dampaknya langsung ke sektor riil, terutama sektor informal dan bisa merembet ke sistem keuangan, terutama perbankan.

**Melihat pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal minus, apakah ekonomi Indonesia sudah mengarah pada resesi?**

Secara teoritis apabila dua kuartal pertumbuhan ekonomi 0% atau bahkan negative maka kita sudah masuk resesi atau

yang lebih dikenal dengan krisis ekonomi. Indikasi ke arah sana semakin dan sudah tampak. Karena itu kebijakan fiskal dan moneter harus dibaur secara tepat agar resesi dan krisis tidak menjadi lebih dalam.

**Dalam kondisi ekonomi sekarang ini yang sudah mengalami resesi, apa persoalan krusial yang dihadapi Indonesia?**

Masalah yang paling krusial, dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 saat ini, adalah: *Pertama*, pemerintah harus extraeffort mencegah meluasnya wabah dan penularan, serta harus menekan jumlah korban yang meninggal. Negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sudah melakukan antisipasi sejak awal terjadi wabah di Wuhan, Cina, sehingga saat terjadi kasus di Malaysia dan Singapura, mereka sudah lebih siap dari Indonesia. Sedangkan pemerintah kita terkesan menyepelkan dan tidak serius melakukan antisipasi. Jika pemerintah gagal mengendalikan dan menekan laju penyebaran Covid-19 maka krisis ekonomi akan semakin dalam. Kita



harus lebih keras “melawan” Covid 19 ini. Jangan disepelekan.

*Kedua*, terkait dengan meningkatnya pengangguran karena banyaknya PHK dari berbagai sektor formal, terutama pariwisata, transportasi, industri pengolahan, dan lainnya. Demikian juga peningkatan jumlah pengangguran akibat terpukulnya sektor informal. Akibat jumlah pengangguran yang meningkat maka kebutuhan subsidi langsung untuk memenuhi kebutuhan harian mereka semakin meningkat. Jumlah yang terdampak langsung secara ekonomi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah bisa mencapai 60% sampai dengan 70% penduduk dari lapis terbawah atau sekitar 160 juta sampai 186 juta jiwa.

*Ketiga*, krisis ekonomi juga mengancam penerimaan perpajakan. Shortfall perpajakan bisa jadi mencapai 50% atau lebih dibandingkan APBN 2020. Selama 5 tahun, setiap tahun shortfall perpajakan berjumlah ratusan triliun. Tax ratio selama lima tahun terakhir relatif stagnan bahkan pernah menurun. Akibatnya, utang pemerintah dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Belum lagi utang-utang BUMN.

*Keempat*, apakah setelah sektor riil terpukul akan merembet ke sektor keuangan? Semoga tidak terjadi. Jadi, masalah krusial berikutnya adalah kesehatan dan stabilitas sistem keuangan kita, terutama perbankan. Ada dua masalah besar yang harus dihadapi, yaitu soal likuiditas dan solvabilitas. Selain kedua masalah tersebut adalah meningkatnya NPL.

Kredit perbankan saat ini mengalami tekanan karena tidak bisa ekspansi. Banyak perusahaan atau individu mengalami kesulitan membayar cicilan atau gagal bayar. Karena itu harus ada rileksasi terkait pinjaman outstanding di perbankan untuk pinjaman KUR atau UMKM lewat otoritas OJK. Pertama, tidak dikenakan bunga dalam beberapa bulan ke depan karena nasabah terdampak, tidak bisa mendapatkan penghasilan, ekonomi stagnan, dan bisnis terhenti. Bentuk sharing the pain, OJK tidak perlu membebankan bunga kepada nasabah KUR dan UMKM. Kedua, menangguhkan cicilan atau kewajiban bayar beberapa bulan

untuk merileksasi perjanjian kredit kepada nasabah KUR atau UMKM sampai mereka bisa beroperasi kembali. Ini perlu dukungan antara OJK dan niat perbankan.

### **Bagaimana Bapak melihat langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai ratusan triliun untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi?**

Pertama, pemulihan ekonomi berbanding lurus dengan keseriusan dan keberhasilan pemerintah menangani Covid-19. Penyebab krisis ekonomi adalah pandemi Covid-19. Kalau penyebaran pandemi Covid-19 bisa dikurangi maka otomatis berdampak pada



pemulihan ekonomi. Terkait hal ini, seluruh masyarakat termasuk pemerintah, aparaturnegara harus menjalankan protokol Covid-19, seperti memakai masker, menjaga jarak, hidup sehat dengan mencuci tangan. Ketika Covid-19 bisa dikendalikan di sebuah wilayah maka rakyat dengan percaya diri bisa melakukan aktivitas ekonomi. Dengan protokol Covid-19 yang memadai maka akan menekan risiko penyebarannya sebelum ada vaksin Covid-19. Pemerintah harus mampu menekan laju Covid-19.

Kedua, mitigasi bagi yang terdampak

ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak sebanyak 60 – 70%. Siapa yang harus diberi subsidi dan bantuan sosial saat ini masih karut marut.

Ketiga, proses pemulihan ekonomi yang memberi keleluasaan pada sektor tertentu yang menopang perekonomian, yakni sektor pertanian yang secara PDB menurun tapi masih bisa diharapkan dari sisi penyerapan tenaga kerja dan penyelamatan ekonomi kelas bawah. Pemerintah harus fokus untuk menangani dua hal, yaitu penduduk yang sangat besar di sektor pertanian dan risiko kelangkaan pangan.

Pemerintah harus diberi keleluasaan untuk industri berbasis mesin atau padat modal, karena risiko penularan Covid-19 sangat rendah dan untuk industri padat karya dengan jumlah buruh banyak harus hati-hati karena risiko penularan antarkaryawan. Hal lain, pemerintah dengan keterbatasan dana harus memerhatikan pengeluaran belanja negara. Belanja negara harus tepat sasaran, tidak rente, tidak korupsi, tidak mark up. Belanja pemerintah yang tidak mendukung pemulihan ekonomi harus dipangkas. Kebijakan fiskal harus fokus pada belanja pegawai, belanja sosial untuk jaring pengaman sosial, belanja rutin, belanja untuk menjalankan roda pemerintahan, bansos dan bantuan pemulihan ekonomi untuk sektor UMKM.

### **Menurut Bapak, apakah ekonomi Indonesia bisa melewati krisis dan pulih kembali, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia?**

Terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia tergantung dari seberapa cepat dan kuat bisa menekan penyebaran Covid-19. Kemudian, bagaimana menghidupkan ekonomi domestik. Banyak yang bisa dilakukan untuk menghidupkan kembali ekonomi domestik dan tidak terkait dengan *supply chain* atau *global chain*, misalnya hidupkan sektor pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, yang tidak terkait dengan ekonomi global. Yang bisa menggerakkan ekonomi adalah domestic consumption. Ekonomi domestik atau belanja dalam negeri bisa meng-cover 60% pergerakan ekonomi kita. □



# Ngobrol Santai Bersama Ketua MPR *Bambang Soesatyo*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



*Brigita Manohara*

**B**RIGITA Purnawati Manohara atau biasa disapa **Brigita Manohara** adalah seorang pembawa acara dan presenter televisi. Untuk menjalani profesinya itu, dia sering wira-wiri di salah satu televisi swasta nasional. Beberapa waktu lalu, Brigita Manohara mendapat kesempatan bertemu dan berdialog dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsot).

“Awalnya wah tegang nih. Maklum ngobrol sama pejabat tinggi Negara, dan mantan wartawan pula. Tapi, pas setelah ngobrol belangsung, ternyata asyik juga. Jadi ga tegang lagi,” katanya.

Uniknya, tanpa disadari Brigita Manohara lebih banyak bertanya, bak wartawan sedang mewawancarai narasumber. Bamsot pun beberapa kali memotong pertanyaan, dan mengingatkan bahwa ini ngobrol santai.

Wah, “Jadi malu saya. Saya kan tamunya ya,” ujarnya seraya tertawa. Dan, obrolan pun berlanjut, membicarakan mulai dari profesi wartawan hingga ke isu-isu hangat saat itu. □

DER

## Memeran *Tokoh Sejarah* Halim Perdanakusumah

**A**RTIS film dan presenter **Ibnu Jamil** mendapat tawaran bermain film bertema sejarah. Judulnya 'Kadet 1947. Di film ini dia memerankan tokoh Halim Perdanakusumah, seorang Pahlawan Nasional. Sebagai pilot tempur Angkatan Udara Indonesia di era 1940-an, Ibnu Jamil, eh Halim Perdanakusumah, melakukan aksi-aksi heroik.

Untuk memerankan tokoh besar dan berpengaruh, Ibnu Jamil mengaku, harus bekerja keras. "Siang malam saya pelajari habis karakter beliau," ungkap artis yang pernah bermain dalam sejumlah film dan sinetron ini. Dia juga mendapat latihan betulan oleh prajurit TNI AU, baik latihan fisik, mental, dan juga teknik menerbangkan pesawat.

"Walaupun cuma film, tapi persiapannya luar biasa," cerita presenter olahraga ini. Agar tergambar suasana perang di tahun 1940-an, pengambilan gambarnya dilakukan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk itu, kru membuat setting pangkalan udara Maguwo semirip mungkin dengan zaman dulu, plus model pesawatnya.

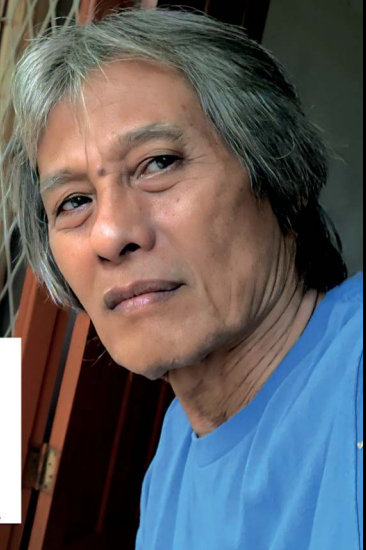
"Film ini full sejarah. Ini bisa menjadi pembelajaran bagus buat generasi milenial. Terutama dalam hal karakter dan nasionalisme yang tinggi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Ibnu Jamil. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Ibnu Jamil*



*Susthanto*

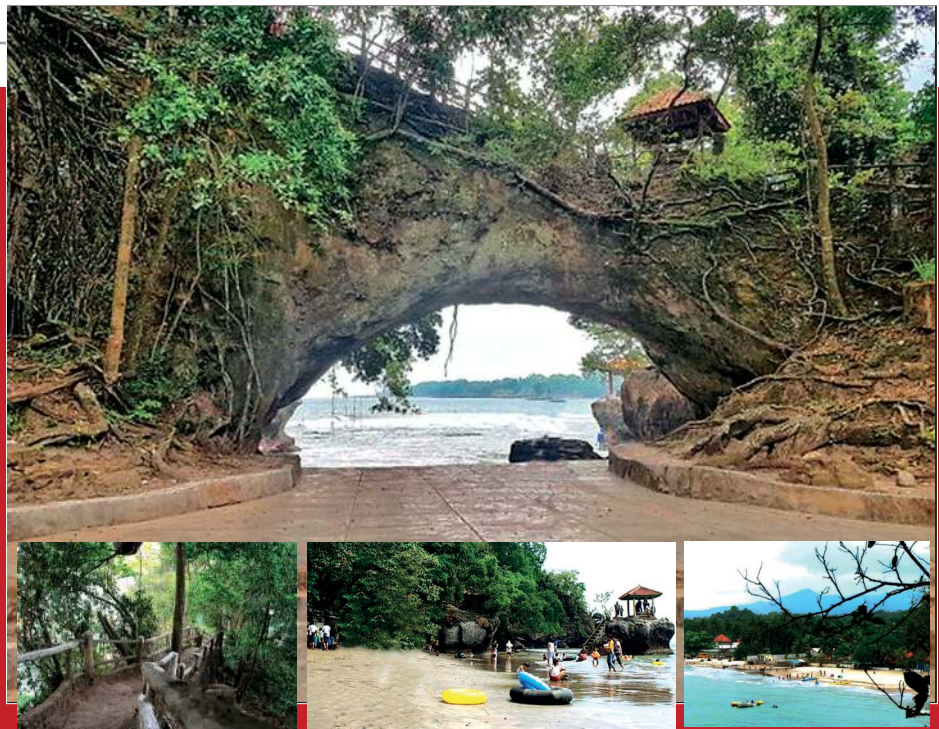
## Karyanya Raih Penghargaan Tingkat Internasional

**D**I DUNIA perancang grafis dan pelukis kartun, nama **Susthanto** sudah tak asing lagi. Ia mengawali karirnya sejak 1980 sebagai ilustrator Majalah *Zaman*. Lalu, pada 1986 hingga 1994, bekerja sebagai visualizer Majalah *TEMPO*. Setelah *TEMPO* dibredel, 1994, dia bekerja sebagai perancang grafis Tabloid *Kontan* dan Majalah *Trust*. Dan, sejak 2007 hingga sekarang, Susthanto menyumbangkan karyanya, berupa karikatur, atas pesanan Majalah *Majelis*.

Sebagai seniman lukis, terutama kartunis, Susthanto memang tak pernah berhenti berkarya. Untuk mengukur tingkat kematangan profesinya, dia mengikutsertakan karyanya dalam berbagai ajang kompetisi. Apalagi hadiahnya menggiurkan, baik berupa uang ataupun piagam penghargaan. Bahkan, penyelenggara menyediakan hadiah besar untuk satu tema yang dilombakan. Seperti Agustus 2020, Susthanto mengikutsertakan karyanya dalam *3rd International Cairocarture Cartoon Contest, Egypt 2020*.

Pihak penyelenggara lomba ke-3 Cairocarture Cartoon ini menetapkan tema tentang tokoh Mostafa A. El-Sayed (ilmuan fisika kimia). Dalam lomba tingkat internasional ini Susthanto harus bersaing dengan 74 kartunis dari 24 negara di dunia. Hasilnya, Susthanto berhasil meraih *Special Prize*. "Senang, karya saya bisa masuk dalam pergaulan kartunis tingkat dunia," begitu komentar singkat Susthanto. □

SCH



## Menikmati Pantai Karang Bolong nan Unik

**D**EBURAN OMBAK bergulung-gulung menghantam batu karang di Pantai Karang Bolong. Pemandangan yang terus berulang itu sungguh indah. Suara debur ombak yang beradu dengan batu karang dan menerpa tebing terasa begitu nyaring. Suaranya mampu membuat setiap orang berada di tepi pantai itu merasa sedikit lebih rileks. Apalagi menyaksikan hamparan laut nan luas berwarna biru membuat suasana menjadi lebih menyenangkan.

Pantai Karang Bolong berlokasi di Desa Karang Suraga, Cinangka, Serang, Banten. Dari kota Serang, ibukota Provinsi Banten, untuk berwisata ke Pantai Karang Bolong harus menempuh jarak sekitar 53 km. Tiba di Anyer, lokasi Pantai Karang Bolong sudah dekat, hanya melanjutkan dan mengikuti arah sampai pantai. Persisnya dari Hotel Aston Anyer, tempat menginap para jurnalis Parlemen yang mengikuti Press Gathering pada 4–6 September 2020, ke lokasi Pantai Karang Bolong hanya sekitar 2–3 km.

Bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, untuk menuju Pantai Karang Bolong bisa menggunakan kendaraan umum. Banyak sekali kendaraan umum (angkot) yang berlalu lalang melewati lokasi wisata Pantai Karang Bolong. Malah beberapa jurnalis Parlemen sempat jogging pada

Sabtu pagi, 5 September 2020, meluangkan waktu untuk menikmati di Pantai Karang Bolong. Untuk dapat masuk ke Pantai Karang Bolong, setiap pengunjung dipungut biaya masuk sebesar Rp 5.000.

Memasuki area Pantai Karang Bolong para pengunjung langsung bisa menyaksikan banyak bebatuan karang yang tersebar



berserakan di bibir pantai. Biasanya ombak laut menghantam batuan karang ini dengan sangat keras mengeluarkan suara khas. Ombak yang membentur batu karang menimbulkan cipratan air laut di sana-sini. Bebatuan karang itu di alam terbuka cukup menawan dan layak untuk diabadikan

dengan berfoto di atas batu yang sewaktu disaput oleh air laut.

Selain bebatuan karang, Pantai Karang Bolong juga memiliki banyak pepohonan rimbun, di antaranya pohon-pohon kelapa. Pohon yang rimbun memberi kesejukan di tengah hawa panas pantai. Tak heran banyak pengunjung yang menggelar tikar di bawah pepohonan sambil menikmati pemandangan hamparan laut dan deburan ombak. Ada di antara pepohonan itu yang umurnya sudah tua, terlihat dari akar-akar yang menyembul di tanah.

Lalu, di mana Karang Bolong yang menjadi ikon destinasi wisata ini? Dari tempat masuk area pantai ini kita sudah bisa menyaksikan satu bukit (tebing) batu yang dipenuhi pepohonan. Bukit batu ini menjorok ke laut melewati bibir pantai, dan di bagian bawahnya, persis di atas bibir pantai, terdapat sebuah lubang besar. Lubang raksasa di bawah tebing batu itulah disebut sebagai Karang Bolong. Lubang ini berdiameter sekitar 50 meter, dengan lebar sekitar 10 meter, dan tingginya kurang lebih 5 meter. Lubang besar ini memiliki daya eksotis dengan latar belakang pemandangan laut lepas.

Lubang di tengah tebing batu di Pantai Karang Bolong itu masih menyisakan misteri.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Banyak cerita dan tentang karang borong. Menurut cerita, pantai ini sesungguhnya bernama Pantai Karang Suraga. Nama ini diambil dari nama Suryadilaga. Konon, Suryadilaga adalah seorang yang memiliki ilmu dan bertapa di pantai ini. Berubahnya nama pantai itu, dari Karang Suraga menjadi Karang Bolong ada kisahnya.

Pada 1883, Gunung Krakatau meletus. Erupsi gunung ini sangat dahsyat. Bahkan awan panas dari Gunung Krakatau sampai ke daratan Eropa. Letusan gunung di selat Sunda inilah yang menyebabkan lubang di tebing batu karang di pantai Karang Suraga itu. Sejak itulah pantai ini dikenal dengan nama Pantai Karang Bolong, karena lubang besar (bolong) pada tebing karang.

Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa lubang besar di tebing batu karang itu karena adanya abrasi ombak laut terhadap tebing batu itu. Lama kelamaan abrasi itu membuat batu karang tersebut tergerus dan membentuk bolong. Tampak dinding karang yang terbuat dari lapisan-lapisan bebatuan yang sangat unik dan cantik. Secara geologi, "gua" Karang Bolong tersusun dari batuan breksi.

Sungguh, Karang Bolong memberikan suatu pemandangan alam yang sangat menarik dan jarang ditemukan di belahan bumi lain. Karena itu, Karang Bolong menjadi ikon wisata di Anyer. Hampir semua pengunjung yang datang ke Anyer ingin melihat dari dekat batu karang berlobang ini. Namun, masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, Pantai Karang Bolong terpaksa ditutup. Pantai ini kembali dibuka untuk umum pada lebaran 2020 lalu.

"Jumlah pengunjung di Pantai Karang Bolong ini memang berkurang sejak pandemi Covid-19," ujar Heru, salah seorang petugas di Pantai Karang Bolong. Sebelum pandemi Covid-19, biasanya setiap Sabtu dan Ahad

atau hari libur nasional pengunjung memenuhi Pantai Karang Bolong. Namun, pada masa pandemi Covid-19 ini, jumlah pengunjung berkurang drastis.

Heru menceritakan sekilas tentang pengelolaan area Pantai Karang Bolong ini. Area Pantai Karang Bolong sebenarnya bukanlah milik pemerintah daerah (Pemda), tetapi dikelola pihak swasta (keluarga) yang telah menguasai obyek wisata ini secara turun-temurun. "Pengelolaan dilakukan swasta bukan Pemda. Malah pengelola tidak mendapat bantuan dari Pemda," ujar pria yang sudah bekerja sebagai staf pengelola Pantai Karang Bolong ini sejak 2006.

Pengelola hanya mendapat pemasukan dari tiket masuk area Pantai Karang Bolong. Menurut Heru, pengelola tidak memungut sewa kepada pedagang yang membuka warung makanan minuman atau kepada ibu-ibu yang menyewakan tikar kepada pengunjung di Pantai Karang Bolong ini. "Warga sekitar bisa berdagang atau berusaha di tempat ini tanpa dipungut bayaran. Ini memang kebijakan dari pengelola untuk warga masyarakat sekitar," tuturnya.

Hanya mengandalkan pemasukan dari tiket, tak heran apabila Pantai Karang Bolong belum dibenahi menjadi kawasan wisata yang dilengkapi berbagai fasilitas. Lahan parkir masih berupa lapangan, fasilitas MCK masih minim dan sederhana, dan fasilitas permainan belum lengkap, termasuk juga soal kebersihan dan keamanan. Padahal Pantai Karang Bolong bisa menjadi destinasi wisata yang menarik.

"Wah, menarik di Karang Bolong. Lihat bisa jadi foto yang bagus seperti ini, seperti bayangan hitam," kata John Andhi Oktaveri, jurnalis Bisnis Indonesia, sambil memperlihatkan hasil jepretan kamera dari handphone. Tampak dia berakting di atas batu di depan Karang Bolong. Tubuhnya

menjadi sebuah bayangan hitam di atas batu dengan latar belakang laut lepas.

"Kalau Pantai Karang Bolong ini dikelola dengan baik bisa menarik wisatawan," imbuhnya. Pada pagi itu dia bersama beberapa teman jurnalis sempat jogging dari Hotel Aston Anyer menuju Pantai Karang Bolong.

Memang tampak sekali pengelola Pantai Karang Bolong belum maksimal sebagaimana semestinya mengelola tempat wisata. Sebut saja tangga yang menuju bukit atau batuan karang melalui sisi tebing belum diperantik dan memberi rasa aman untuk naik ke bukit. Padahal pemandangan dari atas bukit sangat indah. Hamparan pantai yang begitu luas dengan latar belakang anak Gunung Krakatau.

Di atas pun, anjungan masih dibuat sederhana. Pengelola memang sengaja membangun anjungan pandang di atas bebatuan karang yang lumayan besar. Pengunjung harus menaiki tangga batu untuk sampai ke atas bukit. Di atas terdapat sebuah anjungan. Dari tempat ini bisa dilihat keelokan pantai seperti debur ombak, indahnya lautan, dan anak Gunung Krakatau.

Selain Pantai Karang Bolong, pengunjung bisa menikmati suasana pantai di kawasan Anyer ini. Banyak pantai yang berada dekat Pantai Karang Bolong. Setelah dari Pantai Karang Bolong pengunjung bisa melanjutkan wisata pantai, seperti pantai pasir putih Florida yang berjarak hanya sekitar 5 km di sebelah utara Pantai Karang Bolong. Pantai pasir putih Florida memiliki daya tarik berupa pantai yang luas, berpasir putih dengan ombak yang menggulung.

Lebih jauh sedikit, ada pantai Sambolo 2. Pantai ini populer karena memiliki fasilitas wisata air yang lengkap, semisal banana boat, snorkling, parasailing, jet sky, dan lainnya. □

BSC

Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M.

# Pejuang HAM Menyeberang ke Politik



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**R**ENCARA Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, disahkan menjadi undang-undang awal Oktober silam. Tetapi, prokontra menyusul lahirnya UU Cipta Kerja ini masih akan berlarut-larut. Kedua belah pihak, pemerintah dan DPR di satu sisi, dan para buruh beserta kelompok kontra Omnibus Law di sisi yang lain belum menemukan kata mufakat atas undang-undang tersebut.

Padahal, seperti kata Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., UU ini mengusung niat yang baik. Yakni, ingin meningkatkan iklim usaha dan ekonomi dengan membuat kemudahan berusaha dan menyederhanakan perizinan. Selama ini upaya meningkatkan iklim usaha dan ekonomi terganjal dua problem, yaitu tumpang tindihnya peraturan dan berbelitnya perizinan. Karena itu, harus dilakukan debirokratisasi dan deregulasi melalui Omnibus Law.

Namun, karena metode Omnibus Law ini terbilang baru bagi Indonesia maka prosesnya menjadi tidak mudah. Terlebih metode ini menyisakan persoalan bagaimana melakukan sinkronisasi antar-UU. Mana saja yang harus dilakukan perubahan, apa saja batasnya dan sebagainya.

Padahal pihak DPR sudah sangat berhati-hati dalam membahas draf perundang-undangan yang diberikan pemerintah ini. Dalam hal ini, DPR tidak hanya berfungsi sebagai tukang stempel. Tapi, draf yang disodorkan pemerintah sudah dikuliti, dielaborasi, dan diperbaiki di berbagai bagiannya. Menghilangkan bab-bab yang berpotensi

menjadi pasal kontroversial. Dan, memasukkan pokok-pokok pikir yang pro terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat marginal.

Seperti, untuk masyarakat yang selama ini turun-temurun tinggal di hutan dan terancam pidana karena mengambil hasil hutan untuk keperluannya sendiri, dalam UU ini tidak ada lagi. Dalam penataan kawasan hutan, kelompok ini mendapat kepastian untuk dapat tetap tinggal di sana.

Masalah UMKM, pendapat yang mengatakan bahwa Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha besar tidaklah benar. UU Cipta Kerja justru memberi kemudahan bagi UMKM. Singkatnya, Omnibus Law tidak hanya menguntungkan kelompok besar, tetapi menambah perlindungan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

“Yang menjadi masalah adalah klaster ketenagakerjaan. Kalau klaster ketenagakerjaan tidak ada dalam Omnibus Law tentu penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini tidak sebesar sekarang. Dan, sejak awal sikap Fraksi Nasdem meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja. Karena, tanpa klaster ketenagakerjaan sebenarnya sepuluh klaster lainnya sudah memberi kemudahan untuk kegiatan usaha. Namun, namanya politik, keinginan Nasdem itu tak berlanjut, dan klaster tenaga kerja tetap masuk dalam UU Cipta Kerja,” kata Taufik Basari kepada *Majalah Majelis* beberapa waktu lalu.



Agar klaster ketenagakerjaan pada khususnya dan UU Cipta Kerja pada umumnya tidak merugikan masyarakat, selaku Anggota Panja UU Cipta Kerja Baleg DPR RI, Taufik Basari mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses pembuatan Peraturan Pemerintah yang akan disusun sebagai guide pelaksanaan Omnibus Law. Ini penting, karena UU ini banyak aturan teknis berbentuk Peraturan Pemerintah. Kebijakan itu diambil untuk menjawab kebutuhan pemerintah yang memerlukan fleksibilitas pengaturan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Pada kondisi tertentu yang membutuhkan perubahan bisa dilakukan lebih cepat, karena hanya memakai PP.

“Proses penyusunan UU Cipta Kerja kurang menyertakan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Kelompok-kelompok kritis terlanjur menolak, mereka curiga dan menafikkan dialog. Sementara

DPR merasa sulit mengajak bicara kelompok kritis, sehingga pembaharuan UU berlanjut begitu saja,” tutur Taufik Basari.

Taufik mengajak semua pihak untuk tetap tenang menghadapi perbedaan menyangkut Omnibus Law. Mereka yang hendak menyampaikan aspirasi melalui aksi demo diharap bisa melakukan aksinya dengan damai tanpa anarkisme. Ia percaya kasus Omnibus Law ini memberi pelajaran betapa penting keterbukaan dan dialog. Dialog yang bertujuan menyamakan persepsi dan menghilangkan perbedaan.

### **17 November**

Taufik bisa memahami pilihan demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Apalagi saluran yang ada memang tidak memberi harapan. Buktinya, harapan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

agar presiden mengeluarkan Perppu tak kunjung memberi harapan. Karena itu, demo dianggap menjadi alternatif yang mungkin membuahkan hasil.

Memperjuangkan idealisme melalui parlemen jalanan, seperti buruh dan mahasiswa, menolak Omnibus Law pernah dipraktikkan Taufik Bastari. Saat itu, 1998, pria yang genap berusia 44 tahun pada 17 November 2020, bersama ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain menggaungkan gerakan reformasi. Hasilnya, Soeharto yang telah menjadi Presiden selama 32 tahun bisa dijatuhkan.

Keterlibatan Taufik dalam parlemen jalanan merupakan konsekuensi keterlibatannya di berbagai lembaga kemahasiswaan. Tercatat bungsu dua bersaudara dari pasangan Pudian Harjono dan Lili Suhaili ini pernah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, baik formal maupun informal. Seperti, Lembaga Kajian Keilmuan (LK-2), Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Kesatuan Aksi Mahasiswa UI dan Komunitas Mahasiswa Filsafat UI.

“Saya harus menyukuri nikmat hidup yang saya dapatkan. Saya mengenyam pendidikan di tempat-tempat terbaik. Setelah lulus SMA 8 Bukit Duri, saya diterima di FH UI, masuk tahun 1995 dan lulus pada 2000. Tahun 1999 diterima di Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, lulus 2003. Saya sempat kuliah di dua jurusan sekaligus, dan itu membuat saya harus bolak-balik mengejar jam kuliah,” cerita Taufik.

Pada 2004-2005 ia menyelesaikan gelar master, di Master Hukum HAM Internasional dari Northwestern University, School of Law, Chicago, U.S.A. Pendidikan ini ia tempuh setelah terpilih mendapatkan beasiswa Fulbright.

Selama di Amerika, Taufik Basari tidak hanya menghabiskan waktunya untuk belajar. Di negara Donald Trump itu ia sempat menjadi konsultan untuk *International Center for Transitional Justice* di New York. Ia juga pernah menjalani pendidikan *International Law Program* di University of California, Davis (UC-Davis), dan University of California, Berkeley (UC-Berkeley) serta mengikuti *fulbright enrichment program* di Arizona State University. Selain itu Taufik juga sempat menjalani internship pada *Asian Human Rights Commission* di Hong Kong.

Berbekal sederet pengalamannya itu Taufik mendapat kesempatan untuk mengajar di almamaternya di Departemen Filsafat UI. Selain mengajar, ia juga dikenal sebagai aktivis HAM dan anti korupsi. Kiprahnya menangani kasus pelanggaran HAM dimulai sejak masih kuliah, pada 2000, atau saat bergabung di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pada 2006 Taufik dipercaya menjadi Direktur Bantuan Hukum YLBHI. Selanjutnya akhir 2007, Taufik Basari mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum ini banyak memberikan penyuluhan hukum dan HAM.

Selama berkiper dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, Taufik







mengenal dan berinteraksi dengan sejumlah tokoh besar, pendekar kemanusiaan. Antara lain Adnan Buyung Nasution, Munir Said Thalib, dan Bambang Wijoyanto. Mereka inilah yang mampu memberi tantangan kepada Taufik agar berkontribusi lebih besar kepada masyarakat tertindas dan terpinggirkan.

Selama periode tersebut ia banyak membantu masyarakat tertindas dalam memperoleh hak-haknya. Berbagai kasus pelanggaran HAM ia tangani. Seperti kekerasan, pengusuran, dan pelanggaran hak asasi lainnya.

Pelan tapi pasti kesadarannya membantu orang lain makin bertumbuh. Tapi, pada saat bersamaan ia juga sadar untuk membantu masyarakat yang lemah butuh kekuasaan. “Kekuasaan itu ibarat pisau bermata dua, kalau digunakan oleh orang yang berniat jahat dia bisa menghasilkan kejahatan, menodong, mencuri dan sebagainya. Tapi, kalau digunakan dengan niat baik, hasilnya pun baik pula,” ungkap Taufik Basari.

### Gagal ke Senayan

Di saat kegamangan itu muncul, tepatnya pada 2013, datanglah telepon dari petinggi Partai Nasdem, mengajak untuk bergabung. Namun, Taufik tidak langsung menanggapi. Ia memilih mengonsultasikan tawaran tersebut kepada sejawatnya. Ternyata, semua sejawatnya memberi saran yang sama. Mendukung Taufik mengambil kesempatan bergabung dengan Nasdem, sekaligus menjadi Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Nasdem.

Pada 2014, Taufik melakukan percobaan pertamanya menjadi calon anggota DPR dengan mengikuti Pileg (pemilu legislatif). Bertarung di Dapil yang juga tanah kelahirannya, Taufik gagal melenggang ke Senayan. Baru pada percobaan kedua, atau Pemilu 2019 pria kelahiran Jakarta 17 November 1976 ini berhasil melangkah ke Senayan, dari Dapil Lampung I.

Selain mendulang suara pada Pemilu 2019, Taufik juga turut berkontribusi membesarkan partai. Salah satunya adalah kebijakan politik tanpa mahar. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk menjaga praktik politik Nasdem sesuai etika. Tugasnya adalah mengajak dan membantu kader serta simpatisan partainya menegakkan etika partai.

Taufik Basari percaya apa yang diperolehnya kini tak jauh dari pengalaman hidup yang dia jalani. Termasuk keteladanan dan

pelajaran yang diberikan oleh kedua orangtuanya. Dari ayahnya yang seorang Aparatur Sipil Negara, Taufik belajar soal kejujuran, amanah, dan kerja keras. Sementara dari ibunya, ia mendapat contoh tentang kegigihan menjalankan usaha dari kecil-kecilan hingga berkembang menjadi lebih besar.

“Bapak saya menjaga amanat yang dia dapat dan melaksanakannya penuh kejujuran. Sedangkan ibu, gigih berusaha sehingga bisa membantu perekonomian keluarga,” ungkap Taufik Basari. □

MBO

## Biodata

### Taufik Basari, S.H, S.Hum, LL.M.

#### PENDIDIKAN

- S-2 Master Hukum HAM Internasional (LL.M), Northwestern University, School of Law, Chicago, U.S.A (2004-2005)
- S-1 Filsafat (S.Hum), Jurusan Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (1999-2003)
- S-1 Hukum (S.H.), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1995-2000)

#### JABATAN

- Anggota DPR RI 2019-2024
- Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Nasdem 2013-sekarang
- Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Periode 2008—2011;
- Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi YLBHI, 2006—2011
- Dosen Luar Biasa Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sejak 2005
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga 2011—2015
- Researcher dan Indonesia Representative untuk Asian Human Rights Commission (AHRC), Hong Kong sejak 2005
- Consultant Program International Center for Transitional Justice (ICTJ) New York (2005).

## Peran Santri di Masa Krisis

**P**ERINGATAN hari santri tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang membebat Indonesia hampir tujuh bulan lamanya, terhitung sejak dikonfirmasi pertama kali pada Maret lalu. Pandemi Covid-19 suka tidak suka “memaksa” masyarakat untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial (*physical and social distancing*) guna mencegah meluasnya penyebaran virus. Namun demikian, di sisi lain, situasi pandemi Covid-19 juga menjadi pemantik (*trigger*) bagi segenap komponen bangsa, tak terkecuali para santri, untuk bahu-membahu berkontribusi bagi negeri di masa krisis. Krisis di berbagai bidang kehidupan akibat pandemi Covid-19 menjadi batu uji bagi para santri untuk merumuskan strategi dan solusi sebagai bentuk tanggung jawab dan peran serta dalam menopang ketahanan bangsa dan negara.

### Sisi Historis

Kaum santri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan krisis apabila kita melacak kembali pada sejarah perjuangan bangsa di masa revolusi fisik, khususnya periode 1940-an. Inilah yang menjadi cikal-bakal ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Pada masa itu, krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah krisis politik dan keamanan sebagai konsekuensi sebuah “negara muda” yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan dan hendak direnggut kembali kemerdekaan tersebut oleh kekuatan kolonial. Belanda sebagai kekuatan kolonial yang telah menjajah Indonesia sekian abad lamanya hendak mengambil kembali kontrol terhadap pemerintahan Indonesia dengan membonceng sekutu (Inggris) yang telah menundukkan Jepang, penjajah terakhir Indonesia. Hal ini menjadi pemicu lahirnya Resolusi Jihad yang diserukan oleh K.H. Hasyim Asy’ari agar para ulama dan kaum santri bersatu padu mempertahankan kemerdekaan.

Resolusi Jihad yang diserukan oleh K.H. Hasyim Asy’ari tersebut memiliki dampak dan konsekuensi yang signifikan bagi perjuangan bangsa. Resolusi Jihad menjadi poin artikulasi penting bahwa kaum santri dan ulama tidak dibatasi oleh sekat-sekat golongan dalam berjuang. Bagi kaum santri dan juga ulama, perjuangan melawan kezaliman penjajah dan sikap tegas untuk mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban bela negara yang harus dipanggul oleh siapapun yang menyebut dirinya sebagai Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pada tataran lebih lanjut, Resolusi Jihad tersebut menjadi pemicu berkobarnya semangat rakyat Indonesia untuk melebur bersama santri menjadi satu kekuatan besar dan solid dalam menghadapi

tentara Belanda yang hendak masuk kembali menjajah Indonesia. Perlawanan santri bersama rakyat ini bahkan berujung pada tewasnya komandan sekutu, Brigadir Jenderal Mallaby, dalam pertempuran yang berlangsung pada 27-29 Oktober 1945, sehingga memicu peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

### Krisis Multisektor

Indonesia dewasa ini memasuki periode sulit. Bukan saja karena pandemi yang meremukkan berbagai sektor kehidupan dan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, tapi juga ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan (AGHT) yang sebelumnya sudah eksis dan masih belum bisa diatasi sepenuhnya sampai saat ini. Dalam konteks ideologi, masih ada pihak-pihak yang mempertentangkan antara negara dan agama. Hal ini merupakan residu dari formulasi dasar negara di masa lampau. Padahal sudah sangat jelas bahwa Pancasila secara eksplisit meletakkan nilai ketuhanan sebagai sila pertama yang mendasari sila-sila selanjutnya dalam Pancasila.

Masih dalam bingkai ideologi, masyarakat Indonesia juga masih dibekap rasa takut akan kemungkinan bangkitnya komunisme. Ketakutan akan komunisme semakin memuncak tatkala ada pihak-pihak yang mengamplifikasi ketakutan ini setiap peringatan G30S/PKI pada 30 September. Situasi ini tidak dipungkiri menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks politik dan hukum, situasi Indonesia hari ini tidak bisa dikatakan bebas dari krisis. Politik yang sejatinya *good life and good for mankind* masih dimaknai oleh beberapa pihak sebagai sarana perebutan kedudukan dan kekuasaan; *how to gain and retain the power*. Sebagai konsekuensinya, upaya mewujudkan tujuan nasional, yakni masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tidak bisa segera terlaksana. Mereka yang duduk di panggung kekuasaan dan di luar kekuasaan seperti oposisi dan kelompok masyarakat sipil masih belum satu perspektif dan visi dalam mengolah perbedaan agar menjadi satu kekuatan positif yang mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Di level ekonomi, kita harus jujur bahwa upaya mewujudkan cita-cita kemandirian ekonomi dan berkhidmat pada prinsip ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan masih merupakan jalan panjang untuk diwujudkan secara paripurna. Kita masih terdoda untuk berjalan pada pola pikir kapitalistik yang senyatanya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Pandemi Covid-19 menjadi fenomena gunung es atas berbagai krisis yang sudah menerpa sebelumnya. Kehadiran pandemi yang menghantam tanpa pandang bulu; tak peduli agama, status sosial,

Oleh:  
**Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.**  
Wakil Ketua MPR RI



kaya atau miskin, telah menghadirkan ujian keras bagi ketahanan nasional. Pandemi benar-benar menguji apakah para elit bangsa telah berkhidmat pada prinsip yang digariskan konstitusi (kebijakan yang konstitusional), apakah pola ekonomi yang dijalankan telah sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila dan kerakyatan, apakah masyarakat Indonesia masih memegang erat tradisi paguyuban atau gotong royong dalam kehidupan mereka. Secara singkat, pandemi Covid-19 menjadi momentum penggugah kesadaran bangsa Indonesia apakah telah berkhidmat pada nilai-nilai budayanya dalam menjalankan praktik politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau justru sebaliknya.

### **Modalitas Kaum Santri**

Deskripsi berbagai persoalan di atas menjadi tantangan yang tak mudah untuk dijawab oleh kaum santri di masa kini, termasuk juga segenap elemen bangsa lainnya. Masing-masing sektor kehidupan memiliki kompleksitas permasalahannya sendiri-sendiri, bahkan terhubung satu sama lain. Perjuangan pada masa revolusi fisik dengan mengusir Belanda dan sekutu sejujurnya lebih mudah karena yang menjadi musuh sangatlah jelas; Belanda dan Inggris sebagai kekuatan kolonial. Dewasa ini, lawan bersifat asimetris dan sulit dipetakan, serta bergerak dalam lajur multidimensi. Covid-19 misalnya, meskipun berdimensi fisik, akan tetapi sungguh tak mudah dihadapi karena ukurannya yang sangat kecil. Belum lagi dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor kehidupan. Namun demikian, terlepas dari berbagai kompleksitas dan kerumitan permasalahan yang ada, kaum santri memiliki modalitas yang sangat besar untuk berkontribusi menghadapi krisis yang ada.

Modalitas pertama yang dimiliki adalah pemahaman yang matang dan komprehensif akan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Bagi kaum santri, pertentangan antara negara dan agama sudah selesai ketika Pancasila sebagai dasar negara berhasil dirumuskan. Pancasila sebagai ideologi telah mengakui nilai ketuhanan sebagai unsur vital dan determinan utama dalam menjalankan praktik kebangsaan dan kenegaraan. Prinsip inilah yang mendorong kaum santri dan ulama di masa silam untuk bahu-membahu mengangkat senjata melawan penjajah. Prinsip dan keyakinan tersebut jugalah yang menjadi pijakan bagi kaum santri untuk terus berkontribusi bagi pembangunan nasional hingga hari ini. Pemahaman yang matang inilah yang hendaknya ditularkan oleh para santri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui media sosial. Hal ini dapat mencegah segregasi bangsa yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tak hendak Indonesia menjadi negara yang damai dan sejahtera.

Modalitas kedua adalah nilai-nilai kedisiplinan yang tinggi dalam

laku hidup sehari-hari. Kedisiplinan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para santri. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat mahal mengingat tak semua orang mampu berdisiplin dalam hidup, apalagi prinsip. Pandemi Covid-19 menjadi momentum penegas bahwa kedisiplinan menjadi senjata utama para santri dalam memerangi pandemi. Mereka tidak hanya konsisten dan persisten dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker, hingga melakukan pembatasan jarak dan sosial, tapi juga mampu menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat sekitar untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan tersebut. Inilah yang menjadi kausa mengapa banyak pondok pesantren yang telah berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, serta penanganan dampak pandemi Covid-19.

Modalitas yang ketiga adalah komitmen yang kuat untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan keimanan dan ketaqwaan (Imtaq). Perkembangan Iptek dewasa ini sungguhlah pesat, apalagi dikatalisasi oleh globalisasi dan revolusi 4.0. Dengan Iptek yang tinggi, segala kebutuhan dapat dipenuhi secara praktis dan efisien. Di era pandemi ini misalnya, setiap negara berlomba-lomba untuk menemukan obat dalam menangani Covid-19. Namun demikian, Iptek yang dikembangkan tak akan membawa kemaslahatan apabila tidak diimbangi dengan penguatan Imtaq. Tanpa Imtaq yang baik, obat Covid-19 dapat dikomersialisasi dan dikomodifikasi bagi kepentingan segelintir pihak yang menemukan. Tanpa Imtaq yang baik, kemajuan Iptek dapat disalahgunakan untuk mencapai keuntungan dengan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Inilah yang menjadi modalitas penting yang dimiliki oleh kaum santri dalam mengawal kontribusi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih banyak lagi modalitas lainnya yang dimiliki oleh para santri mengingat mereka adalah kaum yang sangat berkhidmat menggali nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa. Namun demikian, ketiga hal di atas adalah modalitas paling dasar dan relevan yang dimiliki oleh kaum santri untuk berkontribusi nyata dalam merespons situasi krisis yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, utamanya krisis akibat pandemi Covid-19.

Dengan ketiga modalitas tersebut, kaum santri diharapkan dapat menjadi suluh bagi masyarakat untuk tidak berputus asa dalam melawan situasi krisis hari ini, terus melakukan kegiatan positif dan produktif, merekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Selamat hari santri 22 Oktober 2020. Santri sehat Indonesia kuat. □

## Agar Kisah Robert Tak Terulang

Saat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf menemukan pengalaman menggambarkan masalah sumber daya manusia di negeri ini. Kisah si Robet menjadi inspirasi dia menulis buku: *Bersaing atau Tenggelam, Indonesia Bukan Bangsa Kuli*.

**P**OPULARITAS Dede Yusuf atau dengan nama lengkap Dede Yusuf Macan Effendi akan semakin menanjak di tengah masyarakat. Pasalnya, setelah populer sebagai aktor laga dalam berbagai serial televisi dan film, anggota DPR/MPR 2004-2008, Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013, setelah itu kembali menjadi anggota DPR/MPR dua periode (2014-2019, 2019-2024), dan sekarang ia menerbitkan buku. Buku karyanya itu diberi judul yang cukup menggugah kita, yakni: *Bersaing atau Tenggelam, Indonesia Bukan Bangsa Kuli*.

Buku ini diterbitkan oleh *RMBooks*, dengan tebal xxi + 178 halaman. Terbagi dalam VI Bab. Bila ditelusik dari halaman ke halaman, buku itu lebih banyak memaparkan ide, gagasan, dan kegiatan Dede Yusuf saat menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Sebab lebih banyak menampilkan sisi-sisi saat dirinya menjadi Jawa Barat 2, dalam foto-foto yang ditampilkan di buku itu, terlihat wajahnya masih muda bahkan remaja. Bahkan ada foto dirinya ketika hadir dalam suatu acara Kwarda Pramuka, ia didampingi oleh Moeldoko yang saat itu menjadi Pangdam Kodam III/Siliwangi. Moeldoko dalam karier selanjutnya menjadi Panglima TNI, dan kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam *prolog*, dia menceritakan ketika menjadi wakil gubernur, sebulan sekali ia menginap di rumah penduduk yang kondisinya terbilang tidak mampu. Suatu hari ia tinggal di rumah pengayuh becak di mana nama akang becak itu adalah Robet. "Namanya tidak lazim dengan etnisitas Sunda," ujar pria kelahiran 14 September 1966. Sebagai tukang becak, ia harus menanggung beban hidup dari ibu dan adik-adiknya.

Menginap di rumah Robet pastinya digunakan oleh politisi yang awalnya di PAN dan selanjutnya beralih Partai Demokrat itu untuk menampung keluh kesah kehidupan di tukang beca itu. Kepada Dede, ia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki warung usaha atau toko kecil-kecilan. Keinginan itu disambut baik oleh pak wakil gubernur dan kepadanya diberi bantuan modal sebesar Rp 5 juta.

Beberapa bulan kemudian, Dede meminta kepada stafnya untuk mengecek perkembangan usaha yang dilakukan oleh Robet. "Saya sedih setelah mendapat laporan bahwa usahanya tidak berkembang, merugi dan bahkan terancam gulung tikar," tutur Dede. Dia selanjutnya membanding kisah itu dengan wajah Indonesia sebagai negara yang luasnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjajar ribuan pulau, dan di dalamnya terkandung berbagai macam kekayaan sumber daya alam.

Sayangnya kekayaan itu belum bisa menyejahterakan rakyat, karena tidak memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang bisa diandalkan.

"Kisah Robet itulah yang menjadi inspirasi saya menulis buku ini", ungkap pengagum aktor laga dunia, Bruce Lee dan Chuck Norris, itu.

Bagi aktor yang pernah bermain dalam film *Catatan Si Boy* itu, sumber daya manusia sangat penting. Robet gagal menjadi wirausahawan, sebab tidak memiliki kompetensi sebagai wirausaha. Untuk itu, dalam bab-bab bukunya, ia memberi solusi bagaimana bangsa ini bisa memberdayakan sumber daya manusianya. Dede memaparkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dalam Bab I *Sebuah Momentum Langka* memaparkan besarnya jumlah penduduk merupakan faktor yang harus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, masalah kependudukan dan angkatan kerja produktif yang memiliki kompetensi dan standar ketrampilan sesuai kebutuhan kerja merupakan hal penting.

Bagaimana memberdayakan jumlah penduduk yang melimpah, sebagai bonus demografi, Dede tahu caranya. Caranya, ada dalam Bab V *Jurus Lima Langkah*. Di awal bab ini, ia menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi, "Saya menyusun lima strategi terkait apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif agar berhasil bersaing dalam era pasar bebas dan tentunya negeri ini berhasil menikmati bonus demografi."

Dalam bab ini diuraikan gagasan, ide, dan tindakan nyata dalam bentuk seperti yang terurai dalam sub bab-sub bab yang ada, yakni *beasiswa vokasional, sekolah binaan industri, sertifikasi kompetensi, rangsangan ekonomi kreatif, dan gerakan pencerahan*.

Dari Bab V inilah dia berharap mampu menghilangkan Indonesia seperti yang tertulis dalam Bab IV *Bukan Bangsa Kuli*. Di awal bab,

dia mengatakan, sungguh ironis Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan kepada persoalan pengangguran. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir berada di kisaran 5% sampai 6%.

Dalam sub bab *Cerita Air Mata*, sebagai Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengungkapkan banyak menerima berbagai persoalan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sekarang dikenal dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Mulai dari upah yang tidak dibayar hingga penyiksaan dan ancaman hukuman mati," ujarnya. Dalam sub bab itu ia mengatakan, potret nasib kelam dari mereka yang disebutnya sebagai pahlawan devisa.

Masalah-masalah itulah, menurut alumni SMAN VI Jakarta, ini menjadi inspirasi dirinya menulis. Dia berharap, buku ini dapat mewujudkan masyarakat yang mempunyai kompetensi kerja sehingga dapat menciptakan bangsa yang mandiri, makmur, dan sejahtera. □

AWG



FFY